

Mewujudkan Pendidikan Unggul

Untuk mencapai pendidikan unggul dibutuhkan ikhtiar tak kenal lelah dalam memompa etos, perjuangan, dan keikhlasan. Penting ditekankan betapa krusialnya peran stakeholders untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama pimpinan satuan pendidikan dan pendidik. Pimpinan harus memberikan jaminan pada peningkatan mutu secara berkelanjutan, sementara pendidik harus menghasilkan pembelajaran yang inspiratif.

Tugas kita sekarang adalah mendorong tercapainya pendidikan unggul yang meliputi input, proses, dan output. Setiap pendidik harus menyadari bahwa tugas mereka adalah mengubah karakter anak dari yang biasa saja menjadi luar biasa. Pendidik meyakini bahwa setiap anak pasti telah memiliki keunggulan, minat, dan bakat, yang unik sebagai anugerah dari Tuhan. Tugas pendidik adalah memfasilitasinya agar mampu memaksimalkan potensi bawaan tersebut dengan model pembelajaran yang inspiratif.

ISBN 978-602-8217-42-2



9 786028 217422

Biyanto

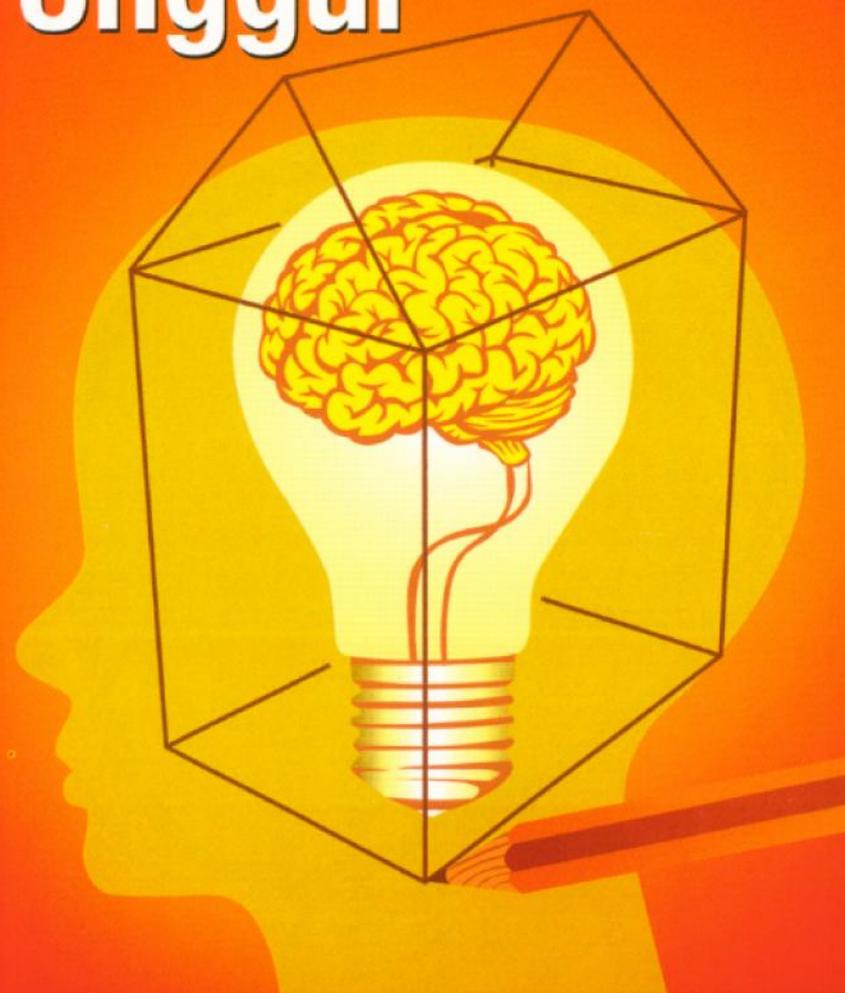
MEWUJUDKAN PENDIDIKAN UNGGUL



HIKMAH PRESS

Biyanto

Mewujudkan Pendidikan Unggul



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v

Bagian Satu:

Mengutamakan Budaya Mutu

Mewujudkan Pendidikan Unggul	3
Bersinergi Menjadi yang Terbaik.....	6
Menjadikan Pendidikan Bertaraf Internasional	9
Memperkuat Program RSBI.....	14
Menentukan Branding Sekolah.....	18
Meneguhkan Visi Pendidikan Muhammadiyah.....	23
Menumbuhkan Multikulturalisme Peserta Didik.....	33
Tuntutan Budaya Mutu	36
Membangun Kampus Berbasis Riset.....	41

Bagian Dua:

Guru yang Inspiratif

Tuntutan Jadi Guru Inspiratif	49
Guru Senang Menulis	53
Meningkatkan Mutu Guru	56
Spirit Laskar Pelangi Untuk Reformasi Pendidikan	59
Ironi Pemerasan Terhadap Guru.....	64

Guru Bantu Diangkat PNS	68
Raperda UMG dan Kesiapan Swasta.....	71
Multikulturalisme dalam Sepak Bola	75
Sekolah Nunut	78

Bagian Tiga:

Mereposisi Ujian Nasional

Mereposisi Ujian Nasional	85
Menggagas UN yang Berkeadilan.....	89
Prestasi Yes, Jujur Harus	93
Rapor Kejujuran UN Jatim	96
Disorientasi Pendidikan Agama	100
Pendidikan Holistik.....	104
Mengembalikan Makna Pendidikan.....	108
Mereformasi Pendidikan	113
Puasa Mengajarkan Optimisme.....	118

Bagian Empat:

Kreativitas Mengelola Sekolah

Problem Pungutan Sekolah	123
Larangan Pendaftaran Lebih Awal	128
Pendidikan Gratis dan Nasib Sekolah Swasta.....	132
Menyikapi Kebijakan Sekolah Gratis.....	137
Optimalisasi Sumber Daya Stakeholders	140
Menumbuhkan Civic Values di Pesantren	143
Urgensi Pendidikan Lingkungan Hidup	148
Pencegahan HIV/AIDS Melalui Pendidikan	152
Masa Depan PTAI.....	156
Setelah IAIN Tidak Bisa Jadi Universitas.....	160

BAGIAN SATU
MENGUTAMAKAN
BUDAYA MUTU

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN UNGGUL

Ada fenomena yang saling bertentangan tatkala kita menyaksikan perjuangan sekolah untuk mendapatkan peserta didik baru. Ada sekolah yang laris manis sehingga pendaftarannya melampaui daya tampung. Bahkan dengan gagah sekolah ini menolak banyak pendaftar. Fenomena ini biasanya dialami sekolah berkategori mapan dengan segudang prestasi. Sementara di tempat lain, ada sekolah yang harus berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mendapatkan peserta didik. Bahkan hingga tahun ajaran baru dimulai, sekolah ini masih menerima pendaftaran. Itu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan nasib sekolah. Kondisi ini biasanya dialami sekolah berkategori kecil dan miskin prestasi.

Pertanyaannya, kenapa ada sekolah yang laku keras dengan jumlah peminat luar biasa banyak? Sementara di tempat lain ada sekolah yang justru tidak laku sehingga sangat sulit mendapatkan peserta didik. Perbedaan nasib sekolah ini terjadi dikarenakan faktor keunggulan. Itu berarti, jika lembaga pendidikan berkategori unggul, maka di mana pun posisinya pasti akan didatangi masyarakat.

Dalam konteks inilah lembaga pendidikan harus mampu memberikan layanan yang bermutu tinggi. Sebab,

jika satuan pendidikan gagal menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan maksimal, maka cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan *stakeholder*-nya.

Sekolah unggul merupakan terjemahan dari beberapa terma seperti *effective school*, *efficiency school*, *high performance school*, dan *excellent school*. Dalam praktiknya, untuk mengenalkan pada masyarakat bahwa sekolahnya bermutu, maka digunakan *branding* sekolah unggul, sekolah plus, sekolah favorit, sekolah model, rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), dan sekolah berstandar internasional (SBI). Beberapa *branding* ini boleh digunakan asalkan di sekolah tersebut diterapkan budaya mutu. Artinya, ada jaminan standar mutu layanan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Persoalan layanan mutu ini penting karena ada kalanya orang memahami pendidikan unggul sekedar dilihat dari sarana fisik, besarnya SPP, dan peserta didiknya yang memang pilihan. Akibatnya muncul persepsi bahwa sekolah unggul itu harus serba “wah”. Tom J. Parkins (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada tiga indikator yang harus dimiliki sekolah unggul: input, proses, dan output. Dari tiga indikator ini, Tom merumuskan tesis mengenai konsep sekolah unggul.

Menurut Tom, sekolah unggul dapat dilihat dari dua kategori; *best input* dan *best process*. Sekolah unggul dengan kategori *best input* biasanya berusaha untuk memperoleh peserta didik yang bernilai tinggi. Dalam praktiknya, sekolah ini menerapkan tes masuk yang sangat ketat, terutama kemampuan akademik peserta didik. Harapannya, sekolah memperoleh peserta didik terbaik di bidang akademik. Dengan demikian output yang dihasilkan sekolah pasti lulusan dengan capaian akademik hebat.

Pertanyaannya, capaian akademik hebat itu dikarenakan proses pendidikan di sekolah atau faktor lain? Diduga kuat anak-anak hebat lulusan sekolah yang menekankan pada

best input dikarenakan anaknya memang sudah hebat sejak masuk, ditambah dengan fasilitas bimbingan belajar di luar sekolah. Ini berarti kontribusi guru dalam proses pendidikan pada sekolah yang menekankan *best input* sangat kecil.

Sekolah unggul kategori kedua menekankan pada *best process*. Sekolah ini biasanya tidak begitu menekankan pada kualitas akademik anak pada saat awal masuk. Dalam kondisi apa pun peserta didik yang mendaftar akan diterima. Semua peserta didik yang mendaftar akan dipelajari dan dipetakan berdasarkan keunggulannya.

Jadi, tidak ada proses seleksi yang “jlimet” untuk sekolah ini karena gurunya telah menyiapkan diri menjadi agen perubahan (*agent of change*). Setiap guru menyadari bahwa tugas mereka adalah mengubah karakter anak dari yang biasa saja menjadi luar biasa. Guru di sekolah ini meyakini bahwa setiap anak pasti telah memiliki keunggulan, minat, dan bakat, yang unik sebagai anugerah dari Tuhan. Tugas guru adalah memfasilitasi anak agar memaksimalkan potensi bawaan tersebut.

Tipe kedua inilah yang sesungguhnya layak disebut sekolah unggul. Tetapi sangat disayangkan, jumlah sekolah yang menekankan keunggulan pada *best process* ternyata sangat sedikit. Hasil penelitian Tom menunjukkan bahwa 99 persen sekolah unggul di Indonesia membangun keunggulannya dengan strategi *best input*. Ini berarti hanya satu persen sekolah yang menekankan keunggulannya pada *best process*.

Tugas kita sekarang adalah mendorong sekolah agar menempuh strategi *best process*, yang tentunya membutuhkan guru hebat. Ini penting ditekankan karena jantung pendidikan sesungguhnya ada pada proses pembelajaran. Ini berarti guru harus keluar dari pakem kurikulum untuk menjadi guru inspiratif.

BERSINERGI MENJADI YANG TERBAIK

Salah satu agenda rutin tahunan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur adalah menyelenggarakan Muhammadiyah Education Award (ME-Award), pengembangan dari OlyCon (Olympiad & Conference). Puncak acaranya ditandai dengan penghargaan bagi para pemenang olimpiade peserta didik, guru, dan sekolah Muhammadiyah. Selain olimpiade, acara ini juga mempertandingkan mutu antar sekolah Muhammadiyah dalam tiga kelompok: *outstanding school* (sekolah terkemuka), *excellent school* (sekolah unggul), dan *inspiring school* (sekolah inspirasi).

Sekolah berkategori *outstanding school* adalah yang terbaik dari yang terbaik (*the best of the best*). Penilaiannya didasarkan *achievement* yang luar biasa sejak OlyCon pertama. Indikator lainnya adalah meraih penghargaan sekolah unggul terbaik selama lima tahun terakhir. Sekolah kategori ini berhak memperoleh pendampingan dari tim yang ditunjuk Majelis Dikdasmen PWM Jatim. Konsekuensinya, sekolah berlabel prestisius ini ditugaskan untuk membina sekolah Muhammadiyah yang lain.

Pada tahun 2011, juga ada 30 sekolah Muhammadiyah yang ditetapkan sebagai *excellent school*. Sekolah kategori ini dianggap telah melampaui delapan standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana diundangkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005. Dikatakan melampaui karena sekolah ini juga memenuhi aspek tambahan berupa kewajiban membangun kultur hidup islami dan ber-Muhammadiyah. Perwujudan aspek tambahan ini dapat dilihat melalui kebijakan pimpinan untuk menjamin pelaksanaan nilai-nilai Keislaman dan Kemuhammadiyah bagi warga sekolah.

Ditetapkan juga sembilan sekolah Muhammadiyah berkategori *inspiring school*. Sekolah kategori ini dinilai berdasarkan kegigihannya dalam meraih prestasi di tengah persaingan antar sekolah yang kian kompetitif. Penghargaan terhadap sekolah yang menginspirasi ini penting untuk memberikan spirit pada sekolah Muhammadiyah agar terus bertahan dan meraih prestasi.

Jika dilihat dari aspek mutu, maka dapat dikatakan bahwa sekolah Muhammadiyah di Jatim yang berjumlah 937 itu sangat bervariasi. Yang terbesar adalah kelompok sekolah berkategori menengah ke bawah. Penghargaan untuk sekolah inspirasi ini diharapkan menjadi cerita sukses bagi sekolah lain. Di masa mendatang, kita ingin melihat kisah yang menginspirasi sebagaimana pernah dicontohkan SD Muhammadiyah 16 Surabaya (Sekolah Kreatif).

Kategori *outstanding*, *excellent*, dan *inspiring* sekaligus menunjukkan keragaman mutu sekolah Muhammadiyah. Bermula dari realitas inilah Majelis Dikdasmen tingkat wilayah, daerah, dan cabang, harus melakukan sinergi untuk memperpendek kesenjangan mutu antar sekolah Muhammadiyah. Untuk kepentingan ini rasanya kita perlu menemukan strategi yang tepat. Pilihan strategi yang dapat diambil adalah

mewujudkan sekolah berkategori unggul di setiap kabupaten dan kota se-Jatim. Jika ini dapat dicapai, maka virus sekolah unggul akan terus menyebar sehingga semakin banyak sekolah Muhammadiyah yang berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Standar Nasional (SSN), dan Sekolah Kategori Mandiri (SKM).

Pilihan strategi tersebut terasa sejalan dengan amanat musyawarah wilayah (musywil) Muhammadiyah ke-14 di Jember pada 9-10 Oktober 2010 lalu. Pada saat itu dicetuskan keinginan membentuk sekolah unggul untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Melalui strategi *modeling* sekolah Muhammadiyah di setiap kabupaten dan kota dimaksudkan agar kepala sekolah, guru, dan Majelis Dikdasmen, memperoleh kemudahan dalam mewujudkan sekolah unggul. Dengan demikian untuk melihat sekolah unggul, maka warga Muhammadiyah tidak perlu datang ke kota-kota metropolitan.

Untuk mewujudkan sekolah unggul di setiap kabupaten dan kota jelas diperlukan kerjasama dengan semua pihak. Termasuk dalam hal ini adalah pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM). Pada konteks ini perlu dibangun sinergi antara sekolah dan PTM. Targetnya adalah agar PTM menjadikan sekolah Muhammadiyah sebagai sekolah laboratorium atau sekolah binaan. Agar keinginan ini secepatnya tercapai, yang mendesak dilakukan adalah pemetaan mutu sekolah.

Langkah selanjutnya adalah memberikan pendampingan di bidang organisasi, manajemen, pembelajaran, dan penjaminan mutu (*quality assurance*). Untuk kepentingan inilah Majelis Dikdasmen Wilayah Jatim meluncurkan program *Muhammadiyah Branded School*. Melalui program ini kita akan menyaksikan sekolah Muhammadiyah terus bersinergi menjadi yang terbaik.

MENJADIKAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pada 27 Februari hingga 2 Maret 2011, saya berkesempatan mendampingi 25 sekolah Muhammadiyah se-Jawa Timur dalam acara studi banding di Malaysia dan Singapura. Total rombongan berjumlah 50 orang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, serta pimpinan Majelis Dikdasmen Cabang dan Daerah. Tujuan utama studi banding adalah memperkuat kerjasama antar sekolah (*sister school*) Muhammadiyah Jatim dengan sekolah di Malaysia dan Singapura.

Saat berada di Malaysia, ada dua sekolah yang dikunjungi; Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki (SM-KAB) dan Sekolah Islam Adni (Adni School). Meski berkategori *international school*, namun keduanya memiliki karakter berbeda. SMKAB yang berada di Kuala Lumpur merupakan sekolah pemerintah dengan capaian terbaik 2010 sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi.

SMKAB didirikan pada 1958 dan kini menampung 1.233 peserta didik. Slogan yang diusung adalah nilai-nilai *kaizen* dengan spirit “penambahbaikan secara berterusan”. Jika diterjemahkan dalam bahasa kita, slogan ini kira-kira

berarti terus-menerus berbenah untuk menjadi yang terbaik (*continous improvement*).

Rombongan juga mengunjungi Adni School di Selangor. Sekolah ini dipimpin oleh Dr. Hasni bin Mohammed, yang juga menjadi konsultan pendidikan OKI. Yang menarik dari sekolah berbasis pesantren ini adalah model kurikulum yang dikembangkan. Beragam model kurikulum telah dikembangkan, seperti kurikulum pemerintah serta beberapa negara Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Kebijakan ini sekaligus memberikan kelonggaran peserta didik untuk mengikuti ujian berdasarkan kemampuannya. Peserta didik pun diberikan pilihan untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan pemerintah atau beberapa sekolah maju di luar negeri.

Karena itu ijazah yang diperoleh peserta didik Adni School sangat beragam. Sebagian kecil dari pemerintah Malaysia, dan sebagian besar dari berbagai sekolah di luar negeri. Yang menarik dari sistem pendidikan di Adni School ini adalah tidak menjadikan usia sebagai pertimbangan. Karenanya tidak mengherankan jika ada peserta didik yang berumur 20 tahun sudah menempuh pendidikan master dan doktor. Sistem ini sangat memungkinkan karena ada peluang bagi anak-anak usia dini untuk belajar di Adni School. Dengan model pesantren, kini Adni School telah menjadi rujukan belajar bagi ribuan peserta didik dari 30 negara.

Agenda studi banding di Malaysia kami jalani selama dua hari. Malam hari, 28 Februari, kami berkemas untuk melanjutkan perjalanan ke Singapura pagi harinya melalui bandara internasional Kuala Lumpur. Perjalanan dari Malaysia ke Singapura ditempuh dalam waktu kurang lebih satu jam. Bagi yang suka *travelling*, sebenarnya ada pilihan lain menuju Singapura yaitu dengan naik bus. Perjalanan

dengan bus ke Singapura melalui Johor memakan waktu kurang lebih lima jam. Siang hari, rombongan telah mendarat di bandara Changi, Singapura.

Agenda yang dilakukan di negeri singa ini adalah mengunjungi Madrasah Al-Junied Al-Islamiah dan Madrasah Al-Irsyad. Dua sekolah ini dipilih karena memiliki kesamaan dengan sekolah Muhammadiyah yang berkarakter *privat and Islamic school*. Lebih dari itu, dua sekolah swasta ini juga menunjukkan eksistensi di tengah kurangnya perhatian pemerintah.

Pada saat sesi *sharing* dengan Kepala Madrasah Al-Junied, Mokson bin Mahori, rombongan memperoleh kesan bahwa sekolah yang didirikan pada 1927 ini memiliki daya saing yang luar biasa. Sebagai sekolah *privat*, Madrasah Al-Junied mengandalkan kerjasama. Salah satunya adalah dengan Universitas Al-Azhar, Kairo. Model kurikulum yang dikembangkan pun berkiblat pada Universitas Al-Azhar. Tidak heran jika penguasaan ilmu-ilmu keislaman menjadi andalan madrasah ini.

Sementara di Madrasah Al-Irsyad, rombongan mendapatkan penjelasan mengenai aplikasi sesungguhnya dari pembelajaran berbasis *information and technology* (IT). Bukan hanya fasilitas yang ditawarkan Al-Irsyad. Sekolah ini juga menekankan pada pendidiknya untuk memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran. Sebagai *Islamic school*, Madrasah Al-Irsyad juga memberikan tekanan pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab dan Inggris. Dengan cara ini pimpinan sekolah berharap peserta didik memiliki keunggulan daya saing di level global.

Dua hari telah berlalu dan dihabiskan di Singapura. Rombongan pun harus bersiap kembali ke tanah air melalui Bandara Changi. Perjalanan dari Changi Airport menuju Juanda, Surabaya, membutuhkan waktu seki-

tar dua jam. Pesawat yang membawa rombongan adalah China Airline. Sebelum *take off*, saya mengamati Changi Airport tampak begitu rapi dan bersih. Rasanya lebih bagus dibanding Kuala Lumpur Airport. Selama perjalanan menuju bandara Juanda saya mengamati anggota rombongan bercengkerama kecil menyatakan tekad untuk membangun mimpi agar sekolah Muhammadiyah menjadi terbaik di masa mendatang.

Tepat pukul 23.00 wib, kami mendarat di Bandara Juanda. Saya melepas rombongan malam dengan segudang harapan. Semoga studi banding yang teramat singkat dapat menginspirasi guru, kepala sekolah, dan pimpinan Persyarikatan. Intinya, Muhammadiyah harus memiliki sekolah berkelas internasional. Modalnya, Muhammadiyah Jatim kini telah memiliki 9 sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) meliputi; SMAM 2 Surabaya, SMAM 2 Sidoarjo, SMAM 1 Gresik, SMAM 1 Ponorogo, SMKM 5 Babat (Lamongan), SMKM 1 Kepanjen (Malang), SMPM 5 Surabaya, SMPM 12 Gresik, dan SDM 4 Surabaya.

Pertanyaannya, apakah status RSBI itu telah menjadikan seluruh aspek sekolah: kurikulum, pembelajaran, lulusan, suasana akademik, fasilitas, manajemen lembaga dan keuangan, sistem informasi, serta penelitian dan publikasi, bertaraf internasional? Ini pertanyaan penting yang harus dijawab sekolah Muhammadiyah yang sudah dan sedang berproses menjadi RSBI.

Menurut saya, substansi berkelas internasional bukan hanya terletak pada muatan kurikulum dan evaluasi, sebagaimana yang selama ini dipahami sekolah RSBI. Yang juga penting adalah proses dan prosedur yang harus disiapkan sekolah sehingga menjadi berkelas internasional. Untuk mendukung keinginan tersebut jelas dibutuhkan

kemitraan dengan sekolah lain. Karena itu Majelis Dikdasmen PWM Jatim memfasilitasi sekolah untuk membangun *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan sekolah di luar negeri.

Jalinan MoU ini penting sebagai langkah awal untuk pertukaran budaya (*culture exchange*), pertukaran guru (*teacher exchange*), dan pertukaran peserta didik (*student exchange*). Pada Mei 2011 ini beberapa sekolah Muhammadiyah telah mengirim peserta didik dan guru di Malaysia dan Singapura, seperti dilakukan SMAM 2 Sidoarjo, SMAM 1 Ponorogo, SMPM 2 Surabaya, SMPM 5 Surabaya, dan SMPM 1 Surabaya. Melalui program Australia-Indonesia Bridge Project, peserta didik dan guru SMAM 2 Surabaya juga telah berkunjung ke Australia. Sebaliknya, peserta didik dan guru beberapa sekolah Australia juga telah bertamu di SMAM 2 Surabaya.

Saling mengenal kebudayaan antar sekolah lintas negara ini jelas sangat bermanfaat bagi guru dan peserta didik. Inilah yang harus dikembangkan sekolah Muhammadiyah yang telah RSBI. Dengan cara ini diharapkan sekolah Muhammadiyah akan mendapatkan pengakuan internasional (*international recognition*). Hingga pada saatnya guru dan peserta didik sekolah di luar negeri mau bertamu dan bertukar budaya di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Untuk mencapai tujuan ini jelas dibutuhkan kerja keras semua komponen; kepala, guru, karyawan, komite, dan Persyarikatan. Jadi, persoalannya kini berpulang pada komitmen semua komponen tersebut.

MEMPERKUAT PROGRAM RSBI

Hasil evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap 1.305 sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, yang berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) patut dicermati. Evaluasi itu menyimpulkan bahwa program RSBI yang telah digulirkan pemerintah sejak 2005 dianggap gagal total. Indikatornya, hingga kini belum ada satu pun sekolah berlabel RSBI yang layak dinaikkan statusnya menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). Padahal seharusnya untuk menjadi SBI, jenjang SD hanya membutuhkan waktu tiga tahun, SMP empat tahun, dan SMA/SMK lima tahun. Kegagalan ini harus menjadi evaluasi Kemendikbud. Sebab, ini menunjukkan program RSBI tidak dirancang dengan serius dan berkelanjutan. Padahal program RSBI telah menghabiskan anggaran milyaran rupiah. Anggaran itu dialokasikan dari APBN dan APBD.

Di antara sekolah berstatus RSBI, sejatinya telah sejak lama menanyakan keberlanjutan program ini pada pemerintah. Pertanyaan yang diajukan terutama berkaitan dengan perubahan status RSBI menjadi SBI. Karena tidak ada kepastian dari pemerintah, sebagian sekolah berstatus RSBI pun khawatir. Apalagi subsidi yang diberikan pemerintah mulai

dikurangi. Di tengah ketidakpastian ini sekolah melakukan *fundraising* guna menutupi biaya operasional. Inisiatif sekolah ini dianggap tidak sejalan dengan program pemerintah mengenai pendidikan gratis. Bahkan dalam tingkat tertentu dapat mereduksi kampanye pendidikan gratis yang selama ini digelorakan pemerintah. Padahal dalam kenyataannya, kampanye pendidikan gratis itu cenderung menyesatkan karena tidak pernah ada dalam kenyataan.

Kegagalan program RSBI ini sangat mungkin disebabkan tiadanya titik temu antara kebutuhan operasional sekolah dan subsidi yang dialokasikan pemerintah. Akibatnya layanan yang diberikan sekolah berlabel RSBI sangat jauh dari yang diharapkan. Masyarakat pun sulit membedakan RSBI dan non-RSBI kecuali berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Karena biayanya sangat mahal, RSBI pun diplesetkan sebagian orang dengan “rintisan sekolah bertarif internasional.” Dalam soal biaya ini sekolah selalu berdalih bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu jelas dibutuhkan anggaran yang besar. Jika tidak tersedia anggaran yang memadai, sekolah tidak mampu meng-*upgrade* mutu guru dan menyediakan layanan terbaik pada peserta didik.

Kualifikasi guru tampaknya menjadi persoalan utama yang menyebabkan kegagalan program RSBI. Untuk menjadi SBI, kualifikasi guru dipersyaratkan minimal berpendidikan strata dua (S-2) pada jenjang SD (10 persen), SMP (20 persen), dan SMA/SMK (30 persen). Faktanya, kualifikasi guru seperti yang diharapkan ini belum tersedia. Karena itu hingga kini belum ada sekolah berstatus RSBI yang berubah menjadi SBI.

Padahal jika program RSBI dirancang serius dan berkelanjutan, mestinya persyaratan tersebut tidak terlalu sulit untuk dipenuhi. Untuk kepentingan ini pemerintah de-

ngan anggaran yang disediakan cukup menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra. Selanjutnya, guru-guru RSBI diberi kesempatan melanjutkan studi ke jenjang S-2 berdasarkan kebutuhan setiap sekolah. Dengan demikian, sekolah yang kini berstatus RSBI dapat segera berubah menjadi SBI.

Langkah ini perlu secepatnya dilakukan karena Kemendikbud telah berketetapan hati untuk tidak menghapus program RSBI. Keinginan Kemendikbud ini perlu didukung karena kita semua juga berkepentingan dengan terwujudnya pendidikan nasional yang bermutu dan berdaya saing internasional. Yang harus diingat, agar program RSBI ini tidak lagi mengalami kegagalan maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, program RSBI seharusnya tidak dipahami sebagai proyek yang berimplikasi subsidi dana dari pemerintah. Hal ini perlu ditekankan karena sebagian sekolah berpandangan RSBI sebagai proyek yang ada uangnya. Pemahaman ini terjadi lantaran pemerintah pusat mengalokasikan subsidi program RSBI dengan rincian; SD (Rp 500 juta/tahun selama tiga tahun), SMP (Rp 400 juta/tahun selama empat tahun), SMA (Rp 600 juta/tahun selama lima tahun), dan SMK (Rp 950 juta/tahun selama lima tahun). Subsidi ini belum termasuk alokasi bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Motivasi untuk memperoleh subsidi pemerintah ini tampak lebih menonjol saat sekolah mengajukan status RSBI. Sekolah terkadang tidak lagi mempedulikan sumber daya yang dimiliki. Ironisnya, pemahaman bahwa RSBI adalah proyek juga terjadi di lingkungan Kemendikbud mulai pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Kedua, konsep program RSBI sejauh ini lebih banyak menekankan pada aspek konten. Hal ini dapat diamati dari kecenderungan sekolah berstatus RSBI untuk mengadopsi kurikulum negara lain. Bahkan untuk kepentingan

ujian pun sekolah mengikuti standar kurikulum yang ditetapkan negara tersebut. Yang patut disayangkan, proses adopsi kurikulum dan standar ujian ini tidak diikuti dengan perbaikan manajemen, sumber daya guru, proses belajar mengajar, dan sarana prasarana.

Akibat terlalu berorientasi pada materi, maka peserta didik RSBI pun harus menerima beban ganda saat mengikuti ujian. Selain ujian dengan standar kurikulum negara lain, mereka juga wajib mengikuti ujian nasional (UN). Karena terlalu berorientasi pada materi, maka proses pembelajaran bagi mereka terkesan biasa-biasa saja. Apalagi proses pembelajaran itu tidak diikuti kemampuan menyampaikan materi dalam bahasa Inggris dengan baik. Karena faktor inilah RSBI sejatinya belum layak disebut bertaraf internasional.

Ketiga, kelemahan mendasar program RSBI selama ini juga tampak pada pemahaman terhadap konsep *sister school*. Program *sister school* telah menjadi salah satu persyaratan RSBI. Jujur harus dikemukakan, program *sister school* sejauh ini baru sebatas berwisata ke beberapa sekolah di luar negeri untuk memperoleh nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Selanjutnya dilakukan kunjungan oleh kepala, guru, dan peserta didik.

Semestinya konsep *sister school* dipahami dalam pengertian yang sebenarnya, yakni kerjasama antar sekolah RSBI dengan sekolah lain di negara maju. Kerjasama meliputi bidang kurikulum, pertukaran guru (*teacher exchange*), pertukaran peserta didik (*student exchange*), pertukaran budaya (*culture exchange*), serta penelitian dan publikasi. Yang sangat penting dari kegiatan *sister school* ini adalah terjadinya perubahan budaya dan etos kerja unsur-unsur di sekolah RSBI untuk menjadi yang terbaik.

MENENTUKAN BRANDING SEKOLAH

Masa pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran baru biasanya dibuka pada bulan Juni hingga Juli. Tetapi, beberapa sekolah swasta berkategori unggulan telah menutup pendaftaran peserta didik baru dan segera membuka daftar tunggu untuk tahun ajaran berikutnya. Kita juga menyaksikan banyak sekolah negeri dan swasta mengalami kesulitan mendapatkan peserta didik baru. Bahkan beberapa sekolah terpaksa harus di-*merger* karena jumlah rombongan belajarnya tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan Dinas Pendidikan kota/kabupaten.

Fenomena kontras ini sekedar gambaran untuk sampai pada pertanyaan fundamental; kapa ada sekolah yang laku keras, setengah laku, dan bahkan tidak laku? Apa kualifikasi yang membedakan sekolah-sekolah tersebut? Adakah sekolah-sekolah tersebut tidak melakukan *marketing* pada saat rekrutmen peserta didik baru?

Usaha memasarkan (*marketing*) pada tingkat tertentu biasanya telah dilakukan sekolah saat menjelang tahun ajaran baru. Pada saat itu semua sekolah disibukkan dengan kegiatan promosi untuk mendapatkan peserta didik

sebanyak mungkin. Usaha lebih keras akan dilakukan sekolah yang berkualifikasi biasa-biasa saja. Bahkan untuk lembaga pendidikan yang berkualitas di bawah standar, masa pendaftaran peserta didik baru akan menjadi saat menegangkan. Lembaga pendidikan seperti ini pasti akan was-was karena dibayangi kenyataan tidak mendapatkan peserta didik baru.

Pada saat bersamaan, kita juga menyaksikan beberapa sekolah harus menolak banyak pendaftar karena peminatannya berlimpah. Bahkan yang lebih unik lagi ada sekolah yang harus menutup pendaftaran sebelum masa penerimaan peserta didik baru resmi dibuka. Hal ini terjadi karena banyak sekolah berstatus unggulan telah menggunakan sistem tunggu (*inden*) pada saat pendaftaran.

Dalam sudut pandang pemasaran (*marketing*), lembaga pendidikan sesungguhnya menjual produk berupa jasa untuk menjadikan peserta didik berkualitas. Kenyataan inilah yang seringkali tidak disadari oleh pengelola lembaga pendidikan. Bahkan dalam beberapa kasus, seringkali masih ditemukan pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan adalah lembaga dakwah. Akibatnya, model pengelolaannya pun hanya mengandalkan perjuangan, pengabdian, dan keikhlasan.

Tentu saja ketiga modal ini penting, tetapi sangat tidak cukup untuk menjadikan pendidikan berkualitas. Lembaga pendidikan jelas membutuhkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Bahwa pendidikan dapat digunakan sebagai sarana dakwah juga merupakan pandangan yang benar. Tetapi, jangan pernah dilupakan bahwa lembaga pendidikan juga membutuhkan dana untuk biaya operasional. Salah satu sumber pendanaan adalah masyarakat. Di sinilah biasanya masyarakat akan mencari lembaga pendidikan yang dapat dipercaya, berkualitas, dan memiliki nilai tambah.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat yang berkepentingan terhadap lembaga pendidikan (*stakeholder*), sudah saatnya pengelola pendidikan mengubah paradigma lama yang hanya menekankan lembaga pendidikan sebagai sarana dakwah menjadi lembaga yang profesional. Pada konteks inilah penentuan label dan merek (*branding*) sekolah penting dilakukan untuk mempercepat *marketing*.

Persoalannya, *marketing* dalam dunia pendidikan bagi sebagian kalangan masih dianggap asing. Bahkan untuk lembaga pendidikan agama (Islam), *marketing* terkadang masih dianggap aib. Pandangan ini muncul karena dalam sejarah, kyai sebagai personifikasi orang yang memiliki otoritas keagamaan biasanya didatangi masyarakat. Ini berarti jika ada tradisi di mana seorang guru aktif mendakwahkan agama dengan cara datang langsung ke masyarakat, maka akan dipandang sebagai kultur yang tidak lazim.

Tetapi, saat ini pengaruh korporasi dalam dunia pendidikan juga sudah sangat kuat. Apalagi pemerintah dan DPR kini telah berupaya merampungkan Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang oleh sebagian orang dikatakan sangat pro liberalisasi pendidikan. Dalam RUU BHP jelas dikatakan bahwa pendidikan adalah bagian dari bidang usaha. RUU BHP dirancang untuk menjabarkan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing.

Dalam Perpres tersebut dikemukakan bahwa pendidikan termasuk dalam bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing dengan persyaratan tertentu (pasal 1 ayat 1). Pendidikan yang dimaksud di sini adalah mulai tingkat dasar, menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal. Ini berarti semangat liberalisasi yang

telah ada dalam Perpres semakin diperjelas RUU BHP. Melihat tantangan yang demikian berat rasanya pengelola lembaga pendidikan harus membuka diri dengan praktik manajemen modern agar tercipta kultur pengelolaan pendidikan yang baik (*good educational governance*).

Selain dituntut melakukan marketing, sekolah juga harus mampu menentukan *branding* dengan cara pemberian merek atau cap untuk menunjukkan keunggulannya. Penentuan *branding* ini penting dilakukan karena dapat digunakan membedakan satu sekolah dengan sekolah lain. *Branding* sekolah tentu tidak selalu harus bersifat akademik, tetapi dapat juga non akademik.

Ini berarti *branding* setiap sekolah dapat berbeda-beda dan sangat bergantung pada *resources* yang dimiliki. Misalnya, ada lembaga pendidikan yang menentukan *branding* sekolahnya di bidang non akademik seperti olahraga, seni, serta penerapan teknologi dan informasi (TI). Sementara ada sekolah lain yang memiliki *branding* di bidang akademik seperti selalu juara olimpiade sains, bahasa asing, dan rangking pertama untuk Ujian Nasional (UN). Sementara, untuk sekolah yang berkarakteristik keagamaan dapat menentukan *branding* sebagai lembaga penanaman nilai-nilai moral-agama.

Melalui bidang-bidang yang ditekuni tersebut, sekolah dapat melakukan *image building* pada masyarakat. Jika masyarakat ingin anaknya menjadi atlet nasional, maka tinggal mendaftarkan diri di sekolah yang ber-*branding* olahraga. Orang tua yang ingin anaknya menjadi ilmuwan kelas dunia, maka dicarilah sekolah ber-*branding* membangun prestasi akademik. Demikian halnya dengan orang tua yang ingin menjadikan anaknya sebagai pemusik, fasih berbahasa asing, melek teknologi, dan berakhlak mulia, maka dicarilah sekolah dengan *branding* masing-masing.

Ahli marketing Indonesia, Hermawan Kartajaya, mengatakan bahwa untuk menentukan *branding* sekolah konsep yang dapat digunakan adalah dengan memahami hubungan *Positioning, Differentiation, dan Branding* (PDB). *Positioning* adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi yang tepat di mata pelanggan (*customer*). Dalam dunia pendidikan, *customer* di sini adalah masyarakat pengguna pendidikan. *Differentiation* adalah usaha untuk membuat beda dengan yang lain. Sementara *branding* berarti memberikan merek atau cap sehingga masyarakat mudah mengingat dan mengenal.

Ketiga hal tersebut jelas memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kemampuan menempatkan diri, termasuk kejelian dalam melihat pesaing (*competitor*) dan pengguna (*user*), akan dapat memperkuat diferensiasi. Sebaliknya, kemampuan melakukan diferensiasi akan dapat memperkuat *branding*. Selanjutnya, *branding* yang dilakukan terus-menerus akan dapat memperkuat posisi (*positioning*). Maka kunci untuk menjadikan sekolah layak jual dan diminati masyarakat adalah salah satunya terletak pada kemampuan untuk menentukan *branding* sekolah yang didasarkan pada *resources* yang dimiliki.

MENEGUHKAN VISI PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Bidang pendidikan, sejak Muhammadiyah didirikan, telah dijadikan “ikon”. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ini terus berkembang pesat, secara kuantitas dan kualitas. Hanya saja, fakta menunjukkan secara kualitas pendidikan Muhammadiyah sangat beragam. Terkadang dijumpai ada lembaga pendidikan di daerah tertentu berkembang sangat maju, sementara di tempat lain belum menunjukkan kiprah yang menggembirakan.

Sistem pendidikan nasional juga belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan di mata internasional. Data *Education for All (EFA) Global Monitoring Report 2011* yang dikeluarkan Unesco pada 1 Maret 2011 telah menunjukkan indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Kamboja, dan Laos.

Pendidikan nasional juga dikritik karena belum mampu melahirkan individu yang berkarakter dan berintegritas kuat. Yang ironis, justru terjadi ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) yang melibatkan unsur-unsur di sekolah saat ujian nasional (UN). Kasus contekan massal di SD Negeri 2 Gadel, Surabaya, jadi hanya sekedar contoh.

Bahkan kasus ini dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Artinya, tampak sedikit di permukaan, meski sesungguhnya masih banyak kasus serupa yang belum diketahui publik. Juga muncul kecenderungan pemikiran yang berkeinginan untuk mereduksi pendidikan hanya sekedar pabrik ijazah (*diploma mills*). Ini jelas tampak dalam kebijakan tentang UN dan ujian sekolah. Pendidikan seharusnya diorientasikan untuk menyiapkan individu yang memiliki *soft skill* memadai sehingga mampu menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan.

Pertanyaannya, bagaimana seharusnya pendidikan Muhammadiyah menyikapi fenomena ini? Apa yang dapat dikontribusikan Muhammadiyah sehingga mampu mengangkat martabat pendidikan nasional di mata dunia? Seiring dengan persoalan ini, pendidikan Muhammadiyah harus mampu memberikan respon yang seimbang. Dalam kaitan inilah Muhammadiyah perlu meneguhkan kembali visi pendidikannya agar terus dipercaya masyarakat dan mampu mencerahkan umat.

Pendidikan di era kini, sering juga dikatakan era global, menurut Zamroni, dihadapkan pada tiga kecenderungan. *Pertama*, munculnya kecenderungan komersialisasi dan komoditisasi pendidikan. Pemerintah yang semestinya mengambil peran besar dalam kesuksesan pendidikan banyak digantikan oleh masyarakat. Akibatnya, pendidikan layaknya proses ekonomi dan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme “pasar bebas”, setiap lembaga pendidikan berlomba-lomba melakukan promosi untuk merekrut konsumen.

Bahkan dalam rekrutmen konsumen ini, tidak jarang lembaga pendidikan melakukan manipulasi data untuk mengelabui masyarakat. Contoh kecenderungan komersialisasi pendidikan dapat dilihat melalui cara mengemasnya sehingga laku di pasar (*marketable*). Karenanya tidak menghe-

rankan jika kini bermunculan layanan fasilitas kelas eksekutif (kuliah Sabtu-Minggu), program kelas jauh, dan paket-paket pendidikan terstandar dan serba instan lainnya.

Dampak *kedua*, globalisasi melahirkan spirit internasionalisasi di lembaga pendidikan. Ini berarti pendidikan pun perlu distandarisasi guna meningkatkan daya saing global. Kebijakan pemerintah untuk membuat lembaga pendidikan berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), menunjukkan keinginan meningkatkan daya saing pendidikan Indonesia di mata dunia.

Dengan label RSBI, peserta didik dijanjikan memperoleh pelayanan akademik dan non-akademik yang berkelas dunia. Di lingkungan Muhammadiyah Jawa Timur misalnya, sekolah RSBI ada 9 buah, yakni; SMAM 2 Surabaya, SMAM 1 Gresik, SMAM 2 Sidoarjo, SMAM 1 Ponorogo, SMK 1 Kepanjen, SMK 5 Babat, SMP 5 Surabaya, SMP 12 Gresik, dan SD 4 Surabaya. Di samping RSBI, juga ada mekanisme *International Organization for Standardization (ISO)* sebagai standar untuk menentukan sistem manajemen mutu. Pertanyaannya, sudahkah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berlabel RSBI dan ISO memberikan layanan terbaik layaknya pendidikan berkelas dunia?

Dampak *ketiga*, munculnya kondisi bahwa kemampuan bangsa untuk hidup dalam era global tidak lagi ditentukan oleh modal fisik yang berupa kekayaan alam atau mesin industri. Untuk mencapai kesejahteraan pada era global ini dibutuhkan modal maya (*virtual capital*), meliputi; penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (*intellectual capital*), jaringan kerjasama yang didasarkan pada kepercayaan (*social capital*), dan watak atau moral yang dimiliki bangsa (*moral capital*). Tiga modal berharga ini sangat penting untuk dimiliki suatu bangsa agar dapat menentukan posisinya dalam persaingan di era global.

Di samping persoalan global, pendidikan Muhammadiyah juga dihadapkan pada problem riil kebijakan pemerintah yang terkadang tidak berempati dengan sekolah swasta. Kebijakan pengalokasian dana bantuan, sertifikasi, *inpassing* guru non-PNS, pendidikan gratis, pembukaan sekolah baru, dan penerimaan peserta didik baru yang melampaui kemampuan sekolah negeri, tampak sekali telah menimbulkan dampak kurang menggembirakan.

Untuk sekolah berkategori *excellent school* barangkali memiliki daya tahan kuat, tetapi sekolah Muhammadiyah berkategori kecil pasti akan merasakan dampak kebijakan tersebut. Akibatnya, beberapa sekolah Muhammadiyah kelas menengah ke bawah banyak yang berstatus "harus diselamatkan". Berkaitan dengan kondisi ini dibutuhkan data riil mengenai peta sekolah Muhammadiyah sehingga dapat diketahui berapa banyak yang berkategori besar, menengah, dan kecil.

Secara umum visi pendidikan Muhammadiyah harus diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan. Dalam Anggaran Dasar dikatakan maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bukan hanya pendidikan, seluruh amal usaha juga diorientasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk mewujudkan visi pendidikan agar dapat dijadikan sarana mencapai tujuan dan dakwah Persyarikatan, maka perlu diperhatikan beberapa hal. *Pertama*, pendidikan Muhammadiyah harus dijadikan media untuk mengajarkan faham Islam yang berkemajuan. Faham Islam menurut Muhammadiyah terangkum dalam ajaran kembali pada al-Qur'an dan Sunnah (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*).

Tentu tidak hanya berhenti di sini, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana cara kita kembali pada al-Qur'an

dan Sunnah (*kayfa narja' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*). Ini jelas berkaitan dengan problem epistemologi dan metodologi. Pada konteks inilah perlu juga dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan yang non-mazhab. Dikatakan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, KH. Mas Mansur, bahwa Islam menurut Muhammadiyah tidak pernah terikat paham atau mazhab tertentu.

Lebih jauh Mas Mansur menyatakan bahwa “paham agama” itu sejatinya bukan “agama”. Karena itu, langkah kedua dari 12 Langkah Muhammadiyah dikatakan, paham agama itu harus diperluas. Yang tidak boleh diperluas adalah agama karena merupakan wahyu Allah dan sudah sempurna. Ini jelas peringatan bagi kita dan menjadi tugas lembaga pendidikan untuk memberikan pencerahan pada umat. Lembaga pendidikan harus turut mengajarkan dan memperluas ajaran agama sehingga ajaran Islam bersifat kompatibel dengan segala waktu dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*).

Kedua, pendidikan Muhammadiyah harus mencerahkan sehingga mampu menghasilkan individu yang berkarakter dan berintegritas. Wacana pendidikan karakter ini kini sedang digalakkan seiring dengan problem demoralisasi yang dihadapi bangsa. Bukan hanya di bidang pendidikan, persoalan demoralisasi juga dijumpai di lembaga-lembaga publik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut Prof. Din Syamsuddin, kondisi bangsa saat ini sedang dihinggapi *moral illiteracy* (buta aksara moral). Indikatornya, orang tidak lagi mampu membedakan perilaku baik dan buruk. Bahkan lebih ekstrim, Taufiq Abdullah menyatakan saat ini telah terjadi gejala *spiral stupidity* (lingkaran kebodohan). Kasus suap-menyuap dan korupsi yang terus meningkat mulai dari rakyat kebanyakan hingga elit menunjukkan kebenaran potret yang disinyalir kedua tokoh tersebut.

Ketiga, pendidikan Muhammadiyah harus mendorong terwujudnya nilai-nilai tolong-menolong (al-Ma'un). Perbincangan mengenai al-Maunisme (*the theology of al-Ma'un*) begitu menonjol di kalangan warga Muhammadiyah. Selain ayat 104 surat Ali Imran yang menginspirasi pendirian Muhammadiyah, keluarga besar Persyarikatan juga mengenal dengan baik kajian tafsir KH. Ahmad Dahlan terhadap surat al-Ma'un. Bahkan surat al-Ma'un inilah yang dijadikan dasar bagi Kyai Dahlan untuk menggali sumber dana masyarakat guna membangun basis teologi pengembangan amal sosial Muhammadiyah.

Kisah inspiratif pembelajaran Kyai Dahlan terhadap peserta didik-peserta didiknya mengenai surat al-Ma'un ini dikisahkan oleh Syuja'. Santri Kyai Dahlan ini suatu saat memberanikan diri untuk bertanya pada gurunya; "Kyai, mengapa surat al-Ma'un dan pelajaran tafsirnya diulang-ulang?" Kyai Dahlan pun menjawab; "Apakah kalian sudah mengerti betul?" Syuja' menjawab bahwa ia dan teman-temannya sudah hafal dan mengerti. Namun Kyai Dahlan kembali bertanya; "Apakah sudah diamalkan?" Syuja' pun menjawab bahwa ia dan teman-temannya sudah mengamalkan dengan membaca surat al-Ma'un berulang-ulang saat shalat.

Mendengar jawaban ini, Kyai Dahlan menyatakan bahwa maksud mengamalkan adalah mempraktikkan kandungan surat al-Ma'un. Untuk menunjukkan pengertian ini, Kyai Dahlan pun memerintahkan agar para santrinya mencari anak yatim dan fakir miskin kemudian memberi mereka sabun, pakaian, makanan, dan minuman. Pemahaman inilah yang kemudian melahirkan teologi amal shaleh, yang populer disebut al-Ma'unisme.

Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai al-Ma'un ini perlu digalakkan sehingga sekolah Muhammadiyah yang besar

dapat membantu sekolah yang kecil. Praktik subsidi silang yang dilakukan peserta didik dari keluarga kaya terhadap sisiwa miskin juga merupakan cerminan dari ajaran al-Ma'unisme. Pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai ditutupnya SMAM 6 (Bubutan) dan SMAM 8 (Tandes) sungguh menjadi pelajaran berharga bagi Muhammadiyah.

Selama ini kita menjadikan pendidikan sebagai "ikon" Muhammadiyah, tapi ternyata ada sekolah kita yang harus diselamatkan karena terancam ditutup pemerintah. Salah satu penyebabnya, sekolah ini tidak mampu mendapat jumlah minimal peserta didik baru sebagaimana syarat pemerintah. Bandingkan dengan sekolah Muhammadiyah lain yang berjubel dan membuang begitu banyak pendaftar. Menghadapi situasi ini, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan kecuali menghidupkan kembali nilai-nilai al-Ma'un. Sinergi sekolah besar-kecil mutlak diperlukan agar sekolah Muhammadiyah mampu *survival* di tengah persaingan yang ketat.

Keempat, pendidikan Muhammadiyah harus mampu menjadi pelopor pendidikan berbasis multikulturalisme sejalan dengan pluralitas masyarakat. Pendidikan harus disadari sebagai bagian dari ruang publik, dan siapa pun dapat bergabung dengan sekolah Muhammadiyah. Karya Abdul Mu'thi dan Fajar Riza Ul Haq membuka mata kita betapa pendidikan berbasis multikulturalisme mutlak diperlukan. Apalagi realitas menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik atau guru di sekolah Muhammadiyah berlatar belakang sosial warga persyarikatan.

Bahkan pengalaman di daerah yang minoritas Muslim, menunjukkan banyak sekolah Muhammadiyah yang dijadikan tempat belajar keluarga non-Muslim. Salah satu contoh adalah di Nusa Tenggara Timur (NTT), tepatnya Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK). Ternyata

mayoritas mahasiswanya adalah penganut Kristen, sehingga banyak alumni UMK yang berkiprah sebagai pastor, romo, biarawati, dan fungsional gereja. Realitas ini menyebabkan UMK seringkali diplesetkan menjadi "Universitas Muhammadiyah Kristen".

Kelima, pendidikan Muhammadiyah harus mampu memadukan nilai-nilai keikhlasan dan profesionalitas. Orang seringkali mempertentangkan prinsip bekerja profesional di Muhammadiyah dengan nilai-nilai keikhlasan. Bekerja dengan ikhlas dianggap serba gratisan dan tidak profesional. Sebaliknya, bekerja profesional dimaknai kurang ikhlas karena menuntut gaji mahal. Agar dua sifat ini tidak dipertentangkan, perlu dijelaskan secara utuh. Menurut Watik Pratiknya, keikhlasan itu berada dalam kawasan niat (*state of mind*). Sedangkan profesionalitas berada dalam manajemen perjuangan (*state of action*). Sehingga prinsip keikhlasan dan profesionalitas adalah persyaratan yang saling melengkapi untuk suksesnya suatu perjuangan.

Selanjutnya, Watik menyebut empat ciri bekerja profesional; (1) memanfaatkan ilmu dan teknologi, (2) dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya, (3) memperhatikan dan mengupayakan optimalisasi hasil kerja, (4) pertimbangan rasionalitas yang tinggi dengan memanfaatkan manajemen. Ciri pertama berkaitan dengan pemanfaatan Iptek untuk memperlancar tugas dan pelaksanaan program. Misalnya, pemanfaatan informasi dan teknologi (IT) untuk tugas-tugas administrasi, metode hisab dalam penentuan awal dan akhir Ramadan, pemanfaatan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam berdakwah, serta penggunaan psikotest untuk mengenali gejala kejiwaan calon pimpinan dan karyawan AUM.

Ciri kedua berkaitan dengan pertimbangan penempatan atau rekrutmen pimpinan dan karyawan amal usaha ber-

dasarkan kompetensi. Karena itu, ungkapan; *the right man on the right place*, terasa sangat relevan. Yang tidak boleh dilakukan adalah prinsip; *man with the wrong place* atau *man with the many places*. Ini berarti harus diupayakan agar fungsionaris organisasi dan pimpinan amal usaha benar-benar bertugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Ciri ketiga berkenaan dengan pentingnya perencanaan yang mapan agar setiap program dapat menghasilkan kerja yang optimal. Dalam kaitan inilah pola pikir *need for achievement* (dikenal dengan rumus; $N+Ach$) perlu dibudayakan pimpinan amal usaha, termasuk pendidikan. Ciri ketiga ini berkait erat dengan ciri terakhir karena menekankan perlunya penggunaan manajemen dalam mengelola sumber daya.

Watik Pratiknya mengingatkan agar dalam melaksanakan program kita tidak bersemboyan "sebisanya" atau "asal jadi" dikarenakan ini mengindikasikan belum profesional. Kita harus menyatukan niat dan ikhtiar sehingga tidak boleh menyatakan; "Yang penting *kan* niatnya, bagaimana hasilnya terserah Tuhan". Islam mengajarkan bahwa harus ada kesinambungan antara niat dan ikhtiar. Nabi memang mengatakan; *Innama al-a'mal bi al-niyyati*, tetapi bukankan al-Qur'an juga menyerukan; *innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim*. Ini berarti keselarasan niat dan ikhtiar merupakan indikasi profesionalitas. Profesionalisme pengelolaan pendidikan juga dicirikan dalam rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan yang menekankan pada *achievement* (prestasi), bukan *ascription* (berdasarkan status).

Keenam, pendidikan Muhammadiyah harus dijadikan sarana untuk melakukan kaderisasi. Dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dikatakan bahwa karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga (anggota) Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Karena itu harus di-

pastikan bahwa seluruh tenaga pendidik dan kependidikan telah berstatus anggota Muhammadiyah.

Ini penting agar tidak muncul opini bahwa karyawan amal usaha Muhammadiyah sekedar bekerja dan mencari nafkah, tidak mau peduli dengan kegiatan persyarikatan di cabang dan ranting di mana ia bertempat tinggal. Berkaitan dengan ini, tugas pimpinan sekolah bersama persyarikatan adalah melakukan pembinaan agar warga sekolah memahami dan terlibat aktif dalam kegiatan Muhammadiyah

Posisi Muhammadiyah untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional dan indeks pembangunan manusia jelas sangat besar. Ini karena amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan mulai pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi tersebar di seluruh penjuru negeri. Yang harus disadari, pendidikan merupakan investasi jangka panjang sehingga hasilnya seringkali tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat.

Seorang senator dan penggagas yayasan beasiswa pertukaran mahasiswa Amerika Serikat dengan negara asing, William Fulbright, pernah menyatakan; *the education is slow moving, but powerful force*. Pernyataan ini menunjukkan, bahwa meski investasi pendidikan itu bergerak lambat namun memiliki kekuatan yang luar biasa di masa mendatang. Relevan dengan itu, maka Muhammadiyah harus terus berkiprah guna menjadikan pendidikan sebagai media untuk menyiapkan generasi masa depan bangsa yang berintegritas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.

MENUMBUHKAN MULTIKULTURALISME PESERTA DIDIK

Menurut Furnivall, pluralitas (kemajemukan) masyarakat dapat dicirikan sebagai orang yang hidup berdampingan secara fisik. Tetapi, karena perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, etnis, politik, dan agama, mereka hidup terpisah dan tidak tergabung dalam suatu komunitas. Dalam skala lebih kecil, guru dapat mengamati kecenderungan peserta didik ketika berinteraksi dan mengambil posisi tempat duduk, yang biasanya hanya dengan teman yang memiliki kesamaan latar belakang.

Dalam kasus lebih luas, realitas kemajemukan juga dapat diamati melalui kemunculan sekolah dengan karakteristik tertentu yang menunjukkan adanya eksklusivitas. Misalnya ada lembaga pendidikan yang didesain untuk melayani suatu etnis dan faham keagamaan tertentu. Kondisi ini jelas rentan menimbulkan persoalan sosial karena lembaga pendidikan merupakan ruang publik yang seharusnya dijadikan media berinteraksi antarkelompok di masyarakat.

Secara ringkas multikulturalisme dapat didefinisikan sebagai pengakuan terhadap adanya pluralitas budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok minoritas terintegrasi dalam masyarakat,

dan kelompok mayoritas mau mengakomodasi kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka tetap diakui. Ini berarti arah multikulturalisme adalah untuk menciptakan, menjamin, dan mendorong ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan beragam komunitas dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhasannya.

Untuk membangun kesadaran peserta didik terhadap multikulturalisme dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan intrakurikuler yang tersistem dalam model pembelajaran berbagai mata pelajaran jika dilakukan secara demokratis dapat dijadikan sarana menumbuhkan kesadaran multikulturalisme. Ini berarti para guru harus menghadirkan model pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk olahraga, musik, seni, pramuka, dan teater, juga dapat menjadi media menumbuhkan multikulturalisme. Bahkan melalui beragam kegiatan inilah peserta didik dapat bercanda, tertawa, bertegur sapa, dan bermain lepas tanpa mempedulikan latar belakang sosialnya.

Kesadaran terhadap multikulturalisme jika ditanamkan pada peserta didik akan dapat menyebabkan mereka saling memahami kekhasan yang dimiliki dan meneguhkan identitas dirinya. Dalam hal ini kekhasan tidak sama dengan keunggulan. Cara berpikir ini penting dikedepankan dalam memahami keragaman latar belakang sosial, etnis, dan agama. Teori Lavinias menyatakan bahwa penampakan wajah bukan bagian dari aku, bukan pula diukur dari tolok ukurku. Yang lain itu sama sekali berbeda dari aku. Namun, hubungan aku dengan yang lain tidak melahirkan kekerasan. Jadi, kehadiran yang lain justru membuahkan kedamaian dan menumbuhkan struktur positif dalam kehidupan.

Melalui teori penampakan wajah akan tergambar yang lain. Penampakan wajah yang lain akan memungkinkan

orang saling menyapa serta mengundang simpati, empati, dan kekaguman. Penampakan wajah tidak pernah membiarkan orang lepas dari tanggung jawab. Orang dihadapkan pada penampakan wajah yang mengusik sehingga harus bersikap. Wajah yang menampak dalam gambar mencair dalam afeksi sehingga dinamismenya tidak hanya berhenti pada persepsi, melainkan mengkristal dalam kesadaran seseorang.

Teori Lavinas juga mengajarkan bahwa perjumpaan dengan wajah yang lain merupakan bentuk hubungan yang ditandai kepedulian dan *nir*-kepentingan. Hubungan ini menyebabkan seseorang bertanggung jawab terhadap yang lain tanpa menuntut yang lain melakukan hal yang sama. Penampakan wajah orang lain dapat terjadi jika ada komitmen untuk saling bertemu. Ini berarti untuk menumbuhkan nilai-nilai multikulturalisme tidak boleh hanya berhenti pada pengakuan terhadap pluralitas masyarakat. Multikulturalisme menuntut komitmen setiap orang untuk menghargai dan menghormati keragaman.

Nah, berbagai kegiatan di sekolah yang melibatkan peserta didik dapat digunakan sebagai media untuk menumbuhkan nilai-nilai multikulturalisme. Melalui berbagai kegiatan intra dan ekstra peserta didik dapat didorong untuk berbaur tanpa mempedulikan latar belakang sosial, ekonomi, etnis, dan agama. Melalui perjumpaan-perjumpaan informal dalam bentuk permainan dan kesenian mereka justru dapat melupakan status sosial yang seringkali menjadi jarak yang memisahkan.

Sekarang, tugas guru adalah menciptakan sebanyak mungkin sarana yang dapat menjadi perjumpaan informal peserta didik agar dapat saling menghargai dan menghormati keragaman.

TUNTUTAN BUDAYA MUTU

Prestasi membanggakan diraih tiga kampus Indonesia di level dunia. ITB, UI, dan UGM berhasil masuk 100 besar universitas ternama di Asia. Bahkan, ITB berhasil masuk peringkat ke-82 dari 200 universitas ternama di dunia. Data ini dapat diakses melalui *The 4 International Colleges and Universities* (www.4icu.org) atau *World Universities Web Ranking*.

Sebelumnya, pada September 2011, UI dinobatkan sebagai satu-satunya universitas di Indonesia yang berhasil masuk *Top 300 Universities in the World*. Berdasar penilaian *Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking*, UI menduduki peringkat ke-217. Indikator yang digunakan dalam pembuatan *ranking* ini meliputi *academic reputation* (40 persen), *employer reputation* (10 persen), *student/faculty ratio* (20 persen), *citations per faculty* (20 persen), *international faculty* (5 persen), dan *international students* (5 persen).

Pemeringkatan universitas secara berkala ini penting untuk menjamin terwujudnya budaya mutu. Cara ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pimpinan perguruan tinggi (PT) untuk berkompetisi menjadi yang terbaik dalam penjaminan mutu (*quality assurance*). Pada Juni 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) pernah memub-

likasikan hasil evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi PT seluruh Indonesia. Pada saat itu, ada 387 PT yang diberi instrumen dan dinilai.

Hasilnya, Dikti menetapkan 68 kampus yang layak disebut berpredikat *good practices* dalam melaksanakan penjaminan mutu. Dasar penilaian yang digunakan meliputi kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi (mahasiswa, lulusan, dan dosen), suasana akademik, sarana prasarana, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian masyarakat, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerja sama dalam dan luar negeri. Penjaminan mutu berarti proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pada sisi lain, keabaian PT dalam menjamin mutunya bisa dilihat dari maraknya keluhan lulusan ketika sudah lulus. Seperti akhir 2010 silam, dalam Kolom Pembaca Menu-lis sebuah Koran Jawa Pos (20/12/10), memuat keluhan seorang lulusan Program Studi D-3 Pariwisata dari sebuah perguruan tinggi (PT) negeri ternama di Surabaya. Inti keluhannya terkait dengan kegagalannya mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena ternyata program studi (prodi) yang meluluskannya belum berstatus terakreditasi.

Jika diteliti, rasanya kasus ini banyak dialami lulusan dari PT negeri dan swasta. Sebab, bukan hanya untuk mengikuti tes CPNS, tetapi banyak juga instansi swasta yang mensyaratkan pelamar mencantumkan status akreditasi prodi pada saat melamar kerja. Jika tidak berstatus terakreditasi, maka jangan harap dapat mengikuti tes. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap begitu banyak pemegang ijazah dari prodi di PT yang belum terakreditasi? Dapatkah PT sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah dianggap melakukan kebohongan publik sehingga dapat dituntut secara hukum?

Beberapa pertanyaan tersebut layak mendapat perhatian, terutama bagi mahasiswa dan PT. Mahasiswa termasuk pihak yang sangat berkepentingan dengan status akreditasi prodi dan PT tempatnya belajar. Sebab, untuk mendapat pekerjaan yang mempersyaratkan ijazah dengan kualifikasi akreditasi tertentu (misalnya Terakreditasi A, B, atau C) mahasiswa menjadi pihak yang paling dirugikan. Apalagi jika ternyata prodi dan PT yang mengeluarkan ijazah belum berstatus terakreditasi. Karena itu, mahasiswa harus rajin menanyakan status akreditasi prodinya. Calon mahasiswa juga harus memastikan bahwa prodi pilihannya telah berstatus terakreditasi. Kecermatan dalam menentukan pilihan prodi ini penting agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.

Keterlambatan atau keabaian beberapa prodi di PT untuk mendapat status terakreditasi salah satunya karena belum terbiasa menerapkan konsep penjaminan mutu. Penjaminan mutu di PT berarti proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Dengan demikian, maka tujuan dari penjaminan mutu adalah mewujudkan visi dan misi PT, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Menurut hasil penelitian Tim Dosen Universitas Gadjah Mada (2007) dikatakan bahwa yang dimaksud kebutuhan *stakeholders* meliputi kebutuhan sosial, dunia kerja, dan profesional. Ini berarti pihak yang sangat berkepentingan dengan layanan mutu prodi bukan hanya mahasiswa, melainkan juga dunia kerja dan kelompok profesional.

Secara konstitusional, penjaminan mutu PT merupakan kewajiban. Diktum UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan urgensi kebijakan yang mengatur standar untuk menjamin mutu pendidikan (pasal 50 ayat 2). PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga mengatur aspek detail dalam proses

penjaminan mutu. Demikian juga rumusan *Higher Educational Long Term Strategy* (HELTS) yang diluncurkan Kemendikbud telah menegaskan urgensi *quality assurance* sebagai wujud tanggung jawab PT pada publik.

Tidak bisa tidak, setiap PT diharuskan untuk melakukan kegiatan audit, baik internal maupun eksternal, oleh lembaga-lembaga independen seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Yang perlu ditekankan bahwa sistem penjaminan mutu ini harus dilakukan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) agar ada jaminan bahwa lulusan pendidikan tinggi adalah pribadi yang cerdas dan kompetitif. Dalam jangka panjang, penerapan penjaminan mutu PT diharapkan dapat meningkatkan indeks perkembangan manusia (*human development index*) sehingga memiliki daya saing di level internasional.

Karena telah menjadi amanah konstitusi dan tuntutan global, setiap pendidikan tinggi harus melakukan penjaminan mutu. Sebab, di masa mendatang, eksistensi PT negeri dan swasta tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Nasib PT akan sangat ditentukan oleh penilaian mutu oleh *stakeholders*.

Hermawan Kartajaya, guru marketing dunia, pernah menyatakan bahwa *stakeholders* memiliki *positioning* yang sangat tinggi. PT yang tidak cerdas merespons kemauan pelanggan (*customer*) pasti akan ditinggalkan. Jika situasi sudah demikian, dapat dibayangkan nasib PT tersebut. Karena itu, salah satu tugas PT adalah menjaga kepercayaan pelanggan dengan cara meningkatkan layanan agar *stakeholders* terpuaskan.

Substansi pengertian mutu sesungguhnya berkaitan dengan terpenuhinya standar dan janji yang telah diutarakan PT pada *stakeholders* dalam penyelenggaraan tridharma. Persoalan pemenuhan standar dan janji sebagai salah satu indikator PT

bermutu ini penting dikemukakan. Sebab, banyak PT yang telah menentukan standar dan janji pada pelanggan, tetapi dalam perjalanannya tidak pernah diukur pemenuhannya.

Kondisi yang barangkali masih menguntungkan bagi PT yang belum mewujudkan budaya mutu adalah kondisi masyarakat yang tidak banyak menuntut dan tidak tahu mutu layanan PT. Akibatnya, PT merasa nyaman dengan apa yang dilakukan. Tetapi, harus disadari, perkembangan masyarakat telah menunjukkan sikap yang semakin kritis. Ini berarti PT harus berusaha meningkatkan mutu layanan pada pengguna agar tetap dipercaya oleh stakeholders.

Fenomena masyarakat yang tidak mau tahu dengan mutu layanan pendidikan sesungguhnya tidak hanya dijumpai di level pendidikan tinggi. Pendidikan tingkat dasar dan menengah juga menjumpai kondisi yang sama. Masyarakat umumnya tidak memiliki kesadaran terhadap arti pentingnya penjaminan mutu pendidikan. Yang terpenting adalah anaknya dapat mengenyam pendidikan. Sementara persoalan mutu pendidikan dianggap bukan urusan mereka, melainkan tugas lembaga pendidikan. Padahal, masyarakat sebagai pengguna sejatinya memiliki hak untuk memperoleh layanan yang terbaik.

Menguatnya kesadaran mutu dari masyarakat akan mendorong sistem pendidikan nasional menuju banyak prestasi di level nasional dan internasional. Untuk itu, pimpinan lembaga pendidikan tidak bisa tidak harus melaksanakan penjaminan mutu sebagai wujud akuntabilitas pada masyarakat. Penjaminan mutu harus menjadi budaya seluruh komponen dalam satuan pendidikan.

MEMBANGUN KAMPUS BERBASIS RISET

Pada 2-9 Agustus 2010, saya berkesempatan mengikuti program *Developing Research Capacity* di University of Melbourne, Australia. Acara ini diikuti 17 orang terdiri atas pejabat dan dosen IAIN Sunan Ampel. Ketika melepas rombongan, Pak Rektor, Prof. Nur Syam, berpesan agar pejabat dan dosen yang mengikuti program ini membangun mimpi untuk mengembangkan institusi. Pesan ini sangat relevan karena setiap perubahan selalu diawali dari mimpi. Bermimpi itu berarti membayangkan bahwa suatu saat lembaga tempat kita bekerja menjadi lebih baik. Inilah kekuatan mimpi bagi seorang pemimpin lembaga.

Perjalanan menuju Melbourne sengaja memilih waktu malam hari. Rute perjalanan diatur dari Bandara Juanda menuju Denpasar. Setelah transit selama dua jam di Denpasar, perjalanan dilanjutkan menuju Bandara Tulla Marine, Melbourne, dan mendarat pukul sembilan pagi setempat. Ada selisih waktu tiga jam lebih cepat jika dibanding Surabaya. Meski sudah agak siang, namun udara terasa sangat segar. Suhu udara mencapai empat derajat celcius.

Periode Juli dan Agustus kota Melbourne dipastikan terasa sangat dingin. Karena itu, tidak mengherankan jika begitu mendarat di Tulla Marine, perubahan suhu sangat

terasa. Bersama rombongan, saya pun langsung menuju Rydges on Swanston Hotel. Di tempat inilah rombongan bermalam selama mengikuti program. Kebetulan jarak hotel dengan tempat pelatihan, Center for the Study of Higher Education (CSHE) kompleks University of Melbourne, hanya berjarak sekitar 100 meter.

Untuk mengisi waktu longgar, saya memanfaatkan kesempatan untuk melihat situasi kota Melbourne. Bersama rombongan, saya berkunjung ke beberapa tempat seperti pusat pemerintahan, kantor parlemen, pasar tradisional, dan ACER (Australia Council Education Research) di 19 Prospect Hill Road Cambrwell. Perjalanan menuju ACER ditempuh melalui kereta listrik bawah tanah. ACER adalah salah satu mitra yang dimiliki University of Melbourne untuk mengembangkan penelitian.

Linkage Fungsi Tridharma

Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini. Salah satunya adalah keharusan setiap civitas kampus untuk membuat *linkage* tiga kegiatan perguruan tinggi berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tiga kegiatan ini dikenal dengan nama tridharma perguruan tinggi. Tetapi, dalam praktiknya fungsi tridharma perguruan tinggi masih dijalankan secara terpisah, tidak saling berhubungan. Karena itu diperlukan usaha merevitalisasi fungsi tridharma dengan menjadikan penelitian sebagai dasar meningkatkan mutu pengajaran dan pengabdian masyarakat.

Sayangnya, civitas perguruan tinggi belum sepenuhnya menjadikan kegiatan penelitian sebagai *base* untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pengabdian. Maka, jangan heran jika masih ada dosen yang menunaikan tugas pengajaran dengan metode konvensional. Di antara

indikator yang dapat diamati adalah tiadanya pemutakhiran referensi. Masih banyak dosen yang menjadikan buku terbitan lama sebagai referensi. Metode pengajaran yang dikembangkan pun masih dominan ceramah, bersifat *teacher center* dan *information delivery*.

Seorang dosen senantiasa dituntut meng-*upgrade* pengetahuannya karena perkembangan pendidikan sangat pesat. Perkembangan tersebut mengharuskan dosen melakukan pembelajaran yang bersifat *student center*, *information exchange*, dan menggunakan referensi mutakhir. Dengan menempatkan mahasiswa sebagai mitra belajar, bukan obyek transformasi pengetahuan, diharapkan ada peningkatan gairah keilmuan. Mereka diharapkan senantiasa merasa ingin tahu (*curiosity*). Menumbuhkan keberanian mahasiswa untuk bertanya dan berpendapat juga dapat dilakukan melalui metode *information exchange*. Model pembelajaran inspiratif ini sangat dibutuhkan. Pemutakhiran sumber belajar juga perlu dilakukan karena ilmu pengetahuan sejatinya bersifat sementara (*tentative*).

Diskusi saya dengan Prof. Richard James, Prof. Noel L. Stonehouse, Prof. Michel McBain, dan Dr. Chi Baik, memberikan pelajaran berharga mengenai urgensi mengembangkan pembelajaran berbasis penelitian. Untuk memulai tugas ini, pendidik harus mendesain kegiatan pembelajaran dengan lebih mengutamakan model induktif. Model pembelajaran berbasis induktif ini mengharuskan mahasiswa mengamati problem sosial yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian dirumuskan solusinya.

Model pembelajaran ini ternyata sudah dipraktikkan sejak pendidikan tingkat dasar dan menengah. Rasanya, metode ini dapat dijadikan alternatif untuk menggantikan pembelajaran yang bercorak deduktif. Mahasiswa sudah saatnya

dilatih untuk memiliki *sense* mengobservasi fenomena. Melalui cara ini kita berarti telah memberikan *soft skill* pada mahasiswa untuk menjadi calon peneliti pada masa mendatang.

Penekanan model berpikir induktif rasanya perlu ditumbuhkan dalam proses belajar dan mengajar. Sebab, jika kita menengok sejarah Islam abad VII-XIII M, maka kita akan menemukan bahwa salah satu faktor yang menjadikan Islam mengalami masa keemasan adalah berkembangnya tradisi berpikir induktif di kalangan ilmuwan Muslim. Tokoh seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, al-Razi, al-Ghazali, Ibn Rusyd, dan Ibn Khaldun, merupakan ilmuwan Muslim yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menggabungkan model berpikir deduktif dan induktif. Mereka tidak hanya dikenal ahli agama dan filosof, melainkan juga saintis handal. Karenanya tidak heran jika periode tersebut dinamakan Philip K. Hitti dalam *History of The Arabs* (1974) sebagai Abad Mu'jizat Arab, masa ditemukannya banyak disiplin ilmu oleh ilmuwan Muslim.

Marilah kita bandingkan dengan tradisi berpikir sebagian besar generasi Muslim masa sesudahnya. Mereka jelas sekali lebih mengandalkan model berpikir deduktif. Sebagai contoh, generasi Muslim masa kini kalau menjumpai ada temuan baru yang dilahirkan ilmuwan Barat selalu mengatakan bahwa semua itu sudah ada dalam al-Qur'an. Bahwa tidak ada sesuatu yang terlewatkan untuk diajarkan dalam al-Qur'an itu merupakan pernyataan Ilahi yang jelas benar.

Tetapi, persoalannya adalah bagaimana kita mampu menjadi pelaku sejarah yang menunjukkan pada dunia bahwa ajaran Islam memang benar. Islam juga dikatakan memiliki ajaran yang kompatibel dengan setiap waktu dan tempat (*shalih likulli zaman wa makan*). Dalam hal ini tantangan kita adalah menghadirkan bukti yang bersifat empirik bahwa Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah dan berbagai jenis peradaban umat

manusia. Pada konteks inilah diperlukan kultur berpikir yang menyeimbangkan model deduktif dan induktif.

Bukan hanya pada aspek pembelajaran yang seharusnya didasarkan pada penelitian. Peningkatan mutu layanan pengabdian masyarakat juga membutuhkan penelitian agar tidak berjalan di tempat. Praktik Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang menjadi program andalan pengabdian masyarakat ternyata belum didesain dengan berdasar *need assessment* yang jelas. Bahkan jika perlu program KKN harus melibatkan berbagai sumberdaya lintas fakultas sehingga memungkinkan terjadinya pendekatan yang bersifat interkoneksi (*interconnected study*) terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada konteks inilah perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai kebutuhan masyarakat sehingga lembaga dapat mendesain program unggulan dan memilih wilayah yang tepat.

Di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta, pengabdian masyarakat umumnya dipahami dalam bentuk kegiatan dakwah Islamiyah. Ini dapat diamati dari kinerja dosen. Umumnya mereka mengisi kegiatan khutbah sebagai manifestasi program pengabdian masyarakat. Tradisi ini jelas tidak salah karena khutbah Jum'ah, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, serta mengisi pengajian, adalah bagian dari pengabdian masyarakat.

Yang menjadi persoalan adalah seakan tidak ada lagi kegiatan di luar khutbah yang dapat dijadikan andalan. Padahal kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat, pemberantasan buta huruf, pendidikan anak jalanan, pendampingan APBD pro rakyat, dan pendidikan politik masyarakat, dapat menjadi pilihan program pengabdian masyarakat. Agar pilihan program pengabdian masyarakat bermutu dan tepat sasaran, maka harus didasari kegiatan penelitian yang dilakukan se-

cara periodik. Karena itulah membuat *linkage* fungsi tridharma perguruan tinggi mutlak diperlukan.

Revitalisasi Penelitian

Inspirasi dari University of Melbourne yang juga perlu di-*share* adalah substansi penelitian. Menurut Prof Richard James, Director CSHE, substansi penelitian adalah publikasi dan kegunaan. Ini berarti penelitian harus selalu diorientasikan pada publikasi nasional dan internasional. Melalui publikasi ini diharapkan terjadi komunikasi timbal balik antar ilmuwan. Bermula dari sinilah keinginan membangun *academic atmosphere* pada saatnya akan tercapai. Jujur harus diakui, bahwa masih banyak peneliti yang kurang memiliki keberanian untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.

Hasil penelitian juga harus mampu memberikan kontribusi yang jelas bagi pengembangan keilmuan dan manfaat pragmatis bagi kehidupan umat. Prof. Michel McBain, Manager Research Melbourne Graduate School of Education, menekankan pentingnya penelitian yang berkategori terapan (*applied research*). Agar hasil penelitian terapan bermutu, University of Melbourne menyiapkan anggaran berlimpah. Bahkan institusi menyiapkan anggaran lebih banyak untuk merekrut sumber daya terbaik yang diambil dari berbagai negara.

Strategi itu dilakukan untuk meningkatkan *branding* institusi sehingga pada saatnya mampu menjadi daya tarik mahasiswa. Maka, tidak mengherankan jika di University of Melbourne memiliki ilmuwan sekaliber Prof. Merle C. Ricklefs, Prof. Abdullah Saeed, dan Prof. Timothy Linsey. *Nah*, bagaimana dengan nasib penelitian di perguruan tinggi Indonesia?

BAGIAN KEDUA
GURU YANG INSPIRATIF

TUNTUTAN JADI GURU INSPIRATIF

Terma guru inspiratif pernah dipopulerkan Rhenald Kasali, Gurubesar Fakultas Ekonomi UI. Guru inspiratif diilustrasikan sebagai pendidik yang selalu mengajak peserta didiknya untuk berpikir kreatif dan inovatif dengan cara memaksimalkan potensi yang telah dianugerahkan Tuhan (*maximum thinking*). Antitesa guru inspiratif adalah guru kurikulum. Karakteristik guru kurikulum digambarkan sebagai guru yang mengajarkan sesuatu yang standar dan biasa-biasa saja pada peserta didiknya (*habitual thinking*).

Dalam sudut pandang pendidikan, guru kurikulum dan guru inspiratif jelas sama-sama dibutuhkan bagi kesuksesan anak di masa mendatang. Guru kurikulum pada saatnya akan melahirkan manajer-manajer handal. Sedangkan guru inspiratif melahirkan para pemimpin dan pembaru yang berani mendobrak aneka kebiasaan lama. Yang menjadi keprihatinan kita adalah ternyata jumlah guru inspiratif jauh lebih sedikit dibanding guru kurikulum. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbandingan guru inspiratif dan guru kurikulum adalah 1 persen berbanding 99 persen.

Dominasi guru kurikulum di sekolah dapat diamati melalui metode pembelajaran yang dikembangkan. Guru

kurikulum biasanya terpaku dengan silabus, rencana praktik pembelajaran (RPP), dan buku teks. Hampir tidak ada ikhtiar dari guru-guru kurikulum untuk melihat keluar dan membayangkan jika pembelajaran tidak lagi menggunakan buku teks. Dalam alam pemikiran guru kurikulum, kewajiban mereka adalah mematuhi kurikulum. Karena itu, mereka akan sangat berdosa jika tidak dapat menuntaskan materi yang ada dalam kurikulum. Standar keberhasilan pembelajaran guru kurikulum selalu diukur dari ketuntasan mereka menyampaikan materi pelajaran. Hasil akhirnya adalah peserta didik sukses mengikuti ujian.

Sementara guru inspiratif bersikap tidak terlalu kaku dalam memahami kurikulum. Bagi mereka, kurikulum bukan termasuk kitab suci yang harus selalu diikuti. Kurikulum harus dipahami sebagai sarana mencapai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Karena itu model pembelajaran yang dikembangkan pun menjadi beraneka. Perspektif guru inspiratif terhadap buku teks juga bukan segala-galanya. Buku teks hanya salah satu sumber belajar. Masih banyak media yang dapat dijadikan sumber belajar. Dengan keyakinan yang kuat, maka menjadi pantangan bagi guru inspiratif untuk menangisi keadaan jika di sekolahnya tidak tersedia buku teks dan perangkat informasi teknologi (IT). Sebab, alam sekitar dan barang-barang bekas pun dapat dijadikan laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran.

Jika kita mencermati ketimpangan mutu pendidikan yang ada di perkotaan, pedesaan, dan pedalaman, maka kehadiran guru inspiratif jelas sangat dibutuhkan. Melalui guru inspiratif ini kita berharap ada percepatan pemerataan mutu pendidikan. Anak-anak cerdas yang ada di pedesaan dan pedalaman akan mampu menunjukkan talentanya apabila dibimbing guru inspiratif. Ini berarti posisi guru inspiratif se-

bagai ujung tombak pembelajaran mutlak diperlukan.

Dalam konteks inilah kita diingatkan pernyataan Jean Jever, seorang pakar pendidikan dari Perancis. Dia menyatakan bahwa untuk menjadi seorang guru, maka tidak cukup jika hanya bermodal kemauan dan kepintaran. Lebih dari itu, seorang guru harus menampilkan diri secara utuh layaknya pendidik. Ia harus menampilkan diri sebagai sumber ilmu, sahabat, orang tua, teladan, dan inspirasi bagi peserta didiknya. Ini berarti seorang guru tidak hanya dituntut untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Yang juga penting adalah guru harus menjadi teladan sehingga peserta didik memiliki rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru.

Seorang guru akan menginspirasi peserta didik jika mampu keluar dari pakem pembelajaran yang dibebankan kurikulum. Ini berarti untuk menjadi guru inspiratif harus dimulai dengan melakukan perubahan metodologi pembelajaran. Menurut teori pendidikan, pembelajaran yang baik adalah yang menarik hati peserta didik (*pull*). Karena itu sangat tepat jika dikatakan bahwa proses pendidikan adalah memberikan sebagian hati pada peserta didik. Sebaliknya, pendidikan akan dianggap kurang berhasil jika melahirkan tekanan (*push*) pada peserta didik. Akibatnya, peserta didik tidak memiliki keberanian dan rasa percaya diri untuk mengembangkan daya imajinasinya. Padahal salah satu tugas guru adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan.

Pendidikan yang terlalu mengekang dan memberikan tekanan pasti akan melahirkan perasaan rendah diri anak. Padahal menurut hasil penelitian dikatakan bahwa perasaan rendah diri yang dialami orang dewasa sangat berkaitan dengan pola pembelajaran yang dialami orang itu tatkala belajar pada masa anak-anak. Bahkan pengaruhnya bisa mencapai 90 persen. Hal ini menunjukkan betapa pola pembelajaran

yang dikembangkan guru turut berpengaruh untuk membentuk karakter anak. Karena itulah keberadaan guru inspiratif sangat dibutuhkan di tengah miskinnya prestasi dunia pendidikan nasional di level internasional.

Rasanya kita bersepakat jika dikatakan bahwa ujung tombak pendidikan itu adalah guru. Ini sejalan dengan pernyataan Edward Sallis dalam *Total Quality Management in Education* (2006); *recovery begins with teachers*. Jika kita ingin melihat terwujudnya pendidikan yang bermutu, maka kuncinya adalah guru. Tetapi harus diingat, bahwa pendidikan bermutu merupakan perburuan yang tak bertepi.

Dalam istilah manajemen, ikhtiar menuju pendidikan bermutu harus dilakukan terus-menerus (*continuous improvement*). Sallis juga mengingatkan agar keinginan memperbaiki mutu pendidikan itu menjadi “gerakan” semua elemen. Pada konteks inilah seluruh *stakeholder* pendidikan, termasuk pemerintah dan kekuatan *civil society*, harus memfasilitasi agar jumlah guru inspiratif semakin banyak.

GURU SENANG MENULIS

Menulis bagi sebagian orang barangkali bukan pekerjaan mudah. Apalagi jika tulisan itu adalah karya ilmiah dengan standar dan kualifikasi tertentu. Bagi orang yang berkiprah di dunia pendidikan, seperti guru, kegiatan menulis harus dipandang sebagai bagian dari tugas. Tetapi, faktanya banyak guru yang tidak memiliki kemampuan untuk menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Berbeda jika misalnya diminta menyampaikan ide secara lisan, bisa berbicara sangat lancar dan dalam waktu berjam-jam. Fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya dialami para guru. Di perguruan tinggi juga sering dijumpai dosen yang sangat memukau jika berbicara, sementara ketika diminta menulis kurang mampu.

Minimnya kemampuan guru untuk menulis menjadikan mereka miskin publikasi ilmiah. Akibat miskin karya ilmiah itulah para guru mengalami hambatan dalam menempuh karir dan kenaikan pangkat. Bahkan mereka harus rela pangkatnya terhenti di golongan IV/a. Data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 2005 menunjukkan bahwa dari 1.461.124 guru, jika ditinjau dari golongan/ruang kepangkatan guru, hanya 22,87 persen (IV/a), 0,16 persen (IV/b), 0,006 persen (IV/c), 0,001 persen (IV/d), dan 0,00 persen (IV/e).

Data tersebut menunjukkan betapa sedikit guru yang mampu melampaui golongan IV/a. Sebab, untuk dapat mengurus pangkat lanjutan, guru harus menyertakan sejumlah karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas (*action research*). Hal ini sungguh menyedihkan, sebab semestinya guru dapat menjadikan karya ilmiah sebagai media untuk mendialogkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan. Melalui publikasi ilmiah itulah diharapkan terjadi *sharing* yang memungkinkan para guru dapat berbagi pengalaman.

Publikasi ilmiah dan PTK para guru sangat berkaitan dengan fasilitas perpustakaan dan dukungan dana. Keadaan perpustakaan yang masih memperhatikan menyebabkan guru kesulitan memperoleh referensi yang dibutuhkan. Dukungan dana untuk kegiatan PTK juga tidak pernah muncul dalam RAPB sekolah. Target sekolah yang berlebih dan minimnya kesejahteraan guru juga menjadi faktor yang menyebabkan tradisi menulis dan meneliti kurang populer di mata guru.

Faktor lain yang juga penting adalah bahwa ternyata tidak banyak sekolah yang memiliki majalah atau jurnal. Padahal melalui majalah dan jurnal itulah para guru dapat mengaktualisasikan idenya. Apalagi jika majalah dan jurnal itu memiliki ISSN dan berstatus terakreditasi, maka publikasi ilmiah yang dimuat jelas akan memiliki nilai cukup besar untuk kenaikan pangkat. Penerapan IT, termasuk layanan internet, juga sangat bermanfaat bagi guru guna meningkatkan wawasan.

Keengganan guru untuk menulis dan meneliti juga dikarenakan mereka merasa nyaman dengan apa yang dilakukan selama ini. Kondisi ini terbentuk memang tidak mutlak kesalahan guru. Sebab, kultur di sekolah juga terkadang tidak banyak menuntut perubahan. Akibatnya, banyak guru yang merasa cukup dengan kemampuan yang dimiliki. Faktor inilah yang menyebabkan minat guru untuk menulis dan meneliti sangat rendah. Hal ini jelas ber-

beda dengan dunia perguruan tinggi yang selalu menuntut setiap dosen untuk terus meng-*up grade* ilmu pengetahuannya.

Pemberlakuan Undang-undang tentang Guru dan Dosen (UU Nomor 14 tahun 2005) telah memberikan harapan besar untuk menumbuhkan minat guru agar senang menulis dan meneliti. Program sertifikasi yang sedang berlangsung secara nasional juga dapat merangsang minat guru untuk menghasilkan karya ilmiah. Ini karena aktivitas menulis karya ilmiah dan PTK mendapatkan porsi yang besar dalam penilaian berbasis portofolio.

Di samping itu, penting juga dikemukakan beberapa program pemerintah untuk mendukung guru agar senang menulis dan meneliti. Selama tahun 2007, pemerintah telah meluncurkan beberapa program peningkatan profesionalitas guru dan pemberian *grant* untuk kegiatan; (1) PTK untuk 3.837 guru dengan alokasi dana Rp. 13.653.600.000,-; (2) bimbingan karya tulis ilmiah bagi 10.000 guru dengan alokasi dana Rp. 50 miliar; dan (3) pertemuan ilmiah guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Bahkan pemerintah juga memberikan hak cuti pada guru yang melaksanakan penelitian dan penulisan buku.

Dengan berbagai fasilitas tersebut rasanya tidak boleh lagi ada alasan bagi guru untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Dengan kata lain, kultur menulis dan meneliti harus mulai tumbuh dalam diri guru.

MENINGKATKAN MUTU GURU

Ada kata hikmah yang terkenal ketika kita membicarakan peran penting guru. Yakni, *al-thariqatu ahammu min al-maddah wa al-mudarrisu ahammu min al-thariqah*. Kata hikmah ini berarti bahwa metode itu lebih penting dari materi pelajaran dan guru itu jauh lebih penting dari metode pembelajaran. Ungkapan ini menunjukkan bahwa guru sebagai ujung tombak pembelajaran memiliki posisi yang signifikan. Bahkan metode pembelajaran yang paling canggih sekalipun tidak akan efektif jika dipraktikkan guru yang tidak bemutu (*underqualified*).

Karena memegang posisi yang menentukan, maka tidak mengherankan jika guru sering disalahkan ketika peserta didik tidak memperoleh hasil memuaskan saat Ujian Nasional (UN). Terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan peserta didik untuk meraih hasil terbaik UN, rasanya tidak salah jika kita mengoreksi mutu guru. Mutu guru memang bukan penentu keberhasilan atau kegagalan peserta didik menjalani UN. Faktor lain yang layak disebut adalah kemampuan peserta didik dan dukungan orang tua. Kemampuan peserta didik layak dikemukakan karena berkaitan dengan modal dasar yang dimiliki untuk mengerjakan soal UN. Sementara dukungan orang tua sangat berarti

untuk membesarkan hati peserta didik (*encouragment*) agar dapat menjalani UN dengan tenang.

Faktor lain yang juga layak dikemukakan adalah kejujuran. Persoalan ketidakjujuran ini dari tahun ke tahun selalu mewarnai pelaksanaan UN. Praktik ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) potensial dilakukan peserta didik, guru, dan mentor dari lembaga bimbingan belajar. Karena terjadi ketidakjujuran, maka orang lantas mempersoalkan kredibilitas UN.

Praktik ketidakjujuran ini semakin menjadi dikarenakan ada banyak kepentingan di luar pendidikan yang turut bermain. Misalnya, pejabat publik sekelas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota turut memerintahkan dinas pendidikan agar menyukseskan UN. Dalam alam pikiran mereka, kesuksesan UN pasti dapat mendongkrak citranya sebagai pejabat publik. Dinas pendidikan pun memerintahkan kepala sekolah, yang direspon dengan membentuk tim sukses yang beranggotakan para guru. Tim inilah yang bertanggung jawab untuk menyukseskan UN.

Mengapa seorang guru akhirnya berlaku tidak jujur saat UN? Jawabannya, seorang guru jelas tidak mau disalahkan dengan jebloknya nilai UN. Maka, seorang guru pun mau melakukan apa saja agar peserta didik lulus. Dari sinilah praktik ketidakjujuran itu dimulai. Biasanya tekanan terhadap kesuksesan UN sangat dirasakan oleh guru kelas IX (SMP/MTs) dan guru kelas XII (SMA/SMK/MA). Karena itulah banyak guru yang enggan mengajar di kelas akhir. Padahal UN seharusnya juga menjadi tanggung jawab guru kelas lain dikarenakan muatan materi yang diujikan berasal dari kelas di bawahnya.

Ketakutan guru terhadap UN seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab, jika guru telah melakukan proses belajar

dan mengajar dengan baik, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seorang guru harus menyadari bahwa soal yang diujikan dalam UN berasal dari materi yang diajarkan di kelas. Ini berarti, jika terjadi ada banyak peserta didik yang tidak lulus, maka yang layak dipertanyakan adalah mutu proses pembelajarannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sesungguhnya ada hubungan kausalitas antara mutu proses pembelajaran guru di kelas dengan keberhasilan peserta didik dalam menjalani UN. Hubungan sebab akibat inilah yang seringkali tidak disadari guru.

Diduga kuat faktor utama ketidaklulusan peserta didik dikarenakan banyak guru yang menjalankan proses belajar mengajar tidak berdasar pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ditentukan. Akibatnya, ketika ujian dilaksanakan banyak peserta didik mengalami kesulitan. Padahal soal UN didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), SK, dan KD yang ada pada setiap mata pelajaran. Berkaitan dengan persoalan ini maka pemerintah dituntut untuk meningkatkan mutu guru. Bahkan jika diperlukan guru harus diajari memahami SK dan KD setiap mata pelajaran sehingga dapat menunaikan tugas pembelajaran dengan baik. Bukankah pemerintah selalu mengatakan bahwa UN penting dilaksanakan untuk memetakan mutu pendidikan?

SPIRIT LASKAR PELANGI UNTUK REFORMASI PENDIDIKAN

Pernahkah Anda menonton film *Laskar Pelangi*? Film *Laskar Pelangi* telah banyak menarik minat masyarakat, utamanya para aktivis dunia pendidikan. Film yang diangkat dari novel *best seller* *Laskar Pelangi* karya Andrea Hirata ini sungguh sangat inspiratif dan menakjubkan. *Laskar Pelangi* menghadirkan cerita yang sangat mengharukan tentang dunia pendidikan dengan tokoh-tokoh manusia sederhana, jujur, tulus, gigih, penuh dedikasi, ulet, sabar, tawakal, dan bertakwa. Lebih dari itu dapat dikatakan bahwa *Laskar Pelangi* telah berhasil memotret fakta pendidikan sekaligus ironi dunia korporasi di tengah komunitas kaum yang terpinggirkan.

Cerita *Laskar Pelangi* menghadirkan kisah tentang perjuangan dua orang guru SD Muhammadiyah Belitong (Pak Harfan dan Bu Muslimah) yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan. Dengan segala keterbatasan fasilitas yang dimiliki, Pak Harfan dan Bu Mus telah memberikan pelajaran bahwa pendidikan adalah memberikan hati pada peserta didik, bukan sekedar memberikan instruksi, komando, dan bahkan perintah.

Setiap anak pasti memiliki potensi unggul yang akan tumbuh menjadi prestasi cemerlang apabila diberi kesempatan dan keteladanan oleh orang-orang yang mengerti makna pendidikan. Pak Harfan dan Bu Mus telah mampu menjadi pendidik yang sesungguhnya, bukan sekedar pengajar yang melakukan transformasi ilmu pengetahuan. Di dalam diri keduanya terkumpul kemauan, kemampuan, keteladanan, kerja keras, kesabaran, pantang menyerah, dan keikhlasan.

Kisah dan perjuangan Pak Harfan dan Bu Mus dalam cerita *Laskar Pelangi* juga menuntut para guru mampu menjawab beberapa pertanyaan instruksional dalam pembelajaran. Pertanyaan yang dimaksud adalah (1) *What educational purpose should the school seek to attain?*; (2) *What educational experiences can be provided that are likely to attain the purpose?*; (3) *How can these educational experiences be effectively organized?*; (4) *How can we determine whether these purposes are being attained?* Inti dari pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Pertanyaan kedua menanyakan pengalaman yang hendak diberikan melalui proses pembelajaran. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan pengorganisasian yang efektif terhadap beberapa pengalaman yang diperoleh peserta didik. Sementara pertanyaan terakhir menanyakan proses penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pertanyaan tersebut perlu dijawab para guru. Sebab, seringkali peserta didik tidak merasa memiliki manfaat apa pun dari pembelajaran yang dialami di sekolah. Maka penting direnungkan apakah pembelajaran yang dilakukan para guru selama ini telah memberikan makna dan manfaat bagi peserta didik. Tentu saja, pengertian makna dan manfaat dalam hal ini adalah nilai guna dari pendidikan di bangku sekolah setelah peserta didik lulus.

Dalam konteks inilah seringkali kita mengamati bahwa selalu ada kesenjangan antara pembelajaran di kelas dan tantangan kehidupan yang dihadapi peserta didik. Peserta didik selalu merasa tidak dapat berbuat banyak ketika berhadapan dengan problematika kehidupan sehari-hari. Maka pembelajaran yang bermakna (*meaningful*) adalah yang mampu memberikan kecakapan hidup (*life skill*) sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk mengatasi problem yang dihadapi. Dalam hal ini, Pak Harfan dan Bu Mus dengan dibantu oleh laboratorium alam telah mampu menanamkan kesadaran pada anggota Laskar Pelangi untuk tidak pernah berputus asa menghadapi problem kehidupan.

Melalui kisah Laskar Pelangi para guru juga mendapatkan pelajaran bahwa setiap peserta didik pasti memiliki potensi. Karena itu tugas guru adalah memberikan penghargaan dan terus membimbing sehingga dapat tumbuh menjadi prestasi yang cemerlang di masa depan. Pelajaran ini dapat diamati melalui potensi dan kecerdasan yang dimiliki sepuluh peserta didik yang dikenal dengan Laskar Pelangi, seperti Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, dan A Kiong. Bahkan Harun yang *invalid* secara fisik dan non-fisik juga mendapatkan hak untuk dihargai dan dibimbing.

Anggota Laskar Pelangi telah mampu menunjukkan prestasi gemilang pada masanya karena memang selalu diberi kesempatan oleh Pak Harfan dan Bu Mus untuk berekspresi. Maka sekali lagi kita melihat betapa dua pahlawan tanpa tanda jasa ini mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan mengembangkan daya imajinasi, kreasi, inovasi, nalar, rasa ingin tahu, serta eksperimentasi untuk menemukan hal-hal baru pada para peserta didik.

Apa yang ditampilkan dalam kisah Laskar Pelangi sekaligus menjadi kritik terhadap metode pembelajaran sebagian

guru yang masih bersifat *teacher center* (berpusat pada guru), *information delivery* (pemberian informasi), *single media* (media tunggal), dan *push* (menekan). Padahal pendidikan saat ini sudah harus berubah menjadi *student center* (berpusat pada peserta didik), *information exchange* (saling tukar informasi), menggunakan multimedia (termasuk menggunakan kekaayaan alam sebagai laboratorium), dan *pull* (menarik).

Sebagai contoh, dikatakan bahwa pembelajaran harus berubah dari bersifat *push* ke *pull*. Hal ini penting dilakukan para guru agar tidak ada perasaan tertekan yang dialami peserta didik. Pembelajaran harus ditampilkan dengan cara yang menarik hati, membebaskan, mengajak peserta didik terlibat aktif, menyenangkan, dan menumbuhkan inspirasi untuk mendapat pengetahuan lebih banyak.

Sama dengan novelnya, film *Laskar Pelangi* telah berhasil memotret realitas pendidikan dan ironi dunia korporasi di tengah komunitas kaum pinggiran. Semua orang yang telah membaca novel *Laskar Pelangi* atau melihat filmnya pasti sangat tergugah dan termotivasi untuk mensyukuri hidup. Bahwa ternyata masih banyak anak bangsa yang belum memperoleh layanan pendidikan sebagaimana mestinya.

Kisah *Laskar Pelangi* juga menghadirkan pelajaran penting untuk membangun nilai-nilai multikulturalisme. SD Muhammadiyah Belitong, yang menjadi *setting* sosial pasukan *Laskar Pelangi* berinteraksi telah membuka kesempatan seluas-luasnya pada warga masyarakat lintas agama dan etnis untuk memperoleh layanan pendidikan. Tengoklah peserta didik keturunan Cina seperti A Kiong dan Harun yang cacat fisik dan mental. Mereka telah mendapatkan kesempatan layanan pendidikan yang sama. Multikulturalisme dalam hal ini dapat dipahami sebagai usaha untuk menciptakan, menjamin, dan mendorong ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan beragam komu-

nitias dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhasan masing-masing. Lembaga pendidikan sebagai bagian dari ruang publik juga harus didorong untuk menjadi tempat persemaian nilai-nilai multikulturalisme.

Pelajaran mengenai multikulturalisme yang harus disemai sejak anak-anak tumbuh dan berkembang di dunia pendidikan mutlak diperlukan. Sebab, realitas masyarakat menunjukkan adanya pluralitas etnis, kultur, dan agama. Harus diakui bahwa persoalan pluralitas (kemajemukan) hingga kini masih menjadi problem yang cukup pelik. Maka penanaman nilai-nilai multikulturalisme di kalangan peserta didik jelas merupakan investasi jangka panjang dengan harapan agar mereka kelak dapat memiliki kultur untuk dapat hidup secara harmonis dalam komunitas yang majemuk.

Akhirnya, Pak Harfan, Bu Mus, dan pasukan Laskar Pelangi telah menunjukkan pada kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk dapat dicapai asalkan ada kemauan, kerja keras, dan kesabaran. Prinsip “selalu memberi sebanyak-banyaknya dan tidak menerima sebanyak-banyaknya”, dari Pak Harfan dapat dijadikan spirit bagi guru Muhammadiyah. Kecerdasan, kesabaran, kesungguhan, dan keikhlasan Bu Mus juga dapat dijadikan inspirasi untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Para peserta didik Muhammadiyah juga dapat menjadikan pasukan Laskar Pelangi sebagai teladan untuk mewujudkan citat-cita setinggi langit dengan cara giat belajar dan kerja keras.

Mudah-mudahan kita dapat memperoleh spirit dari kisah Laskar Pelangi untuk mereformasi pendidikan.

IRONI PEMERASAN TERHADAP GURU

Kasihannya sekali nasib para guru. Pahlawan tanpa tanda jasa ini terus dijadikan sasaran pemerasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Modusnya, para guru dijanjikan lulus uji kompetensi awal (UKA) dengan syarat memberikan imbalan uang. Sebagai tahap awal untuk menyaring guru yang akan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), UKA sangat potensial dijadikan media untuk memeras guru. Karena itu, para guru harus mewaspadaikan praktik pemerasan terselubung dalam pelaksanaan UKA.

Di beberapa daerah para guru juga menjadi sasaran pungutan liar saat menerima tunjangan profesi pendidik (TPP). Berdalih untuk tasyakuran atau peningkatan mutu, para guru harus merelakan sebagian TPP-nya dipotong. Padahal untuk memperoleh TPP, mereka harus berjuang dalam waktu sangat lama. Dimulai dari usaha untuk bisa masuk *data base* guru tersertifikasi, selanjutnya berjuang untuk lulus saat mengikuti UKA. Guru yang dinyatakan lulus baru berhak untuk mengikuti PLPG. Sementara yang tidak lulus harus menunggu antrian untuk didaftar sebagai peserta UKA.

Proses PLPG yang melelahkan pun harus dijalani guru selama sehari-hari. Pada tahap akhir PLPG, para guru harus menjalani tes untuk menentukan kelulusan. Belum tentu semua guru lulus tes. Bagi yang lulus, otomatis akan menerima sertifikat sebagai guru tersertifikasi. Sebaliknya, guru yang tidak lulus, berarti harus mengikuti rangkaian tes ulang hingga dinyatakan lulus. Begitulah jalan panjang yang harus dilalui guru sehingga berstatus tersertifikasi dan berhak memperoleh TPP.

Proses untuk mencairkan tunjangan profesi guru ternyata tidak mudah. Guru harus sabar menunggu, paling tidak dua hingga tiga tahun. Proses administrasi yang berbelit dan pembukaan nomor rekening di bank menjadi penyebab lamanya pencairan. Jika sudah keluar, TPP juga belum tentu terbayar secara rutin. Tunjangan profesi guru terkadang dirapel setiap enam bulan atau bahkan setahun sekali. Ini berarti perjuangan guru untuk mendapatkan tunjangan profesi terasa sangat berat dan berliku. Karena itu, sangat ironi jika ada pihak yang dengan tega melakukan pemerasan pada guru.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hingga 2011, jumlah guru tersertifikasi mencapai 746.727 (25,5 persen) dari total 2.925.676 guru. Dari guru bersertifikat itu, 731.002 (97,9 persen) telah menerima tunjangan profesi. Jumlah guru tersertifikasi yang begitu besar tentu potensial dijadikan sasaran pemerasan.

Apalagi guru seringkali tidak memiliki pilihan karena pemerasan itu diduga melibatkan pengurus kelompok kerja kepala sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Madrasah (MKKM). Sangat mungkin pengurus K3S dan MKKM ini bergerak karena mendapat perintah dari oknum di unit pelaksana tugas dinas (UPTD) pendidikan di

setiap kecamatan. Fakta inilah yang perlu dilacak karena menurut pengakuan beberapa guru, uang hasil pungli itu dibagikan pada pengurus K3S, MKKM, dan UPTD.

Peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tunjangan profesi jelas dimaksudkan agar guru selalu meng-*upgrade* wawasan dan keterampilannya. Diharapkan pada saatnya kita menyaksikan para guru bergerak dari kondisi tidak bermutu (*under qualified*) menjadi bermutu (*qualified*). Dengan guru yang bermutu, maka sistem pendidikan diharapkan akan semakin berkualitas dan berdaya saing di level internasional. *Education International* (EI) mengidentifikasi kompetensi utama yang harus dimiliki guru meliputi pengetahuan, kemampuan pedagogi, komunikasi, perilaku, dan nilai. Ini berarti guru harus didorong meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasinya sehingga menjadi guru profesional.

Tidak bisa dipungkiri, guru memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa guru merupakan ujung tombak pendidikan. Guru merupakan faktor terpenting dalam meraih kesuksesan pembelajaran dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Metode pembelajaran yang paling canggih sekalipun tidak akan efektif jika dipraktikkan guru yang tidak bermutu. Karena itu sudah selayaknya program pemerintah diorientasikan untuk meningkatkan mutu guru.

Mengingat pentingnya posisi guru dalam keseluruhan sistem pendidikan, maka semua pihak seharusnya memberikan dorongan pada guru untuk meningkatkan mutu. Diantara cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Ini perlu ditekankan karena seringkali pemerintah dan masyarakat menuntut perbaikan kinerja guru, tetapi kesejahteraan mereka diabaikan.

Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan guru mulai dirasakan seiring dengan kebijakan untuk memberikan tunjangan profesi yang digulirkan pemerintah sejak 2007 silam. Bahkan di beberapa daerah, pemerintah juga memberikan insentif tambahan bagi guru di luar gaji dan tunjangan profesi.

Tujuan dari beberapa ikhtiar tersebut adalah meningkatkan mutu guru. Sebab, selalu ada korelasi yang positif antara kesejahteraan dengan peningkatan kinerja. Selain perbaikan kesejahteraan, program peningkatan wawasan dan keterampilan guru juga harus terus digulirkan. Untuk itulah pemerintah dan *stakeholder* pendidikan harus melakukan kegiatan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan, workshop, pendampingan, dan forum ilmiah lainnya yang memungkinkan para guru meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Kita harus menyadari, bahwa jantung pendidikan itu sejatinya ada di kelas. Itu berarti para guru memiliki peranan yang teramat penting untuk menghadirkan pembelajaran yang benar-benar bermutu. Untuk itulah dibutuhkan guru berdedikasi tinggi. Rasanya dedikasi itu akan muncul jika para guru terbebas dari beban hidup. Pada konteks ini perbaikan kesejahteraan guru mutlak diperlukan.

GURU BANTU DIANGKAT PNS

Pengangkatan guru bantu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ditempatkan di sekolah negeri pasti disambut suka cita oleh para guru bantu. Hal ini dikarenakan mereka telah mengabdikan sekian lama dan berjuang untuk mendapatkan status PNS. Dengan berstatus PNS, berarti mereka memiliki kejelasan nasib, karir, dan kesejahteraan. Jika selama menjadi guru bantu mereka hanya mendapatkan penghasilan yang tidak seberapa, maka begitu diangkat PNS, jaminan kesejahteraan mereka pun dipastikan meningkat. Seperti PNS lain, mereka pun berhak mendapatkan berbagai fasilitas termasuk tunjangan pensiun di akhir purnatugas nanti.

Berbeda dengan guru bantu yang diangkat PNS, sekolah swasta yang menjadi tempat tugas mereka harus berduka cita. Yang membuat sekolah swasta bersedih adalah karena sebagian besar guru bantu adalah guru senior dan guru terbaik di sekolahnya. Begitu guru bantu ini sudah “jadi”, mereka diangkat PNS dan tidak ditempatkan di sekolah asalnya. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penempatan guru bantu yang diangkat PNS di sekolah negeri telah menyisakan persoalan bagi sekolah swasta. Persoalan akan menjadi lebih kompleks jika yang mengalami adalah sekolah swasta berkategori kecil dan memiliki banyak keterbatasan.

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) memang telah membuat peraturan meniadakan status guru PNS yang diperbantukan (DPK) di sekolah swasta. Peraturan ini dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk menempatkan guru bantu di sekolah negeri. Dengan dalih pemerintah yang mengangkat PNS, maka mereka yang diangkat pun harus ditempatkan di sekolah negeri.

Maka jika ada sekolah swasta yang meminta agar pemerintah menempatkan guru bantu yang diangkat PNS di sekolah asalnya, pemerintah pun tetap kukuh pada pendiriannya. Dalam kasus penempatan guru bantu pemerintah pun bersikap seperti iklan di media; “Shogun *kok* dilawan (pemerintah *kok* dilawan)”. Sikap ini jelas menunjukkan tiadanya empati pemerintah terhadap sekolah swasta. Padahal selama ini swasta telah membantu pemerintah dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peraturan MenPAN bagi sekolah swasta berkategori kecil jelas sangat memberatkan. Sebab, selama ini keberadaan guru PNS berstatus DPK sangat bermanfaat. Sekolah swasta dapat mempekerjakan mereka tanpa harus mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji. Kalaupun ada tambahan penghasilan yang diberikan biasanya hanya transportasi dan gaji yang diperoleh dari kelebihan jam mengajar. Demikian juga dengan guru bantu yang ditempatkan di sekolah swasta, perguruan swasta pun tidak harus repot menggaji mereka sebab pemerintah sudah menganggarkan melalui APBN dan APBD. Karena itu, ketika guru bantu ini diangkat PNS dan tidak ditempatkan di sekolah swasta, maka pihak pengelola pun meradang.

Untuk sekolah swasta berkategori besar dan mapan memang tidak membutuhkan guru DPK dan guru bantu. Bahkan sekolah ini dengan gagah mampu menolak guru DPK dan guru bantu. Hal ini karena yang dipentingkan sekolah

swasta berkategori besar dan mapan adalah ketaatan, tanggung jawab, dan pengabdian. Beberapa sifat yang disebutkan ini biasanya tidak dimiliki oleh guru DPK dan guru bantu karena mereka merasa digaji pemerintah. Tentu tidak semua guru DPK dan guru bantu bersifat demikian.

Beberapa sekolah swasta yang mapan pun menerapkan standar kepegawaian dan kesejahteraan layaknya PNS. Bahkan beberapa sekolah swasta yang sangat mapan, kesejahteraan gurunya jauh lebih baik dari PNS. Ini semua dilakukan untuk menumbuhkan komitmen para guru. Tetapi, sangat disayangkan jumlah sekolah swasta berkategori besar dan mapan tidak banyak. Mayoritas sekolah swasta adalah kelas pinggiran sehingga masih banyak bergantung bantuan pemerintah.

Pengangkatan guru bantu menjadi PNS juga menghadirkan problem bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan guru PNS di sekolah negeri. Mereka khawatir karena jumlah jam mengajarnya akan berkurang. Hal ini dapat dipahami karena standar minimal jam mengajar yang ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah 24 jam. Tetapi, sekali lagi, yang merasa sangat kehilangan tentu sekolah swasta yang ditinggalkan. Mereka sedih karena harus mulai melakukan pembinaan dari nol lagi. Maka dalam kasus ini kiranya perlu dipertanyakan empati pemerintah terhadap sekolah swasta.

RAPERDA UMG DAN KESIAPAN SWASTA

Melalui forum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), para penyelenggara pendidikan swasta menyatakan berkeberatan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Upah Minimum Guru (Raperda UMG). Draf Perda UMG diajukan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Salah satu poin penting yang diperdebatkan dalam draf Perda UMG adalah gaji minimal guru yang mencapai Rp. 1,1 juta perbulan.

Selain itu, ada kewajiban penyelenggara pendidikan swasta untuk membayar kelebihan jam mengajar guru jika melebihi 24 jam. Semangat yang diusung Raperda UMG adalah mengatur sistem penggajian guru. Bagi Dispendik, peraturan ini perlu dibuat dengan harapan ada kesepakatan para penyelenggara pendidikan untuk menentukan gaji minimal guru. Raperda UMG jelas menjadi angin segar bagi guru, terutama yang mengajar di pendidikan swasta berkategori menengah ke bawah.

Jika ditelisik lebih jauh, rasanya masih banyak guru, terutama guru tetap yayasan, yang masih menerima penghasilan di bawah upah minimum regional kota dan provinsi yang diberlakukan untuk buruh pabrik. Padahal tugas guru

dilukiskan dengan kalimat yang begitu menterang; mence- tak manusia Indonesia seutuhnya, berkarakter kuat, dan berdaya saing tinggi. Posisi guru juga sangat vital untuk menjadikan pendidikan bermutu. Pertanyaan yang layak diajukan; Bagaimana mau berbicara mutu pendidikan jika problem yang berkaitan dengan kebutuhan minimal guru belum terpenuhi? Tampaknya, pertimbangan inilah yang mendasari Dispendik mengajukan Raperda UMG.

Berbeda dengan guru, Raperda UMG jelas menjadi persoalan bagi penyelenggara pendidikan swasta. Tentu bukan hanya persoalan istilah “upah minimal guru” yang patut diperdebatkan. Ada problem yang lebih besar, yaitu kewajiban penyelenggara pendidikan untuk memenuhi standar minimal gaji guru. Ini baru pengeluaran rutin di luar operasional pendidikan. Padahal penyelenggara juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan lembaga pendidikan agar dapat bertahan dan berkompetisi dengan lembaga lain.

Maka, dapat dibayangkan betapa pusing kepala para penyelenggara pendidikan jika Raperda UMG ini benar- benar diundangkan. Sejujurnya, penyelenggara pendidik- an bukan tidak mau meningkatkan kesejahteraan guru. Mereka sangat menyadari kecilnya pendapatan guru. Problemnya adalah kebanyakan sekolah swasta mengan- dalkan donasi pendidikan dari orang tua peserta didik. Untuk sekolah swasta berkategori besar memang tidak masalah, tetapi untuk sekolah berkategori kecil dengan jumlah peserta didik sedikit tentu menjadi masalah besar.

Di luar problem yang dihadapi sekolah swasta, rasanya Raperda UMG juga perlu disinkronkan dengan peraturan lain yang mengatur donasi pendidikan. Sebab, Dispendik Suraba- ya pernah melarang sekolah menarik donasi dari wali peserta didik. Setali tiga uang, Bambang DH, Walikota Surabaya, juga

menyalahkan sekolah-sekolah yang masih menarik donasi. Bagi sekolah negeri, persoalan donasi pendidikan memang jadi isu sensitif. Ini karena sebagai sekolah negara, berarti segala pembiayaan yang dikeluarkan sudah dipenuhi oleh pemerintah.

Masyarakat akan menyatakan tidak lazim jika ada sekolah negeri yang membebankan biaya operasional pendidikan pada orang tua. Padahal dalam beberapa kasus, donasi pendidikan yang melibatkan sekolah negeri selalu berdalih karena dana dari pemerintah belum memenuhi semua kebutuhan. Jika sekolah negeri saja begitu, bagaimana dengan pendidikan swasta?

Dispendik Surabaya beralasan bahwa secara logika penyelenggara pendidikan swasta pasti mampu memenuhi UMG. Sebab, pemerintah telah banyak meluncurkan program bantuan pendidikan. Misalnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda). Tetapi, karena besaran dana yang diberikan bergantung pada jumlah peserta didik, maka penerimaan BOS dan Bopda pun berbeda untuk setiap sekolah. Tampaknya, inilah problem yang dihadapi penyelenggara pendidikan swasta. Bagi mereka, tidak mungkin pembiayaan UMG dan kebutuhan operasional lain hanya mengandalkan BOS dan Bopda.

Sebenarnya, masih ada jalan keluar bagi penyelenggara pendidikan swasta agar dapat memenuhi UMG. Yakni, dengan jalan memanfaatkan sumber daya stakeholder sekolah, yang dapat dijalankan oleh Komite Sekolah. Untuk memobilisasi sumberdaya stakeholder memang tidak mudah. Diperlukan perjuangan dan bukti empirik berupa penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah secara profesional. Jika donasi dari stakeholder keluar, penyelenggara juga harus memberikan pertanggungjawaban secara transparan pada semua stakeholder sekolah.

menikmati permainan dan untuk sementara melupakan perbedaan latar belakang sosial budayanya. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sepak bola dapat digunakan sebagai media untuk menciptakan pembauran antar warga (*melting pot*).

Ada beberapa alasan yang perlu dikemukakan sehingga kesadaran multikulturalisme harus ditumbuhkan. Haryatmoko (2007) menyebutkan tiga hal yang menjadikan multikulturalisme mutlak diperlukan. *Pertama*, adanya fenomena penindasan atau penafian atas dasar agama, etnis, dan budaya. Dikotomi antara “kita” (kelompok dominan) dan “mereka” (di luar kelompok dominan) seringkali dilembagakan dalam rangka menjauhkan kelompok minoritas dari kekuasaan. Pelembagaan diskriminasi ini banyak terjadi di wilayah publik seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan publik, dan hubungan sosial lainnya. Agar diskriminasi ini memperoleh legitimasi, maka kelompok minoritas terus ditekan sehingga kehilangan eksistensi.

Kedua, istilah minoritas secara sistematis telah digunakan untuk memarginalkan kelompok tertentu dengan memberi label “tidak terlalu penting” dalam berhubungan dengan kelompok dominan. Akibatnya, perasaan rendah diri semakin terpatrit dalam struktur kesadaran kelompok minoritas. Pada konteks inilah multikulturalisme hendak menjawab kebutuhan dasar kelompok minoritas untuk mengembangkan identitas budaya dan memberikan penghargaan terhadap eksistensinya.

Ketiga, kaum urban dan migran seringkali menjadi pihak yang dipinggirkan oleh kelompok dominan. Situasi ini semakin terasa sejak undang-undang otonomi daerah dilaksanakan. Apalagi dalam banyak kasus, otonomi daerah seringkali disalahartikan dengan pemihakan terhadap kepentingan warga asli atau pribumi. Akibatnya, terjadi diskriminasi ter-

hadap warga pendatang. Rekrutmen pejabat publik pun tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan asal daerah.

Berdasarkan tiga argumen tersebut maka kesadaran multikulturalisme perlu terus digelorakan agar tumbuh sikap saling memahami kekhasan masing-masing. Dan, kekhasan tidak boleh disamakan dengan keunggulan. Cara berpikir ini penting dikedepankan dalam memahami keragaman latar belakang sosial budaya.

Pelajaran multikulturalisme jelas terasa sekali dalam permainan sepak bola. Semua pemain yang berlaga bahu-membahu dan saling membantu sehingga tidak tampak budaya yang mendominasi. Penonton juga dapat menikmati pertandingan dan memberikan dukungan penuh pada pemain. Meski sejujurnya harus diakui bahwa antar pemain dan penonton sejatinya memiliki perbedaan sosial budaya. Hal ini menunjukkan betapa penting permainan sepak bola sebagai salah satu media menumbuhkan kesadaran multikulturalisme.

Mengingat begitu penting posisi sepak bola sebagai media menumbuhkan multikulturalisme dan nasionalisme maka sudah saatnya elit PSSI menghentikan pertikaian. Marilah bersatu untuk membangun masa depan sepak bola nasional. Jauhkan urusan sepak bola dari kepentingan politik. Jika diperlukan ajaklah mantan pemain sepak bola untuk terlibat mengelola PSSI. Jika cara ini tidak juga manjur, jangan-jangan kita memang membutuhkan ketua umum PSSI naturalisasi untuk mengurus sepak bola nasional.

SEKOLAH NUNUT

Kasus sekolah nunut kembali hangat dibicarakan seiring dengan masa pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2008/2009. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya jumlah sekolah nunut di metropolis mencapai 86 sekolah. Jumlah ini terhitung mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, Kejar Paket, hingga universitas. Yang menarik, 46 sekolah di antaranya berada di bawah naungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Fenonema sekolah nunut memang sangat dilematis. Di satu sisi, keberadaannya dalam tingkat tertentu bermanfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kelompok kelas sosial ekonomi rendah. Kelompok masyarakat ini jelas tidak mampu jika harus menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah mapan. Pilihan yang realistis bagi mereka adalah sekolah kelas pinggiran atau sekolah yang melaksanakan pembelajaran di siang hari. Sekolah pinggiran dipilih dengan alasan biaya pendidikan yang murah, sementara sekolah di siang hari dipilih karena pada pagi hari anak-anak dapat bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Sementara, pada sisi yang lain, keberadaan sekolah nunut ini sangat mengganggu sekolah induk, yang umumnya

adalah sekolah negeri. Dari perspektif ini, pihak yang paling dirugikan adalah Dispendik yang membawahi sekolah negeri. Apalagi selama ini ditengarahi bahwa keberadaan sekolah nunut ini sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi sekolah induk. Dispendik juga akan kesulitan melakukan pembinaan pada sekolah nunut dikarenakan tidak memiliki fasilitas sendiri.

Karena dirasa mengganggu itulah, Dispendik menawarkan solusi penyelesaian dengan alternatif; *Pertama*, sekolah nunut tidak lagi diperbolehkan membuka pendaftaran peserta didik baru pada tahun ini; *Kedua*, sekolah nunut diberikan tenggang waktu dua tahun untuk proses penyelesaian/pelulusan peserta didik; *Ketiga*, jika ingin tetap beroperasi, sekolah nunut diwajibkan menyewa gedung swasta, terutama sekolah swasta yang mengalami penurunan peserta didik.

Tetapi sangat disayangkan, tawaran alternatif Dispendik ini ditolak oleh penyelenggara sekolah nunut. Seperti diutarakan Masmuk, Ketua PGRI Surabaya, bahwa selama bertahun-tahun para penyelenggara sekolah nunut telah berjuang dan membantu tugas negara untuk turut mencerdaskan warga masyarakat.

Dengan menempatkan masyarakat miskin sebagai *market* sekolah, penyelenggara sekolah ini berargumentasi bahwa jika hak operasionalnya dicabut, maka tidak akan ada lagi kelompok masyarakat yang mau peduli dan berempati pada rakyat miskin. Benarkah alasan kemanusiaan itu yang mendorong penyelenggara sekolah nunut untuk tetap bertahan pada keputusannya?

Menjawab pertanyaan tersebut barangkali tidak mudah. Tetapi, hanya dengan menempatkan alasan kemanusiaan untuk memahami kasus pendirian sekolah nunut

juga bukan pandangan yang *fair*. Sebab, para penyelenggara sekolah nunut juga pasti diuntungkan secara ekonomi. Para guru yang berstatus pegawai negeri juga diuntungkan karena mendapatkan “obyekan” mengajar di luar jam dinas. Apalagi dikatakan bahwa 85 persen guru yang mengajar di sekolah-sekolah PGRI berstatus PNS. Keberadaan sekolah nunut juga membantu karena dapat membuka lowongan pekerjaan bagi guru dan karyawan swasta.

Pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat pengguna sekolah nunut; Apakah mereka telah memperoleh layanan pendidikan sebagaimana mestinya? Inilah pertanyaan yang penting dijawab oleh para penyelenggara sekolah nunut. Jika mereka memahami sekolah itu sebagai pusat layanan sosial di bidang pendidikan, maka mereka juga harus menunjukkan komitmen dan tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi peningkatan kualitas pendidikan peserta didik.

Menurut saya, dalam aspek inilah penyelenggara sekolah nunut itu belum mampu menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pendidikan. Pada konteks inilah Dispendik sebagai pembuat regulasi berkepentingan mengambil langkah tegas untuk menertibkan sekolah nunut.

Jika penyelenggara sekolah nunut ingin membantu tugas negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang murah tapi berkualitas, maka tidak ada jalan lain kecuali mereka harus melakukannya dengan serius dan tanggung jawab. Keseriusan dan tanggung jawab itu salah satunya harus ditunjukkan melalui penyediaan fasilitas dan sumberdaya yang memadai untuk menunjang pembelajaran. Setiap penyelenggara sekolah harus memiliki gedung, ruangan kelas, lapangan olah raga, laboratorium, perpustakaan, dan tenaga sumberdaya manusia yang handal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Merasa tidak banyak memiliki pilihan, pihak penyelenggara sekolah nunut pun memprotes regulasi yang diputuskan Dispendik. Mereka beralasan bahwa keputusan ini akan menghadirkan masalah pada banyak guru, karyawan, dan peserta didik. Pada guru dan karyawan, mereka jelas akan kehilangan pekerjaan yang telah ditekuni sekian lama. Sementara bagi peserta didik, karena sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang murah.

Tetapi, sekali lagi, ini jelas alasan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Sebab, persoalan pengangguran dan pendidikan rakyat miskin jelas menjadi tanggung jawab negara. Dalam mengatasi problem ini, pemerintah telah meluncurkan banyak program, seperti dana BOS, BOS buku, Bantuan Operasional Pendidikan, dan tambahan insentif untuk guru.

Jika penyelenggara sekolah nunut mau berpikir jernih, sesungguhnya pemerintah juga sudah bersikap sangat toleran. Kasus sekolah nunut dibiarkan tetap operasional selama puluhan tahun, meski tidak memiliki gedung sendiri. Seharusnya selama puluhan tahun itu, pihak penyelenggara sudah mampu mentas dari sekolah induk dan memiliki gedung sendiri. Tetapi fakta menunjukkan bahwa sebagian besar penyelenggara sekolah nunut merasa tidak mampu.

Mereka beralasan bahwa dana yang dapat dimanfaatkan sangat minim dan hanya cukup untuk membiayai operasional sekolah. Alasan dana memang terdengar klasik, meski selalu relevan. Tetapi alasan minimnya dana sangat paradoks dengan daya tahan sekolah nunut. Sebab, kalau mereka tidak memiliki dana operasional yang cukup tentu sudah membubarkan diri sejak lama.

Karena itu, menurut saya yang penting dipahami dari kasus sekolah nunut ini adalah komitmen dan tanggung jawab para penyelenggaranya. Jika mereka memiliki komitmen dan tanggung jawab, mestinya kasus ini tidak berlarut-larut. Mereka pasti menyadari bahwa pendidikan memang investasi jangka panjang sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tetapi dengan bermodal komitmen dan tanggung jawab yang kuat, rasanya persoalan tahunan yang dihadapi penyelenggara sekolah nunut pasti sudah dapat diselesaikan. Apalagi, jika belajar dari pengalaman, ternyata banyak di antara sekolah nunut ini mampu bangkit dan menjadi sekolah favorit, mampu berkembang pesat dan punya fasilitas sendiri.

Apapun alasannya, sekolah nunut memang tidak dapat dibenarkan. Selain tidak menunjukkan keseriusan dalam hal penyelenggaraan, ia juga akan memperburuk kultur dan sistem pendidikan. Jika sekolah nunut tetap dibiarkan, maka cita-cita mulia dari para penyelenggaranya, seperti memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat miskin dan membantu tugas negara, pasti tidak akan pernah tercapai. Ini karena masyarakat miskin pasti tidak akan pernah tercerahkan jika tidak ada keseriusan dan tanggung jawab dari penyelenggara pendidikan.

Bahkan yang terjadi mungkin sebaliknya, mereka akan semakin terpinggirkan karena tidak memiliki daya saing. Dan, lagi-lagi harus dikatakan bahwa ongkos sosial akibat dari pendidikan yang dikatakan murah dengan fasilitas seadanya ini akan jauh lebih mahal. *Output* lembaga pendidikan ini pasti akan melahirkan banyak persoalan sosial, seperti pengangguran yang kian menjadi. Kalau keadaannya sudah demikian, siapa yang mau bertanggung jawab?

BAGIAN KETIGA
MEREPOSISI
UJIAN NASIONAL

MEREPOSISI UJIAN NASIONAL

Dalam setiap hajatan akbar ujian nasional (UN), baik untuk SMA/SMK/MA, SMP/MTs, maupun SD/MI, hampir selalu diwarnai isu kebocoran soal dan beredarnya paket kunci jawaban. Selain itu, UN juga diwarnai kejadian yang menunjukkan ketidakjujuran (*dishonesty*). Budaya contek yang melibatkan peserta didik, guru, dan pengawas masih umum terjadi.

Banyak pihak mengatakan bahwa ketidakjujuran ini merupakan akibat dari tekanan yang luar biasa dari UN. Tekanan itu misalnya berupa tuntutan dari orang tua dan sekolah untuk lulus. Orang tua jelas berkepentingan dengan kelulusan anaknya untuk melanjutkan studi. Sementara sekolah berkepentingan dengan tingkat kelulusan peserta didik karena berkaitan dengan citra lembaga.

Di luar kepentingan pendidikan, UN ternyata juga menjadi perhatian pejabat publik seperti menteri, gubernur, kepala dinas pendidikan, dan bupati/walikota. Mereka menaruh perhatian karena keberhasilan UN dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan citranya sebagai pejabat publik. Karena itu, banyak kepala daerah yang memberikan target kepada kepala dinas pendidikan untuk meningkatkan kelulusan peserta didik.

Kepala dinas pendidikan meneruskan perintah atasannya dengan mengundang kepala-kepala sekolah. Tujuannya jelas, agar kepala sekolah menyukseskan UN. Karena diperintahkan kepala dinas pendidikan, kepala sekolah pun tidak mau kalah. Mereka kemudian membentuk tim sukses yang melibatkan guru-guru di sekolah. Strategi menyukseskan UN pun diatur, mulai dari cara-cara yang normal hingga yang tak normal.

Cara yang normal tentu dengan melakukan proses belajar-mengajar yang baik dan memperbanyak *try out* soal-soal UN. Biasanya setelah semua ikhtiar dilakukan, para guru pun mengajak peserta didik untuk memperkuat kondisi spiritualnya. Karena itu, jangan heran jika saat menjelang UN selalu terjadi peningkatan religiusitas peserta didik. Budaya doa bersama pun menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan sekolah.

Sementara cara-cara yang tidak normal dilakukan guru seperti mengajak peserta didik ke tempat-tempat yang dianggap keramat/suci untuk bermohon sukses UN. Bahkan ada juga kejadian peserta didik diminta untuk meminum air atau membawa pensil yang telah dibacakan doa-doa tertentu. Itu semua dilakukan untuk memperkuat sugesti peserta didik. Beberapa kejadian tersebut sekadar menunjukkan betapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan UN.

Ironinya, fenomena ini terjadi setiap menjelang pelaksanaan UN. Ini belum termasuk anggaran ratusan miliar rupiah yang dihabiskan untuk menyelenggarakan UN. Pertanyaannya, apakah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan terus melaksanakan UN? Padahal UN telah banyak menimbulkan ketidakjujuran, tekanan psikologis, isu kebocoran soal, serta korban mental dan fisik yang dialami peserta didik. Bukankah Kemendikbud selalu me-

nekankan pentingnya pendidikan karakter? Pertanyaannya, apa relevansi pendidikan karakter dengan UN? Rasanya belum ada teori yang dapat menjelaskan secara memuaskan keterkaitan pendidikan karakter dengan kebijakan UN.

Perlu Reposisi

Harus diakui, UN merupakan produk politik. Itu karena kebijakan UN merupakan kesepakatan eksekutif dan legislatif sehingga harus dilaksanakan dengan alokasi biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasan ini juga yang selalu dikemukakan pemerintah saat merespons tuntutan penghapusan UN. Karena merupakan produk politik, untuk menghapuskan UN, pasti akan memakan waktu yang lama.

Pasti diperlukan lobi-lobi politik untuk menghapuskan kegiatan yang menyerap anggaran ratusan miliar rupiah tersebut. Pihak-pihak yang selama ini diuntungkan secara ekonomis pasti akan merasa sangat kehilangan jika UN dihapuskan. Karena itu, langkah yang paling realistis adalah mereposisi fungsi UN dengan cara tidak menjadikan UN sebagai komponen kelulusan peserta didik.

Sejauh ini pemerintah menentukan kelulusan peserta didik ditentukan oleh komponen ujian sekolah (40 persen) dan UN (60 persen). Pemerintah pun selalu beralasan bahwa UN bukan satu-satunya komponen untuk kelulusan peserta didik. Pemerintah telah memberikan alokasi 40 persen pada sekolah untuk menentukan kelulusan peserta didik. Secara normatif yang dikemukakan pemerintah ini benar adanya. Tetapi, fakta menunjukkan bahwa perhatian sekolah pada UN masih sangat dominan. Jika UN tidak dijadikan komponen kelulusan, secara otomatis kelulusan peserta didik menjadi wewenang guru.

Untuk menilai kelulusan peserta didik, guru sesungguhnya telah melakukan dengan cara penilaian yang otentik

tik (*authentic assessment*) dalam bentuk ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan, dan mengobservasi perilaku peserta didik setiap hari. Dari sudut pandang teori evaluasi pendidikan dapat dikatakan bahwa cara ini jauh lebih dapat dipercaya daripada hasil UN. Fungsi UN selanjutnya dapat dikembalikan pada tujuan awalnya, yaitu pemetaan mutu pendidikan.

Berdasar hasil UN, pemerintah dapat memetakan mutu pendidikan, memberi penghargaan sekolah yang berhasil, dan secara intensif membina sekolah yang kurang berhasil. Komponen terpenting yang harus dibina adalah guru.

Ini karena guru merupakan ujung tombak pendidikan. Rasanya akan jauh lebih baik kalau anggaran UN dimak-simalkan untuk meningkatkan mutu guru. Dengan guru berkualitas, pendidikan nasional pasti akan diperhitungkan di level dunia.

MENGGAGAS UN YANG BERKEADILAN

Kritik berbagai elemen masyarakat terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tampaknya mulai direspon positif oleh pemerintah. Melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), pemerintah kini terus merancang formulasi yang lebih adil untuk menentukan kelulusan peserta didik dalam UN 2011. Formulasi baru ini dimaksudkan untuk mengakomodasi seluruh capaian (*achievement*) peserta didik selama mengenyam pendidikan di sekolah.

Dikatakan oleh Mendiknas, M. Nuh, bahwa formulasi ini menekankan pada dua prinsip. *Pertama*, penentuan kelulusan didasarkan pada penilaian yang menyeluruh; mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Prinsip ini menekankan bahwa mekanisme penentuan kelulusan peserta didik harus didasarkan pada hasil evaluasi pembelajaran peserta didik mulai kelas 1 hingga 3. Dengan demikian kelulusan peserta didik akan ditentukan berdasarkan nilai rata-rata dari UN, rapor, dan ujian sekolah. *Kedua*, berprinsip pada *continuity* dengan harapan agar hasil evaluasi model terbaru ini dapat dijadikan dasar bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Formulasi yang diajukan Kemendiknas tersebut diharapkan dapat mereduksi ketentuan yang lama. Pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya selalu mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam pasal 17 ayat 1, dikatakan bahwa ada empat persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik untuk dinyatakan lulus: lulus seluruh mata pelajaran, berakhlak baik, lulus ujian sekolah, dan lulus UN.

Tetapi, sangat disayangkan empat komponen itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, karena tetap mengedepankan hasil akhir UN. Akibatnya, UN menjadi beban bagi peserta didik, guru, dan orang tua. Bermula dari persepsi yang salah terhadap UN inilah banyak sekolah berpikiran untuk melakukan apa pun asal peserta didik lulus. Dari sinilah praktik ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) mewabah. Dalam situasi seperti ini, maka tidak heran jika banyak pihak meragukan kredibilitas hasil UN. Kalangan perguruan tinggi melalui forum rektor pun meragukan hasil UN, sehingga menolak wacana integrasi hasil UN dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Pertanyaannya, apakah dengan formulasi baru ini dengan sendirinya dapat mengurangi ketidakjujuran di sekolah? Pertanyaan ini layak diajukan karena mekanisme penentuan kelulusan dengan dasar akumulasi nilai rata-rata UN, rapor, dan ujian sekolah, tidak menjamin sekolah berlaku jujur. Praktik yang sangat mungkin terjadi adalah sekolah memberi nilai tinggi pada rapor dan ujian sekolah untuk mengantisipasi jebloknya nilai UN. Tentu saja praktik ini dapat diminimalkan jika pemerintah menetapkan pembobotan nilai. Dengan pembobotan nilai UN, rapor, dan ujian sekolah, maka penentuan kelulusan peserta didik terasa lebih adil.

Jujur harus diakui, bahwa selama ini ada yang salah mempersepsi penolakan sebagian masyarakat terhadap

UN. Sebenarnya, yang ditolak masyarakat bukan penyelenggaraan UN. Sebab, UN tetap penting sebagai bagian dari sistem evaluasi untuk menilai mutu pendidikan. Dalam hal ini UN dapat digunakan sebagai salah satu alat mengevaluasi secara eksternal terhadap proses belajar mengajar oleh satuan pendidikan.

Yang menjadi persoalan adalah ketika UN dijadikan sebagai standar kelulusan peserta didik. Apalagi peserta didik diharuskan dapat melampaui standar nilai minimal untuk mata pelajaran yang di-UN-kan. Dalam situasi seperti ini maka peserta didik dan guru akan termotivasi melakukan apa saja agar dapat melewati nilai rata-rata minimal. Pemerintah juga berdalih bahwa tujuan penyelenggaraan UN adalah untuk memetakan mutu pendidikan. Argumentasi ini pun kurang relevan sebab seharusnya bukan peserta didik yang menjadi sasaran penilaian. Seharusnya yang menjadi sasaran penilaian mutu adalah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan.

Agar UN dapat dijalankan dengan penuh keadilan maka pemerintah harus segera merumuskan pembobotan untuk nilai UN, rapor, dan ujian sekolah. Pembobotan ini penting karena dapat dijadikan acuan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Langkah ini penting agar UN tidak dipandang segalanya. Dengan memberikan bobot dan persentasi pada setiap kriteria kelulusan, maka akan terbangun kesadaran bahwa nasib peserta didik tidak hanya ditentukan dalam beberapa hari. Kelulusan peserta didik juga tidak hanya ditentukan oleh mata pelajaran tertentu. Bahkan dengan mekanisme pembobotan ini sekolah memiliki landasan yuridis untuk tidak meluluskan peserta didik jika melakukan tindakan yang melanggar peraturan sekolah dan berperilaku asusila.

Kesediaan pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan UN harus diapresiasi. Sebab, berdasarkan pengalaman pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya dapat dikatakan bahwa ternyata ada begitu banyak kepentingan di luar pendidikan yang turut bermain. Pejabat publik mulai presiden, menteri, gubernur, hingga bupati/walikota sangat berkepentingan menyukseskan kelulusan peserta didik untuk meningkatkan citra politik dirinya. Seorang kepala dinas pendidikan pun berusaha maksimal untuk menyukseskan UN karena dapat menjadi garansi bagi jabatannya. Bahkan, kepentingan ekonomi pun turut mewarnai penyelenggaraan UN karena rutinitas ini berkaitan dengan anggaran ratusan milyar.

Agaknya, ragam faktor ini menyebabkan para Mendiknas terdahulu mengalami kesulitan jika harus mereformasi total penyelenggaraan UN. Kini, kita layak berharap pada Mendiknas M. Nuh untuk mulai melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mendiknas harus diyakinkan bahwa penyelenggaraan UN dengan model yang dijalankan selama ini banyak melahirkan ketidakjujuran. Penyelenggaraan UN juga sangat bertentangan dengan keinginan melahirkan anak bangsa yang berkarakter kuat dan berdaya saing tinggi.

Disamping itu, para guru juga harus diyakinkan bahwa sepanjang pembelajaran telah dijalankan dengan baik dan benar, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Oleh karena itu yang terpenting dilakukan sekolah adalah memberikan dorongan pada peserta didik untuk berbesar hati (*encouragment*). Dengan cara ini peserta didik dapat menghadapi UN layaknya ujian sekolah. Peserta didik juga harus didorong untuk menjalani UN berdasar pada kemampuan diri sendiri.

PRESTASI YES, JUJUR HARUS

Jadwal pelaksanaan ujian nasional (UN) 2012 telah diluncurkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Karena itu jangan heran jika pembelajaran di sekolah saat ini lebih banyak didominasi latihan mengerjakan soal-soal ujian. Dampaknya, guru mata pelajaran non-UN pun harus merelakan jika jam mengajarnya dikurangi. Semua ini dilakukan dengan harapan agar angka kelulusan peserta didik meningkat.

Harus diakui, saat menghadapi UN pihak yang paling sibuk adalah guru, apalagi guru kelas akhir. Pandangan yang menempatkan guru sebagai faktor utama kesuksesan peserta didik saat UN tentu sangat beralasan. Meski demikian, sesungguhnya ada faktor lain yang juga sangat berpengaruh pada kesuksesan peserta didik, yaitu dukungan orang tua. Faktor dukungan orang tua ini sangat berarti untuk membesarkan hati (*encouragement*) peserta didik agar menjalani UN dengan tenang. Orang tua dapat mendorong anaknya untuk meraih prestasi setinggi mungkin. Tetapi, yang tidak boleh dilupakan adalah pesan agar anaknya tetap menjunjung nilai-nilai kejujuran.

Faktor yang juga turut menambah beban saat pelaksanaan UN adalah tekanan pejabat publik. Pejabat terkait seperti menteri dan kepala dinas pendidikan mulai tingkat provinsi hingga

kabupaten/kota biasanya ikut mamatok target angka kelulusan. Bahkan pejabat publik sekelas presiden, gubernur, bupati, dan walikota pun turut berkepentingan dengan tingkat kelulusan untuk membangun citra kepemimpinannya. Hanya saja, kebijakan kepala daerah seringkali kurang menunjukkan keberpihakan pada peningkatan mutu pendidikan. Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan mutu guru. Pertanyaannya, bagaimana kita mau mewujudkan pendidikan yang unggul jika mutu guru kurang diperhatikan?

Ketakutan guru terhadap UN seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab, jika guru telah melakukan proses belajar dan mengajar dengan baik maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dapat dikatakan bahwa guru yang menempatkan UN sebagai beban adalah mereka yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pembelajaran. Mereka inilah yang tidak memiliki rasa percaya diri sehingga mudah tergoda untuk berperilaku tidak jujur.

Perilaku tidak jujur itu dilakukan karena guru seringkali tidak dapat menerima kenyataan jika ada banyak peserta didiknya yang memiliki nilai jeblok. Pertimbangan lain yang juga penting dikemukakan adalah berkaitan dengan citra sekolah jika hasil ujian peserta didik tidak memuaskan. Dalam pikiran guru dan pimpinan sekolah, citra sekolah salah satunya dapat dilihat dari keberhasilannya dalam meluluskan peserta didik. Dalam kaitan ini persentasi kelulusan peserta didik dapat menjadi nilai lebih sekolah untuk meyakinkan pada *stakeholders*-nya.

UN 2012 harus disongsong dengan penuh optimisme. Semua pihak yang berkepentingan dengan UN harus diajak untuk berikrar; prestasi yes, jujur harus. Ikrar ini perlu dikedepankan agar UN berlangsung jujur dan kredibel. Hal ini penting karena persoalan kejujuran saat UN dari tahun ke tahun selalu men-

jadi perhatian semua pihak. Sekedar mengingatkan, diantara kasus yang menunjukkan ketidakjujuran pada pelaksanaan UN 2011 adalah contek massal di SD Negeri Gadel, Surabaya. Peristiwa ini hanya contoh dari sekian banyak kasus ketidakjujuran (*dishonesty*) yang melibatkan guru dan peserta didik saat ujian. Dikatakan contoh karena kasus ini layaknya fenomena gunung es; kelihatan sedikit tetapi faktanya sungguh sangat banyak.

Beberapa kebijakan sesungguhnya telah ditempuh pemerintah untuk mengurangi angka ketidakjujuran. Salah satunya adalah mekanisme penentuan kelulusan peserta didik yang dihitung berdasarkan pembobotan; UN (60 persen) dan ujian sekolah (40 persen). Ini berarti UN seharusnya dipahami bukan satu-satunya penentu kelulusan. Sebab, guru di sekolah pun memiliki porsi yang cukup untuk menentukan kelulusan peserta didiknya. Kebijakan lain yang patut dicatat adalah pembagian soal UN menjadi lima paket. Variasi soal ini diharapkan dapat mengurangi perilaku contek-menyontek saat UN. Dua kebijakan ini tetap dipertahankan untuk mewujudkan UN yang jujur dan kredibel.

Dalam rangka mewujudkan UN yang jujur dan kredibel maka dibutuhkan komitmen semua pihak untuk menjunjung nilai-nilai kejujuran. Semua pihak mulai pejabat publik, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua, harus diingatkan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Karena itulah anak-anak kita harus didorong untuk meraih prestasi dan berperilaku jujur saat menjalani UN.

RAPOR KEJUJURAN UN JATIM

Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional telah mempublikasi evaluasi tingkat kejujuran sekolah dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2008/2009. Dari 33 provinsi yang disurvei ternyata hanya ditemukan satu provinsi yang memiliki tingkat kejujuran di atas 50 persen. Provinsi tersebut adalah Yogyakarta. Di provinsi ini tingkat kejujuran sekolah mencapai 70,24 persen. Sementara di 32 provinsi yang lain tingkat kejujurannya berada jauh di bawah 50 persen. Bahkan untuk provinsi Gorontalo dikategorikan dalam daftar hitam karena menduduki peringkat paling tidak jujur.

Rapor kejujuran UN untuk sekolah-sekolah di Jatim juga menunjukkan angka yang memprihatinkan. Dikatakan bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jatim, hanya ada tujuh daerah yang memiliki tingkat kejujuran tinggi: Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Batu. Jika dibuat rata-rata tingkat kejujuran tujuh daerah tersebut melebihi 50 persen.

Data rapor kejujuran UN menunjukkan bahwa masih ada 31 kabupaten/kota di Jatim yang berkategori abu-abu alias tidak jujur. Terlepas dari akurasi metodologi yang digunakan, rasanya data Balitbang Kemendiknas tersebut patut menjadi perhatian

pihak-pihak yang berkepentingan dengan kredibilitas penyelenggaraan UN.

Untuk menyongsong penyelenggaraan UN tahun ajaran 2009/2010 rasanya kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dinas pendidikan, dan pemerintah perlu didorong meningkatkan kejujuran. Jika diperlukan, maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil UN, utamanya peserta didik dan sekolah, harus diajak berikrar untuk berperilaku jujur saat mengikuti UN. Berangkat dari penyelenggaraan UN yang kurang kredibel inilah forum rektor yang beranggotakan para rektor perguruan tinggi negeri menolak usulan mengintegrasikan hasil UN dengan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Untuk meningkatkan kejujuran saat mengikuti UN rasanya para peserta didik perlu diberikan semangat dan dorongan yang membesarkan hati (*encouragement*). Hal ini penting karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, UN selalu menghadirkan beban bagi peserta didik. Bahkan pimpinan sekolah, guru, orang tua, dan kepala dinas pendidikan pun juga akan merasakan beban yang sama.

Yang lebih aneh, banyak juga kepentingan di luar pendidikan juga turut bertaruh dengan tingkat kelulusan peserta didik. Karena itu tidak mengherankan jika pejabat publik di daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota juga turut khawatir dengan tingkat kelulusan UN. Dalam situasi yang penuh tekanan inilah dorongan dan semangat pada peserta didik, pimpinan sekolah, dan guru, penting diberikan. Mereka harus diyakinkan, bahwa ujian merupakan salah satu bentuk evaluasi eksternal terhadap proses belajar mengajar (PBM). Salah satu tujuan pelaksanaan ujian adalah untuk memetakan mutu pendidikan.

Jika PBM di sekolah sudah sesuai dengan yang diharapkan rasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pelaksanaan UN.

Beban berat yang dirasakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil UN dalam tingkat tertentu jelas potensial mendorong orang berperilaku tidak jujur. Apalagi pemerintah provinsi Jatim melalui Wakil Gubernur Saifullah Yusuf menargetkan tingkat kelulusan UN harus mencapai 99 persen. Target pejabat publik terhadap kelulusan UN ini biasanya dipahami kepala dinas pendidikan di daerah sebagai perintah untuk menyukseskan UN.

Tentu bukan hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga tingkat kelulusan. Maka, kepala dinas pendidikan pun memerintahkan kepala sekolah untuk menyukseskan UN. Selanjutnya, kepala sekolah memerintahkan pada guru mata-mata pelajaran yang di-UN-kan berusaha keras agar peserta didik lulus UN. Dapat dipahami jika pejabat publik sangat berkepentingan dengan tingkat kelulusan UN. Karena dalam era politik pencitraan ini tingginya angka kelulusan dapat digunakan untuk memperbaiki citra dirinya.

Yang seringkali tidak disadari, bahwa bermula dari tekanan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil akhir UN inilah perilaku tidak jujur di sekolah muncul. Dengan alasan untuk menyukseskan UN, biasanya pihak sekolah pun membentuk tim sukses. Pada saatnya tim sukses inilah yang banyak bermain untuk membantu peserta didik mengerjakan soal-soal UN. Dalam kultur seperti ini dapat dibayangkan kredibilitas penyelenggaraan UN.

Berkaitan dengan problem inilah rasanya kepentingan di luar pendidikan, termasuk kepentingan politik pejabat publik, perlu dikurangi agar sekolah dan peserta didik menjalani

UN dengan tenang dan penuh percaya diri. Para peserta didik perlu diyakinkan bahwa kejujuran itu jauh lebih penting dari sekedar nilai yang diperoleh melalui UN. Bahkan kejujuran akademik ini semestinya bukan hanya dilakukan pada saat UN. Unsur-unsur di sekolah sejak awal seharusnya telah membangun kultur akademik yang jujur. Karena nilai-nilai kejujuran itulah sesungguhnya yang dapat menunjukkan karakter seseorang.

Bukankah pendidikan itu seharusnya diorientasikan untuk mencetak individu-individu yang berkarakter kuat? Dengan bermodal karakter yang kuat ini kita akan melihat *out put* lembaga pendidikan sebagai pribadi-pribadi yang memiliki daya saing tinggi.

DISORIENTASI PENDIDIKAN AGAMA

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah meluncurkan jadwal pelaksanaan ujian nasional (UN) 2012. Yang menarik, selain mata pelajaran UN, BSNP juga menjadwalkan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (USBN PAI) untuk kelas akhir jenjang SMA/SMK, SMP, dan SD. Ini berarti beban peserta didik di sekolah dipastikan semakin bertambah.

Sebagai pemrakarsa, Kementerian agama (Kemenag) beralasan bahwa USBN PAI dimaksudkan untuk mengevaluasi pembelajaran agama Islam di sekolah dengan harapan dapat diketahui daya serap peserta didik sekaligus menjadi rujukan pemetaan mutu. Argumentasi ini terkesan sangat normatif karena kebijakan UN yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga didasarkan pada alasan yang sama. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa program USBN PAI sesungguhnya mengekor kebijakan UN.

Kebijakan melaksanakan USBN PAI jelas semakin memperkuat anggapan bahwa pendidikan agama di sekolah baru sebatas sebagai ilmu. Hal ini didukung dengan praktik pembelajaran yang lebih menonjolkan aspek kognitif-hafalan. Peserta didik

kurang mendapat teladan dari unsur-unsur di sekolah mengenai perilaku keagamaan yang baik. Akibatnya, kultur berperilaku religius di sekolah sangat jauh dari yang diharapkan.

Orientasi USBN PAI jelas ingin mengukur capaian belajar peserta didik dalam bentuk hafalan. Ini berarti pendidikan agama di sekolah tidak lagi berorientasi pada amalan atau perilaku. Padahal sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat bermanfaat untuk membangun karakter, pendidikan agama seharusnya lebih menekankan aspek perilaku keagamaan. Melalui pendidikan agama dapat ditumbuhkan afeksi peserta didik seperti rasa ingin tahu, kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, kerja sama, dan kesiapan untuk hidup dalam budaya yang beragam.

Dimensi pendidikan agama yang menekankan pada afeksi peserta didik ini penting menjadi perhatian karena persoalan yang kita dihadapi akhir-akhir ini banyak berkaitan dengan isu hubungan internal dan eksternal antar umat beragama. Ini berarti pembelajaran agama di sekolah akan sangat bermanfaat jika diarahkan untuk membangun komunikasi yang dialogis antar paham dalam satu agama dan antar umat beragama. Dengan demikian, USBN PAI dapat dianggap bertentangan dengan keinginan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pluralitas keagamaan. Di samping itu, kesan eksklusif juga muncul karena di sekolah juga dikembangkan pelajaran agama selain Islam. Pertanyaannya, mengapa hanya PAI yang di-USBN-kan?

Pendidikan agama apa pun sesungguhnya memiliki peran sangat penting dalam memperbaiki perilaku keagamaan seseorang. Keinginan ini akan tercapai jika pendidikan agama tidak sekedar menekankan hafalan, melainkan berorientasi pada perilaku. Yang dibutuhkan saat ini sesungguhnya bukan USBN PAI yang tekanannya pasti dominan pada aspek kognitif. Tantangan guru agama di sekolah adalah menanamkan nilai-nilai kea-

gamaan melalui seluruh proses pembelajaran sehingga peserta didik menjadi orang yang lebih taat dalam beragama.

Jika pendidikan agama berorientasi pada akhlak dan kepribadian, maka untuk menilai capaian peserta didik semestinya dilakukan secara lebih utuh. Untuk itu perlu dilakukan penilaian yang otentik (*authentic assessment*). Prinsip penilaian otentik adalah menilai apa yang seharusnya dinilai. Penilaian otentik juga harus berasal dari banyak sumber. Menilai apa yang seharusnya dinilai berarti penilaian terhadap seluruh aspek; kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Sedang penilaian dari segala sumber jelas tidak hanya mengandalkan informasi peserta didik itu sendiri, melainkan juga teman sebaya, guru, dan orang tua. Mereka ini dapat dilibatkan dalam menilai capaian pendidikan agama peserta didik. Misalnya, orang tua dapat dijadikan informan untuk menilai perilaku anaknya tatkala berada di rumah. Jika orang tua memberikan informasi yang jujur, maka itu dapat dijadikan rujukan sekolah untuk menilai perilaku peserta didik.

Program USBN PAI juga patut dikritisi karena tidak sejalan dengan keinginan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pluralisme. Padahal pluralisme kini menjadi tantangan semua agama dan paham keagamaan. Di antara problem yang dihadapi umat beragama berkaitan dengan pluralisme adalah bahwa setiap agama dituntut melahirkan ajaran yang inklusif dan toleran terhadap keragaman. Sementara pada saat yang bersamaan suatu agama juga diwajibkan untuk meyakinkan pemeluknya bahwa doktrin yang diajarkan memiliki kebenaran mutlak dan bersifat eksklusif.

Dalam menghadapi dilema ini mayoritas tradisi keberagamaan mengambil sikap bahwa kebenaran hanya menjadi

milik mazhab dan agamanya. Mazhab dan agama yang lain dianggap salah. Akibatnya, setiap penganut agama atau paham keagamaan tertentu mengklaim ajarannya bersifat eksklusif dan paling benar. Klaim kebenaran (*truth claim*) inilah yang menyebabkan tidak adanya keinginan untuk saling memahami suatu tradisi keberagamaan.

Pada konteks inilah perlu dikembangkan kesadaran bahwa pluralitas keagamaan merupakan keniscayaan. Ini berarti dibutuhkan kesiapan setiap individu untuk hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama dan paham keagamaan dengan dirinya. Apalagi dalam Islam juga muncul begitu banyak mazhab di bidang fikih, teologi, dan politik. Bahkan untuk bidang fikih, perbedaan pendapat antar mazhab terasa sangat sensitif. Pertanyaannya, mampukah kebijakan USBN PAI mengakomodasi begitu banyak aliran pemikiran dan mazhab dalam Islam?

Pendidikan agama di sekolah juga harus berorientasi pada penanaman nilai-nilai religiusitas. Orientasi ini perlu ditekankan karena lembaga pendidikan mulai jenjang dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi kini menghadapi persoalan kenakalan remaja. Potret buram lembaga pendidikan yang diwarnai kasus tawuran, narkoba, *human trafficking*, dan keterlibatan pelajar dalam kasus-kasus pidana, seharusnya lebih diprioritaskan untuk dicarikan solusinya.

Karena itu, layak dipertanyakan relevansi USBN PAI dalam kaitannya dengan tantangan pluralitas agama atau paham keagamaan dan kenakalan remaja. Jika kebijakan USBN PAI terus dipaksakan maka itu jelas merupakan kegagalan dalam memahami orientasi pendidikan agama.

PENDIDIKAN HOLISTIK

Menurut diktum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan.

Pengertian tersebut memberikan gambaran betapa pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi anak. Itu berarti tugas pendidik adalah memfasilitasi anak-anak agar mengenali potensi yang dimiliki. Dalam hal ini anak harus diajari mengenali kemampuan diri sendiri (*self awareness*) sehingga menyadari kekuatan dan kelemahannya. Dengan mengenali potensinya maka seorang anak dapat didorong untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahannya.

Harus diyakini, bahwa setiap anak pasti memiliki potensi istimewa yang telah dianugerahkan Tuhan. Karena itu, sesungguhnya tidak boleh ada kategori anak “bodoh” atau “nakal”. Setiap anak pasti memiliki kecerdasan yang sangat unik dan bervariasi. Pada konteks inilah pendidik dan pe-

serta didik harus berkomunikasi secara timbal balik agar dapat menemukan potensi diri yang akan dikembangkan. Yang penting diingat, bahwa potensi diri itu tidak harus bersifat akademik, melainkan juga non-akademik.

Secara jujur harus diakui bahwa budaya masyarakat masih menempatkan capaian akademik di atas prestasi non-akademik. Pemerintah dalam berbagai kebijakan juga turut menyuburkan pola pikir tersebut. Itu dapat diamati dari perhatian pemerintah yang luar biasa setiap ada ujian nasional (UN). Mungkin tidak ada satu pun negara di dunia ini yang memberikan perhatian terhadap UN melebihi negara kita. Bahkan untuk membuat pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil UN berperilaku jujur saja, pemerintah harus mengerahkan sumber daya sipil dan militer. Itu belum termasuk anggaran ratusan milyar rupiah yang harus dialokasikan untuk kepentingan UN.

Dalam perspektif pendidikan, UN jelas merepresentasikan keinginan mengukur capaian akademik dan mengabaikan prestasi non-akademik. Kebijakan ini jelas kurang bersahabat pada peserta didik yang memiliki bakat luar biasa di bidang non-akademik, seperti olahraga dan kesenian. Rasanya sudah saatnya kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberikan penghargaan secara proporsional terhadap prestasi akademik dan non-akademik.

Capaian akademik dan non-akademik jelas sama-sama dibutuhkan untuk sukses hidup. Peserta didik yang memiliki keunggulan akademik berpeluang besar menjadi ilmuwan dan peraih hadiah nobel di bidang sains dan matematika. Tetapi, prestasi non-akademik juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab, peserta didik yang memiliki keunggulan di bidang non-akademik juga berpeluang menjadi orang yang sukses di bidangnya.

Itu berarti profesi ilmuwan sama terhormatnya dengan atlet, pekerja seni, dan enterpreneur. Karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa Profesor B. J. Habibie (ilmuwan), Rudi Hartono (olahragawan), Emha Ainun Najib (pekerja seni), dan Insinyur Ciputra (pengusaha dan pengembang virus entrepreneur) merupakan contoh orang-orang hebat di bidangnya. Tidak bisa dikatakan salah satu lebih baik dari pada yang lain.

Untuk melahirkan olahragawan, seniman, dan enterpreneur andal jelas diperlukan langkah strategis. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan sekolah unggul di bidang olahraga, kesenian, dan enterpreneur. Hanya saja harus diakui bahwa minat masyarakat terhadap sekolah jenis ini masih langka. Karena itu perlu dilakukan sosialisasi secara intensif sehingga dapat membantu untuk mendongkrak minat masyarakat. Dalam kaitan ini pemerintah perlu mengambil peran untuk membantu sekolah yang memproduksi atlet dan pekerja seni. Jumlah lembaga pendidikan yang mencetak entrepreneur juga harus diperbanyak. Apalagi realitas menunjukkan bahwa jumlah kelas entrepreneur tergolong masih sangat kecil, belum menembus angka dua persen.

Banyak persoalan yang juga masih membutuhkan penanganan agar terjadi percepatan mutu pendidikan nasional. Salah satunya adalah penerapan sistem pendidikan dua atap (Kemendikbud-Kemenag dan umum-agama). Polarisasi ini dalam tingkat tertentu pasti akan menyuburkan pola pikir yang parsial. Tidak ada budaya untuk saling bertegur sapa antar disiplin ilmu. Akibatnya, lulusan satuan pendidikan pun hanya menguasai bidang yang ditekuni. Jika ini terus dipertahankan, maka keinginan untuk mengembangkan kajian yang interkoneksi (*interconnected studies*) pasti tidak akan terwujud.

Ukuran capaian pendidikan yang hanya menekankan aspek

kognitif-hafalan, seperti halnya kebijakan UN, rasanya juga harus segera dievaluasi. Bukankah pemerintah selalu menggelorakan wacana mengenai pentingnya pendidikan berkarakter. Pertanyaannya, apa relevansi pendidikan berkarakter dengan UN? Kalau mau dikatakan secara jujur, UN sejauh ini hanya memicu praktik ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*).

Sudah seharusnya pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenag saling bertegur sapa untuk merumuskan formula agar sistem pendidikan tidak lagi terpola menjadi dua atap. Pemerintah juga harus segera mengakhiri penentuan kelulusan peserta didik dengan hanya menekankan pada capaian akademik. Rasanya sudah cukup banyak korban berjatuhan akibat tidak tahan tekanan saat menghadapi ujian.

Pemerintah juga harus mengubah kebijakan untuk mewujudkan pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik dalam hal ini dapat dipahami sebagai pendidikan yang menggabungkan semua potensi; intelektual, emosional, spiritual, sosial, kultural, dan fisik. Melalui pendidikan holistik diharapkan akan terwujud pendidikan manusia seutuhnya (*humanistic education*). Ini jelas sejalan dengan tujuan sistem pendidikan nasional. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut jelas dibutuhkan terobosan dan keberanian.

MENGEMBALIKAN MAKNA PENDIDIKAN

Pendidikan menurut Undang-undang 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Perspektif ini penting dikemukakan agar kita dapat mengembalikan makna pendidikan, yakni membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu menghadapi problem masa depan. Memahami makna pendidikan dengan perspektif ini penting karena ada kalanya peserta didik merasa tidak memperoleh manfaat apa pun dari proses pembelajaran. Lulusan satuan pendidikan pun merasa ada kesenjangan antara ilmu yang dipelajari dengan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan.

Kesenjangan proses pembelajaran dan tantangan dalam kehidupan semakin kelihatan tatkala peserta didik dinyatakan lulus. Bagi yang memiliki kecukupan dana, mereka dapat

melanjutkan pendidikan. Sementara bagi yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak ada pilihan lain kecuali harus bekerja. Dalam situasi ini kita seringkali menjumpai ada banyak lulusan yang gagal memperoleh pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan. Situasi yang kurang lebih sama juga dihadapi lulusan perguruan tinggi. Mereka juga merasakan, ternyata ilmu yang diajarkan di bangku kuliah banyak yang tidak kompatibel dengan kebutuhan masyarakat. Mereka pun mengalami kesulitan untuk mempraktikkan ilmunya. Pada konteks inilah lembaga pendidikan patut dikritik karena hanya memproduksi kelompok pengangguran dari kalangan terdidik.

Lembaga pendidikan juga layak disorot karena belum mampu melahirkan lulusan yang terampil. Akibatnya mereka kurang siap berkompetisi untuk memperebutkan peluang yang ada. Data Badan Pusat Statistika (BPS) edisi Mei 2010 memaparkan bahwa angka pengangguran mencapai 8,59 juta orang (7,41 persen) dari 116 juta angkatan kerja. Ironinya, angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi mencapai 1,36 juta (15,84 persen). Ini berarti banyak lulusan perguruan tinggi yang belum terserap di dunia kerja. Bahkan mereka juga harus bersaing dengan tenaga asing.

Karenanya tidak mengherankan jika lembaga *International Management Development* (IMD) menempatkan tingkat daya saing angkatan kerja Indonesia pada peringkat 35 dari 58 negara. Tingginya pengangguran dari kalangan terdidik jelas sangat memprihatinkan. Sebab, pengangguran terdidik jauh lebih berbahaya dibanding pengangguran yang tidak berpendidikan. Munculnya pengangguran terdidik disebabkan tidak disiapkan dengan baik untuk menghadapi dunia kerja. Akibatnya lulusan satuan pendidikan pun tidak memiliki keterampilan saat lulus.

Sistem pendidikan kita juga dituding kurang berhasil mendidik pribadi yang berkarakter. Pada konteks inilah kita perlu mengembalikan makna pendidikan agar melahirkan pribadi yang siap menghadapi tantangan kehidupan.

Untuk itulah seorang pendidik harus mengajarkan sesuatu yang benar-benar baru (*something new*). Jika ini dilakukan berarti pendidik telah mengajarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan peserta didik. Berkaitan dengan itu penting direnungkan ungkapan yang terkenal dalam falsafah pendidikan klasik berbunyi; *non scholae sed vitae discimus* (kita belajar bukan sekedar untuk sekolah, melainkan untuk hidup). Ini berarti pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik tatkala berada di bangku sekolah. Yang jauh lebih penting adalah menyiapkan mereka sehingga memiliki kecakapan yang dibutuhkan untuk menghadapi persoalan dalam kehidupan.

Karena itulah pendidikan seharusnya tidak direduksi hanya sekedar transformasi ilmu lalu dilakukan pengetesan (*teaching for the test*), seperti yang tampak dalam kebijakan mengenai ujian nasional (UN). Sebab, jika ini yang terjadi maka sekolah hanya akan menjalankan fungsi layaknya lembaga bimbingan belajar. Akibatnya proses pembelajaran akan berorientasi pada aspek yang berkaitan dengan pemahaman-kognitif. Tujuan jangka pendeknya jelas, peserta didik berhasil lulus dengan nilai memuaskan. Persoalan cara memperoleh nilai tidak lagi menjadi perhatian. Dalam situasi ini lembaga pendidikan pasti hanya akan melahirkan pribadi yang tidak jujur alias curang. Pelaksanaan UN dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kebijakan ini sejatinya tidak sejalan dengan keinginan untuk melahirkan pribadi-pribadi yang berkarakter.

Sejak 2011 mekanisme penentuan kelulusan memang telah diubah formatnya menjadi 60 persen UN dan 40

persen ujian sekolah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan agar sekolah dilibatkan dalam menentukan kelulusan. Di samping itu juga dilakukan kebijakan untuk membuat variasi soal UN dalam lima paket. Beberapa ikhtiar ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelulusan sekaligus mengurangi kasus ketakjujuran (*dishonesty*). Perubahan mekanisme ini memang terbukti bisa meningkatkan kelulusan hampir 99 persen.

Tetapi, berdasarkan pengalaman ternyata masih banyak ditemukan kecurangan. Ironinya, kecurangan ini melibatkan peserta didik, guru, kepala sekolah, dan mentor di lembaga bimbingan belajar. Sangat mungkin perilaku curang itu diakibatkan rasa cemas peserta didik saat menghadapi UN. Hasil uji petik psikologis menunjukkan 79,1 persen peserta didik sekolah menengah atas mengalami kecemasan yang luar biasa (*Kompas, 14 Mei 2012*).

Yang lebih menyedihkan, mulai 2012, pemerintah juga melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam (USBN PAI). Kebijakan ini dikatakan telah menjadi kesepahaman Kementerian Agama (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sasaran USBN PAI adalah peserta didik kelas akhir SD, SMP, dan SMA/SMK. Pelaksanaan USBN PAI semakin memperkuat anggapan bahwa pembelajaran agama di sekolah baru sebatas ilmu. Model evaluasinya pun didasarkan pada pemahaman-hafalan. Karena itu jangan heran jika yang ditekankan pendidik dalam pembelajaran agama lebih dominan pada aspek kognitif. Peserta didik kurang mendapatkan keteladanan dalam berperilaku yang baik di sekolah.

Terkait dengan kebijakan USBN PAI, Muhammadiyah telah mengambil sikap tegas. Muhammadiyah menolak kebijakan USBN PAI dengan alasan tidak terlalu urgen untuk

dilakukan. Masih banyak persoalan di lingkungan pendidikan yang membutuhkan perhatian seperti kenakalan remaja, *human trafficking*, narkoba, dan keterlibatan unsur-unsur di sekolah dalam tindak pidana. Semestinya pembelajaran agama di sekolah lebih diarahkan untuk mewujudkan perilaku yang lebih religius dari pada sekedar capaian nilai.

Bagi Muhammadiyah, pelaksanaan USBN PAI juga dianggap bertentangan dengan semangat untuk menghargai keragaman paham keagamaan dalam Islam. Apalagi sejauh ini Muhammadiyah telah mengembangkan kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah (Ismu), yang sangat mungkin berbeda dengan paham keagamaan yang dikembangkan sekolah-sekolah non- Muhammadiyah.

Karena persoalan yang terjadi di dunia pendidikan begitu kompleks, maka dibutuhkan keberanian untuk melakukan reformasi. Otoritas reformasi pendidikan itu jelas ada di tangan Kemendikbud dan Kemenag. Sudah saatnya dua institusi ini mengembalikan makna pendidikan sesuai amanah konstitusi. Yang harus diingat, lembaga pendidikan bukan sekedar pabrik ijazah (*diploma mills*), melainkan tempat berproses bagi peserta didik untuk memaknai seluruh pengalaman hidup.

MEREFORMASI PENDIDIKAN

Banyak pihak berharap reformasi pendidikan akan mulai dicanangkan ketika Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di bawah kendali Prof. Dr. Muhammad Nuh (Pak Nuh). Harapan ini tentu tidak berlebihan mengingat *track record* yang sangat mentereng dan didukung jiwa reformis Pak Nuh, baik ketika menjadi Rektor ITS maupun Menkominfo. Sebagai mantan pimpinan salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, Pak Nuh tentu sudah sangat memahami seluk beluk mengelola pendidikan yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Karena itu, ketika Pak Nuh dipilih menjadi Mendiknas dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, hampir tidak ada perdebatan di kalangan praktisi dan pemerhati pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa figur Pak Nuh dianggap sangat layak dan dapat diterima komunitas pendidikan di negeri ini.

Tetapi, jujur harus diakui bahwa harapan banyak pihak agar terjadi reformasi bidang pendidikan ini tampaknya baru sebatas impian. Sebab, dalam prioritas program 100 hari menjabat Mendiknas, Pak Nuh telah melontarkan beberapa gagasan yang kontroversial. Misalnya, keinginan Pak Nuh untuk mengintegrasikan nilai Ujian Nasional (UN) dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).

Sekilas gagasan ini memang baik karena bertujuan mengefektifkan cara masuk perguruan tinggi. Tetapi, Pak Nuh harus menghadapi penolakan para rektor PTN yang tergabung dalam forum rektor. Para rektor PTN belum dapat menjalankan program integrasi nilai UN sebagai tiket memasuki pendidikan tinggi. Alasan penolakan para rektor jelas berkaitan dengan integritas hasil UN. Menurut para rektor, jika UN belum dilaksanakan secara jujur, maka hasilnya pun layak diragukan.

Ini berarti sesungguhnya kalangan perguruan tinggi pun sudah sangat memahami praktik ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) dalam penyelenggaraan UN. Maka, hasil UN pun belum dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur kualitas peserta didik. Pertanyaannya, jika PTN sebagai mitra pemerintah saja meragukan kejujuran pelaksanaan UN, maka untuk apa program ini tetap dilanjutkan?

Persoalan UN memang telah menjadi salah satu atensi Pak Nuh. Dalam banyak kesempatan Pak Nuh juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan UN dengan sejumlah perbaikan dalam penyelenggaraannya. Bahkan ketika Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan agar pemerintah melakukan regulasi ulang penyelenggaraan UN, Pak Nuh tetap bersikukuh menyelenggarakan UN. Pak Nuh dan jajarannya bersikukuh bahwa MA tidak melarang pelaksanaan UN. Pandangan ini sekilas memang benar, tetapi sesungguhnya kalau mau jujur, publik pun dapat menyatakan bahwa dalam amar keputusan tersebut MA juga tidak mewajibkan penyelenggaraan UN.

Maka, pertanyaannya adalah mengapa pemerintah masih gigih menyelenggarakan UN jika kenyataannya tidak pernah dijalankan secara jujur dan berkeadilan? Jika dikata-

kan bahwa pada tahun ini UN tetap diselenggarakan karena telah diputuskan dalam APBN 2010, maka beranikah Pak Nuh meninjau kembali penyelenggaraan UN untuk tahun-tahun berikutnya? Beberapa pertanyaan ini layak dijawab karena belum ada teori yang dapat menjelaskan keterkaitan UN dengan pembentukan karakter bangsa. Bukankah yang terpenting dari diselenggarakannya pendidikan adalah untuk membentuk karakter bangsa?

Sebagian masyarakat sesungguhnya ada yang beranggapan bahwa UN tetap penting sebagai bagian dari sistem pendidikan. Menurut pandangan ini, UN dapat digunakan untuk menilai atau mengaudit secara eksternal penyelenggaraan proses pembelajaran oleh satuan pendidikan. Yang dipersoalkan adalah ketika UN dijadikan sebagai standar kelulusan peserta didik. Dalam menanggapi persoalan ini pemerintah biasanya berdalih bahwa UN bukan satu-satunya standar kelulusan.

Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 17 ayat 1, dikatakan bahwa ada empat persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik untuk dinyatakan lulus. Empat persyaratan yang dimaksud adalah (1) menyelesaikan seluruh program; (2) memperoleh minimal nilai baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan; (3) lulus ujian sekolah; dan (4) lulus ujian nasional.

Alasan normatif pemerintah dengan berdasar pada peraturan pemerintah tersebut memang dapat dibenarkan. Tetapi, sejujurnya dengan ketentuan nilai minimal untuk mata-mata pelajaran yang di-UN-kan, maka sekolah mulai menunjukkan gelagat tidak jujur. Buktinya, hampir tidak pernah ada kejadi-

an dimana peserta didik yang dinyatakan lulus UN kemudian diputuskan tidak lulus gara-gara tidak memenuhi tiga kriteria kelulusan yang lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa UN tetap menjadi segala-galanya. Maka, UN pun menjadi hantu yang menakutkan bagi peserta didik, guru, dan orang tua.

Anehnya, kelompok berkepentingan di luar lembaga pendidikan pun terkadang turut bermain sehingga menyebabkan praktik ketidakjujuran UN semakin meningkat. Misalnya, kelulusan UN seringkali dijadikan kepentingan politik oleh kepala daerah. Bahkan kepala daerah memberi target pada kepala dinas pendidikan untuk menyelesaikan UN.

Indikator kesuksesan UN bagi kepala daerah adalah tingginya angka kelulusan. Akibatnya, kepala dinas pendidikan pun mewajibkan pada sekolah untuk juga menyelesaikan UN. Tekanan kepala daerah dan kepala dinas pendidikan ini pun ditanggapi pihak sekolah dengan membentuk tim sukses UN. Berawal dari sini praktik ketidakjujuran penyelenggaraan UN terjadi. Semua pihak menjadi turut berkepentingan menyelesaikan UN tentu dengan segala cara.

Berkaitan dengan budaya tidak jujur tersebut jelas dibutuhkan terobosan dari Pak Nuh untuk mereformasi penyelenggaraan UN dengan beberapa langkah. *Pertama*, melibatkan lebih banyak pihak mulai sekolah, kepala daerah, perguruan tinggi, kepolisian, dan NGO, untuk mengawal penyelenggaraan UN agar berlangsung lebih jujur.

Kedua, memberikan pembobotan yang jelas dari empat komponen yang dijadikan penentuan kelulusan peserta didik seperti tertuang dalam peraturan pemerintah. Pemberian bobot ini juga terasa lebih adil karena ada perhitungan kuantitatif yang meliputi komponen-komponen yang dijadikan standar kelulusan. Jadi, kelulusan peserta didik tidak hanya ditentukan dalam beberapa hari penyelenggaraan UN.

Ketiga, bahwa orientasi ujian dalam UN semestinya bukan hanya peserta didik, melainkan juga satuan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar. Mekanisme ini salah satunya menuntut agar standar nilai minimal kelulusan harus dihapuskan. Ini berarti semua anak yang ikut ujian sepanjang terpenuhi syarat normatif dari empat komponen yang ditetapkan dapat dipastikan lulus. Yang membedakan adalah tingkatan (*grade*) lulusan dan mutu satuan pendidikan. Jika ini yang dijalankan maka baru benar pernyataan yang mengatakan bahwa UN berkaitan dengan pemetaan mutu pendidikan. Tugas selanjutnya pemerintah adalah membina sekolah yang memiliki mutu rendah berdasarkan pelaksanaan hasil ujian.

Terus terang, untuk melakukan reformasi pendidikan dibutuhkan keberanian. Pertimbangan-pertimbangan di luar pendidikan pun seharusnya diabaikan. Sebab, selama ini publik terlanjur memahami bahwa hambatan utama para Mendiknas terdahulu untuk meregulasi pelaksanaan UN berkaitan dengan begitu banyak kepentingan di luar pendidikan. Misalnya, kepentingan proyek yang melibatkan uang milyaran rupiah dan kepentingan politik kekuasaan. Maka, dalam konteks ini diperlukan figur yang *powerful* dan tidak ABS (Asal Bapak Senang).

Semoga Pak Nuh dapat merealisasikan harapan begitu banyak orang yang menginginkan agar pendidikan dikelola dengan cara yang profesional, berkeadilan, dan bermartabat. Bukankah Pak Nuh diminta Pak SBY untuk membantu mewujudkan pendidikan yang berkarakter?

PUASA MENGAJARKAN OPTIMISME

Salah satu pelajaran berharga yang kita peroleh selama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan adalah hendaknya setiap pribadi bersikap optimis. Pelajaran tentang optimisme ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang yang berpuasa pasti akan memperoleh kebahagiaan meski terlebih dulu harus menahan lapar dan dahaga serta perbuatan lain yang dapat merusak ibadah puasa. Penderitaan ini hanya sementara karena begitu Maghrib datang, kita pun diperkenankan berbuka. Umat Islam akan bertambah bahagia tatkala merayakan hari raya Idul Fitri.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda; orang yang berpuasa itu memiliki dua macam kebahagiaan, yakni ketika datang waktu berbuka dan saat bertemu dengan Allah. Hadits ini memberikan pelajaran bahwa setelah mengalami penderitaan dengan menahan lapar, dahaga, dan nafsu, kita dijanjikan kenikmatan. Ini berarti puasa mengajarkan kita untuk membangun harapan, cita-cita, dan obsesi hidup baik ketika di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan yang paling hakiki akan dirasakan orang yang berpuasa pada saat bertemu dengan Allah. Pada saat itu kita dijanjikan akan masuk surga yang penuh kenikmatan melalui pintu yang disebut *al-rayyan* (HR. Bukhari).

Jika ditanyakan pada orang yang berpuasa; kenapa tidak makan, minum, dan “berkumpul” dengan suami atau istri pada siang hari bulan Ramadan padahal semua itu halal? Jawabnya adalah karena kita sepenuhnya percaya bahwa Allah Maha Melihat seluruh yang dilakukan makhluk-Nya. Kesadaran bahwa Allah Maha Melihat ini sangat fundamental. Karena bermula dari kesadaran inilah kita merasa begitu dekat dengan Allah. Kondisi ini dalam tradisi sufi disebut *muraqabah*.

Rasanya, salah satu pengalaman terpenting dan begitu mendalam yang diperoleh orang yang berpuasa adalah merasa dekat dengan Allah. Inilah sesungguhnya yang dinamakan dengan takwa sebagaimana yang menjadi tujuan puasa (QS. al-Baqarah: 183). Keinginan kuat orang yang berpuasa untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak ibadahnya jelas didasarkan pada tujuan memperoleh keridlaan Allah. Bagi mukmin sejati, keridlaan Allah jelas lebih penting dari segala sesuatu.

Jika diamati, perbedaan mukmin dan non-mukmin salah satunya dapat dilihat dari sudut pandang mereka terhadap kehidupan. Bagi orang-orang yang beriman, kehidupan di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Dunia ini hanyalah lahan untuk beribadah. Kehidupan yang abadi justru di akhirat kelak. Karena itu, orang-orang beriman selalu terdorong untuk melakukan yang terbaik ketika hidup di dunia sebagai bekal kembali kepada Allah.

Sementara orang-orang yang tidak beriman selalu menyatakan bahwa dunia adalah akhir dari kehidupan. Bagi mereka, tidak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Mereka pun tidak mengenal ajaran berinvestasi amal untuk kehidupan di akhirat. Tegasnya, mereka tidak memiliki harapan apa pun terhadap kehidupan pasca di dunia ini.

Dalam kaitan dengan ibadah puasa berarti orang yang beriman tidak boleh merasa menderita hanya karena menahan lapar, dahaga, dan nafsu seks. Sebab, Allah telah menjanjikan pahala yang besar bagi kita. Sekali lagi, inilah tampaknya yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Allah berfirman; *Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana* (QS. al-Nisa': 104). Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hubungan mukmin dan non-mukmin, kita sesungguhnya memiliki kelebihan. Meski mungkin sama-sama menderita, kita memiliki harapan kepada Allah, sedangkan mereka tidak.

Melalui ibadah puasa kita dilatih untuk memiliki harapan. Karena itu kita harus senantiasa optimis menjalani hidup. Kita pun dilarang mudah berputus asa dalam mencari rahmat Allah (QS. Yusuf: 87). Apalagi jika sifat putus asa itu disebabkan oleh penderitaan yang dialami pada saat berpuasa. Sebab, derita yang dirasakan orang yang berpuasa hanya bersifat sementara karena ada saatnya untuk berbuka. Kaum beriman harus selalu memiliki energi untuk menghadapi segala bentuk tantangan. Semoga melalui ibadah puasa kita dapat menjadi pribadi yang terlatih membangun optimisme guna meraih kehidupan yang lebih baik. Meski untuk itu kita harus melalui proses jatuh bangun.

BAGIAN EMPAT
KREATIVITAS
MENGELOLA SEKOLAH

PROBLEM PUNGUTAN SEKOLAH

Setiap musim pendaftaran peserta didik baru tiba, selain disibukkan urusan teknis pendaftaran anak, para orang tua harus bersiap-siap mengeluarkan dana untuk kepentingan donasi pendidikan. Biasanya pungutan dana pendidikan dari orang tua oleh sekolah senantiasa mengiringi masa pendaftaran ini. Padahal pemerintah, mulai pusat hingga provinsi, kabupaten, dan kota sangat gencar mengampanyekan pendidikan gratis melalui slogan “sekolah harus bisa.” Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengeluarkan larangan menarik donasi pendidikan dari orang tua. Ini berarti pendidikan harus benar-benar gratis dan bebas dari segala bentuk pungutan. Pertanyaannya, benarkah pendidikan gratis dapat terwujud sehingga orang tua terbebas dari segala bentuk pungutan?

Jika pertanyaan tersebut diajukan pada sekolah swasta dan negeri rasanya jawaban yang diberikan relatif sama; pendidikan gratis hanya ada dalam kampanye. Sementara dalam realitanya, sekolah masih membutuhkan donasi dari orang tua untuk mencukupi dana operasional. Bagi sekolah swasta, persoalan donasi pendidikan memang tidak banyak men-

imbulkannya masalah. Bahkan sekolah swasta dapat memaksimalkan donasi pendidikan dari orang tua dengan jaminan peningkatan mutu layanan akademik. Sementara untuk sekolah negeri, persoalan donasi pendidikan dapat menjadi masalah sensitif. Ini karena semua dana yang dibutuhkan sekolah negeri dikatakan telah dipenuhi pemerintah.

Tetapi yang perlu ditanyakan adalah apakah semua anggaran yang dibutuhkan sekolah telah dipenuhi pemerintah? Jawabannya ternyata belum. Bahkan beberapa sekolah negeri mengkhawatirkan terjadi kelambanan peningkatan mutu akibat belum optimalnya anggaran yang dikucurkan pemerintah. Hal ini jelas menjadi dilema bagi sekolah negeri.

Menanggapi problem tersebut pemerintah melimpahkan kesalahan pada sekolah karena dianggap kurang jeli dalam membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Akibat tidak dimasukkan dalam RAPBS maka beberapa kegiatan yang direncanakan sekolah tidak dapat dibiayai. Alasan ini dapat dimaklumi karena proses penganggaran kegiatan saat ini memang berbasis pada kinerja. Namun demikian secara jujur harus diakui bahwa masih banyak sekolah yang belum terbiasa membuat RAPBS yang terencana dan terukur.

Karena itu, ketika ada pelarangan penarikan donasi, pihak sekolah pun kelimpungan. Apalagi selama ini ditinggalkan bahwa donasi pendidikan kemudian dijadikan “bisnis” sekolah. Pertanggungjawaban administrasi keuangan yang diperoleh dari donasi pun tidak serumit anggaran yang diperoleh dari pemerintah. Kondisi ini menjadikan sekolah nyaman menarik donasi dari orang tua dengan alasan peningkatan mutu, fasilitas, dan kegiatan ekstra.

Perdebatan mengenai donasi pendidikan merupakan cermin kebingungan kelompok elit, pejabat publik,

dan praktisi pendidikan. Kelompok elit dan pejabat publik merasa bingung karena ternyata biaya pendidikan terus meningkat. Sementara rakyat berada dalam situasi kehidupan sosial ekonomi yang semakin sulit. Padahal masalah pendidikan merupakan amanah konstitusi yang harus ditunaikan pemerintah.

Jika mau melakukan refleksi ke belakang, maka para pejabat publik ini pasti akan malu karena ternyata belum dapat memenuhi janji-janji politik yang pernah diutarakan. Di antara janji politik yang sering dikemukakan adalah menyelenggarakan pendidikan gratis. Karena itu pemerintah pun berkomitmen mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen untuk bidang pendidikan. Dengan dana sebesar ini, maka rakyat seharusnya dibebaskan dari seluruh pungutan. Faktanya, jangankan menyelenggarakan pendidikan gratis. Realitas malah menunjukkan bahwa biaya pendidikan semakin mahal.

Dalam kondisi tertekan karena belum mampu merealisasikan janji politiknya, pemerintah pun menempuh kebijakan melarang penarikan donasi. Sangat disayangkan, banyak sekolah yang merespon kebijakan ini dengan cara reasioner. Misalnya, dengan menyatakan bahwa program peningkatan mutu akan berjalan lambat jika penarikan donasi dilarang. Bahkan ada juga sekolah yang mengancam akan meniadakan kegiatan ekstrakurikuler yang semestinya menjadi wadah pembinaan bakat dan ajang prestasi peserta didik. Tentu saja cara yang ditempuh pihak sekolah ini tidak pada tempatnya. Jika ini yang dilakukan maka yang dirugikan tentu peserta didik karena tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal.

Ancaman beberapa sekolah untuk mengurangi kegiatan peningkatan mutu dan ekstrakurikuler akibat larangan menarik donasi menunjukkan tipologi kepemimpinan yang sangat

birokratis. Tipe kepemimpinan seperti ini biasanya senantiasa menggantungkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari atasan. Tidak ada inovasi dan kreativitas yang muncul dari pemimpin yang birokratis ini.

Pola berpikir linear dari kepala sekolah-birokrat ini akan selalu menempatkan donasi dari pemerintah dan orang tua sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa masih banyak kelompok masyarakat lain, seperti dunia usaha dan industri yang dapat diajak membantu sekolah.

Fenomena ini jelas sangat bertentangan dengan semangat mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang telah sekian lama digalakkan. MBS mengajarkan prinsip pelimpahan wewenang yang seluas-luasnya pada sekolah untuk membuat keputusan sesuai kebutuhan. Tentu saja keputusan ini harus terlebih dulu dibicarakan melalui proses *sharing* dengan *stakeholder* sekolah.

Di dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan sekolah, seorang kepala sesungguhnya dapat memaksimalkan fungsi komite. Termasuk dalam merespon larangan menarik donasi dari orang tua, kepala sekolah dapat membicarakan dengan komite tanpa harus mengorbankan hak tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Tenaga pendidik tentu harus selalu meng-*upgrade* kemampuan dan wawasannya agar tidak ketinggalan. Demikian juga tenaga kependidikan berhak mendapat pembinaan berupa tambahan keterampilan. Sementara peserta didik berhak mendapatkan layanan terbaik dari sekolah. Untuk mewujudkan kondisi ini tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Yang menyedihkan, ternyata fungsi komite di sekolah belum banyak diberdayakan. Komite baru difungsikan jika ada program mencairkan dana bantuan seperti Bantuan Operasion-

al Sekolah (BOS), *block grant*, dan hibah. Bahkan di beberapa tempat, seringkali terjadi hubungan yang tidak harmonis antara kepala sekolah dan komite. Kepala sekolah seringkali memosisikan komite sebagai pengawas kinerja sehingga dapat membahayakan posisinya.

Padahal dalam kasus polemik donasi pendidikan, posisi komite sangat strategis. Komite dapat menjadi penghubung keinginan sekolah dan *stakeholder*. Komite sekolah dapat memainkan peran agar mereka yang kaya mau memberikan donasi lebih guna membantu sekolah. Sementara mereka yang miskin dapat merasakan subsidi dari yang kaya sehingga bebas biaya pendidikan. Yang terpenting dan harus dilakukan sekolah adalah memberikan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel pada *stakeholder* sekolah.

LARANGAN PENDAFTARAN LEBIH AWAL

Setiap menjelang tahun ajaran baru, para orang tua berancang-ancang memilhkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Pihak sekolah pun bersiap melakukan penerimaan agar dapat memperoleh peserta didik sebagaimana yang ditargetkan. Setiap sekolah tentu berusaha menarik minat calon wali peserta didik dengan menunjukkan keunggulannya. Beragam *branding* yang menunjukkan keunggulan pun ditawarkan sekolah untuk menarik minat. Ada yang mem-*branding* sebagai sekolah prestasi, sekolah kreatif, sekolah anak shalih, sekolah integral, sekolah terpadu, sekolah alam, dan yang tidak pernah ketinggalan sukses ujian nasional 100 persen.

Dibanding sekolah negeri, sekolah swasta pasti akan melakukan promosi yang lebih gencar. Ini karena sekolah swasta sangat mengandalkan donasi dari orang tua untuk mendukung pengembangan pendidikan. Jumlah peserta didik bagi sekolah swasta sangat berpengaruh pada biaya operasional. Karena itu dapat dipahami jika banyak sekolah swasta menaruh perhatian yang sangat besar pada penerimaan peserta didik baru.

Jika tidak sukses, bukan hanya biaya operasional sekolah yang terganggu. Ancaman yang lebih besar adalah penutupan atau pencabutan ijin karena ada regulasi mengenai

jumlah rombongan belajar minimal yang harus dipenuhi sekolah. Yang menarik, kompetisi saat masa pendaftaran peserta didik baru tidak hanya terjadi antar sekolah swasta, tetapi juga antara sekolah swasta dengan sekolah negeri yang menawarkan program pendidikan gratis.

Masa ini sering diwarnai tarik menarik kepentingan antara dinas pendidikan (Dispendik) dan sekolah swasta. Persoalan yang diperdebatkan seputar mekanismenya. Secara resmi Dispendik kabupaten dan kota umumnya melarang sekolah melakukannya sebelum waktunya. Sementara sekolah swasta dengan alasan ingin memanfaatkan kepercayaan dan minat masyarakat telah melaksanakannya jauh hari. Dengan sistem *indent*, sekolah swasta telah melaksanakannya sepanjang tahun. Bahkan saat ini beberapa sekolah swasta favorit di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, telah menyelesaikan alias sudah tidak lagi menerima pendaftaran peserta didik. Yang menarik, sistem *indent* juga memberi peluang pada orang tua mendaftarkan anaknya untuk tahun pelajaran yang akan datang. Tidak heran jika ada sekolah swasta unggulan telah memiliki sejumlah calon peserta didik untuk beberapa tahun mendatang.

Akhir-akhir ini memang terjadi kesadaran yang luar biasa dari masyarakat untuk memilih pendidikan anak di sekolah berkualitas. Ini jelas realitas yang patut disyukuri karena bisa menjadi peluang bagi sekolah, terutama sekolah swasta berkategori unggulan. Bahkan di kalangan masyarakat kelas sosial ekonomi menengah ke atas, biaya pendidikan super mahal yang ditentukan sekolah swasta unggulan tidak lagi dipersoalkan. Yang terpenting bagi mereka, anaknya dapat memperoleh layanan pendidikan yang terbaik.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bermutu bagi anak tampaknya terus meningkat. Bahkan ada sebagian orang tua yang mempersepsi bahwa sekolah yang

mematok donasi tinggi pasti diikuti pelayanan akademik yang maksimal. Kelompok masyarakat yang berpandangan demikian inilah yang ingin dimanfaatkan sekolah swasta unggulan. Akibatnya muncul kesan komersialisasi pendidikan yang ditunjukkan dengan mahalnya biaya sekolah. Tetapi, sepanjang biaya pendidikan itu diperoleh dari *stakeholder* yang berkomitmen tinggi untuk mengembangkan pendidikan, sesungguhnya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Yang penting, pihak sekolah dapat mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, transparan, dan akuntabel. Akan lebih baik jika sekolah bertipe ini memberikan beasiswa bagi anak-anak yang cerdas tetapi dari keluarga miskin.

Harus diakui, jumlah sekolah swasta berkategori unggulan memang belum banyak. Umumnya sekolah swasta itu berkategori kecil dengan *stakeholder* kelas menengah ke bawah. Sekolah tipologi ini pasti mengalami kesulitan bersaing untuk mendapat peserta didik saat pendaftaran. Apalagi pemerintah kini banyak membuat kebijakan yang terasa kurang berempati pada sekolah swasta: pendirian sekolah baru, ketidakadilan dalam pendanaan, dan kampanye pendidikan gratis. Bagi sekolah swasta unggulan, kebijakan ini pasti tidak akan berdampak karena punya *stakeholder* yang mapan. Tetapi, bagi sekolah swasta berkategori kecil, beberapa kebijakan pemerintah itu terasa sangat berat.

Karena kompetisi yang begitu ketat untuk mendapatkan peserta didik baru, sekolah swasta berkategori besar dan kecil berinisiatif untuk melakukan pendaftaran lebih awal. Bagi sekolah swasta, jika ia dilakukan berdasarkan ketentuan Dispendik maka sangat mungkin tidak akan memperoleh peserta didik seperti yang ditargetkan. Ini karena mayoritas masyarakat masih menempatkan sekolah negeri sebagai pilihan utama dengan alasan biaya pendidikan yang murah dan bahkan gratis. Apalagi jika sekolah negeri itu berkategori

unggulan dan favorit. Sekolah negeri berkategori ini pasti akan diserbu orang tua. Sementara sekolah swasta harus menerima kenyataan dijadikan alternatif yang kesekian.

Faktanya, banyak orang tua yang menjadikan sekolah swasta sebagai alternatif jika anaknya benar-benar ditolak di negeri. Kondisi ini jelas sangat tidak menguntungkan sekolah swasta. Apalagi waktu penftaran yang ditentukan pemerintah biasanya sangat mepet dengan dimulainya tahun pelajaran baru. Karena itulah banyak sekolah swasta melakukannya sebelum dibuka secara resmi oleh pemerintah. Dengan demikian menjadi tidak relevan larangan untuk melaksanakan pendaftaran mendahului ketentuan Dispendik.

Pemerintah harus menyadari, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak akan pernah dapat dilakukan sendiri. Ini karena pemerintah memiliki keterbatasan pendanaan, sarana prasarana, dan sumber daya. Padahal menurut amanah konstitusi pemerintah berkewajiban memberikan layanan terbaik bagi warga bangsa untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Pada konteks inilah pemerintah membutuhkan pihak swasta untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas mulia, yaitu mendidik anak.

Dengan menjadikan pihak swasta sebagai mitra, maka tugas mendidik anak akan terasa ringan. Ini berarti yang dibutuhkan adalah mensinergikan program pemerintah dan swasta sehingga terwujud sistem pendidikan nasional yang unggul. Sudah saatnya, paradigma berkompetisi antara pemerintah dan swasta diubah menjadi bersinergi. Dalam kaitan inilah pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih berempati pada sekolah swasta, termasuk peraturan mengenai pendaftaran peserta didik baru.

PENDIDIKAN GRATIS DAN NASIB SEKOLAH SWASTA

Kampanye pendidikan gratis melalui slogan “sekolah harus bisa” yang dicanangkan pemerintah benar-benar menyisakan persoalan serius bagi sekolah swasta. Hal ini dikarenakan selama ini sekolah swasta banyak mengandalkan donasi pendidikan dari masyarakat, terutama wali peserta didik. Tegasnya, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan swasta selama ini sangat bergantung pada komitmen kelompok-kelompok di masyarakat yang menjadi *stakeholder* sekolah.

Sejarah perkembangan sekolah swasta juga selalu tumbuh dari masyarakat. Bahkan tidak sedikit sekolah swasta yang kini menjelma menjadi besar dan mapan berasal dari wakaf seseorang yang kemudian dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh para pengurusnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi sekolah swasta sesungguhnya lebih banyak ditentukan militansi perjuangan para guru, kepala sekolah, dan pengurusnya.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi bagian dari bidang yang dapat dikelola secara profit. Fenomena ini dapat diamati melalui bebera-

pa sekolah swasta yang tumbuh dan berkembang dengan dimodali sekelompok orang kaya yang bergabung dalam suatu yayasan pendidikan. Segala kebutuhan operasional pendidikan sekolah ini ditanggung oleh yayasan.

Sebagai timbal balik, yayasan menarik donasi pendidikan dari *stakeholder* sekolah. Bahkan tidak sedikit sekolah swasta ini berhasil menjadi lembaga pendidikan berkategori besar dan mapan. Sekolah berkategori inilah yang kemudian berani menentukan biaya pendidikan dalam jumlah yang sangat tinggi karena dijual adalah layanan akademik dan non-akademik yang memuaskan bagi *stakeholder*. Bahkan dapat dikatakan bahwa layanannya telah melebihi standar yang ditentukan oleh pemerintah.

Bagi sekolah swasta berkategori besar dan mapan, kampanye pendidikan gratis barangkali tidak banyak berpengaruh. Sebab, sekolah berkategori ini biasanya telah memiliki pelanggan tersendiri. Mayoritas pelanggan sekolah ini adalah kelompok menengah ke atas. Persoalan donasi pendidikan bagi *stakeholder* sekolah swasta berkategori besar dan mapan tentu tidak lagi menjadi masalah. Bahkan sebagian besar *stakeholder* sekolah ini meyakini bahwa lembaga pendidikan yang berkualitas memang seharusnya dijual dengan harga yang mahal.

Sebaliknya, lembaga pendidikan yang dijual murah biasanya berkualitas rendah. Mereka tidak pernah mempersoalkan mahalnnya biaya pendidikan. Sebab, bagi mereka yang penting adalah kepuasan peserta didik dan orang tua karena mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Fenomena ini dapat diamati dari beberapa sekolah swasta berkategori besar dan mapan seperti, al-Hikmah, al-Falah, Sekolah Alam Insan Mulia, serta beberapa sekolah di bawah binaan Muhammadiyah dan Ma'arif.

Tetapi, rasanya masih sangat sedikit sekolah swasta yang berkategori besar dan mapan. Kebanyakan sekolah swasta yang ada saat ini berkategori menengah ke bawah. Bahkan dapat dikatakan bahwa mayoritas sekolah swasta di beberapa daerah adalah berkategori kecil dengan fasilitas seadanya. Biasanya donasi pendidikan sekolah bertipe ini bersumber dari masyarakat dan pemerintah. Dana dari masyarakat dihimpun melalui tarikan dalam bentuk SPP, dana pembangunan, sumbangan kegiatan pembelajaran intra dan ekstrakurikuler, dan donatur *stakeholder*.

Sementara dana bantuan pemerintah yang diterima dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beberapa *block grant* digunakan untuk menggaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangan sarana prasarana. Akibat kampanye pendidikan gratis yang digelorkan pemerintah, mayoritas sekolah swasta berkategori kecil harus membebaskan peserta didik dari segala bentuk tarikan. Hal ini dilakukan karena pemerintah menganggap telah banyak memberikan bantuan operasional pendidikan, termasuk pada seluruh sekolah swasta.

Yang menjadi persoalan sekolah swasta berkategori kecil adalah jika bantuan pemerintah tidak diterima secara rutin. BOS memang diberikan setiap bulan berdasarkan jumlah peserta didik. Tetapi, berdasarkan pengalaman beberapa sekolah menunjukkan bahwa BOS tidak mesti keluar setiap bulan. Bahkan terkadang pencairan dana BOS mengikuti jadwal pemerintah dalam pencairan anggaran dalam setiap tahun.

BOS juga menghadirkan persoalan bagi sekolah swasta yang memiliki jumlah rombongan belajar kecil. Jika mengandalkan BOS tentu tidak mencukupi kebutuh-

an menggaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Belum lagi dana operasional sekolah yang secara berkala harus dikeluarkan. Fakta ini jelas menunjukkan problem riil yang dihadapi sekolah swasta ketika berhadapan dengan kampanye pendidikan gratis.

Tantangan terbesar yang segera dihadapi sekolah swasta berkaitan dengan kampanye pendidikan gratis adalah musim pendaftaran peserta didik baru yang kini sedang dilaksanakan. Sekolah swasta harus bersaing memperebutkan peserta didik baru dengan sekolah pemerintah dan sekolah swasta lain. Sekolah pemerintah dengan daya tarik berupa SPP gratis, fasilitas memadai, dan sumber daya manusia yang mapan, akan tetap menjadi primadona bagi masyarakat.

Dengan posisi seperti ini sekolah pemerintah akan berada di atas angin. Bahkan sekolah pemerintah dapat dengan mudah memperoleh peserta didik baru yang berkualitas melalui sistem seleksi yang sangat ketat. Sementara sekolah swasta, terutama yang berkategori kecil, harus menerima kenyataan mendapatkan peserta didik baru dengan kualitas yang seadanya. Bagi sekolah swasta, memperoleh peserta didik baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan sudah harus disyukuri. Sebab, ada banyak sekolah swasta yang harus menerima kenyataan tidak memperoleh jumlah peserta didik sebagaimana yang diharapkan.

Bagi sekolah swasta, jumlah peserta didik akan sangat menentukan besaran dana operasional yang dapat dihimpun. Jika jumlah peserta didik berlebih maka dipastikan pemasukan donasi pendidikan akan cukup untuk membiayai operasional pendidikan. Bahkan sebagian dana dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi guna mengembangkan sekolah. Tetapi, jika jumlah peserta didik berkurang,

maka pengurus harus berusaha mencari kekurangan dana dari sumber lain. Fakta inilah yang menyebabkan banyak sekolah swasta mempertaruhkan eksistensinya pada setiap musim pendaftaran peserta didik baru.

Berkaitan dengan kampanye pendidikan gratis, maka yang perlu dilakukan sekolah pemerintah adalah berempati pada sekolah swasta ketika melakukan pendaftaran peserta didik baru. Sekolah pemerintah dengan fasilitas sekolah gratis harus dapat menahan diri untuk tidak terlalu bernafsu memperoleh peserta didik sebanyak mungkin. Yang perlu dilakukan adalah menerima peserta didik sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah pemerintah dapat memilih sekolah swasta sesuai dengan yang dikehendaki.

Sikap berempati ini perlu dikembangkan sebab tidak mungkin fasilitas sekolah pemerintah mampu menampung seluruh peserta didik. Di sinilah fungsi sekolah swasta sebagai patner sekolah pemerintah dapat bersinergi melakukan tugas mulia yang diamanahkan konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih dari itu, yang juga perlu dilakukan pemerintah adalah mendistribusikan anggaran pendidikan secara lebih proporsional dan berkeadilan bagi sekolah pemerintah dan sekolah swasta. Jika sikap berempati ini tidak dijalankan maka pemerintah berarti telah membunuh kiprah sekolah swasta.

MENYIKAPI KEBIJAKAN SEKOLAH GRATIS

Sejak Januari 2011, Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program sekolah gratis untuk SD, SMP, dan SMA. Program ini terus digulirkan pada 2012. Tujuannya adalah memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengakses pendidikan. Sebagai konsekwensinya, pemerintah telah menyiapkan bantuan operasional pendidikan (Bopda) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan. Dengan Bopda maka sekolah diharapkan tidak lagi menarik donasi dari orang tua, termasuk sumbangan pengembangan pendidikan (SPP).

Kebijakan sekolah gratis jelas menjadi angin segar bagi masyarakat. Orang tua pun tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menyekolahkan anaknya. Ini karena kebijakan sekolah gratis menekankan bahwa orang tua dibebaskan dari segala bentuk pungutan. Bagi pemerintah, kebijakan ini sekaligus menjadi payung hukum untuk memaksa orang tua agar menyekolahkan anaknya. Kebijakan ini juga sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di samping memberikan dampak positif, kebijakan sekolah gratis sesungguhnya banyak menyimpan persoalan. Bukan han-

ya sekolah swasta, kebijakan ini juga berdampak pada sekolah negeri. Ini karena sekolah negeri pasti akan mengalami kendala, terutama dalam kaitan dengan keinginan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Karena terkendala keterbatasan anggaran akibat tidak boleh menarik donasi, maka sekolah pun menerapkan kebijakan untuk memangkas beberapa kegiatan yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi peserta didik. Kondisi ini jelas sangat berbahaya karena dapat mengurangi kualitas pendidikan.

Dampak kebijakan sekolah gratis akan semakin terasa bagi sekolah negeri yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sebab, sekolah RSBI jelas membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan operasional dan penjaminan mutu. Jika ini yang terjadi maka yang dirugikan adalah *stakeholder* pendidikan, terutama peserta didik karena semestinya memperoleh layanan pendidikan yang maksimal. Kekhawatiran *stakeholders* terhadap penurunan layanan mutu pendidikan seiring dengan kebijakan sekolah gratis rasanya sangat beralasan.

Karena itu pemerintah perlu menjelaskan kebijakan pendidikan gratis ini secara jujur dan transparan. Jangan karena termotivasi ingin menyelenggarakan pendidikan gratis, tetapi program peningkatan mutu malah berjalan lambat akibat sekolah tidak boleh menarik donasi dari orang tua. Apalagi jika kebijakan ini dilatarbelakangi motif politik ingin membangun bahwa pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan gratis. Padahal faktanya tidak pernah ada pendidikan yang benar-benar gratis. Fakta ini terjadi di sekolah negeri dan swasta.

Dalam rangka memberikan layanan yang terbaik terhadap *stakeholders*, pihak sekolah sesungguhnya dapat memaksimalkan fungsi komite. Termasuk dalam merespon larangan pemerintah untuk menarik donasi dari orang tua. Komite dapat men-

jadi penghubung keinginan sekolah dengan *stakeholder* untuk mengembangkan pendidikan.

Dalam situasi pendidikan yang semakin kompetitif sesungguhnya banyak orang tua yang tidak lagi peduli dengan persoalan biaya pendidikan asalkan anaknya mendapatkan layanan terbaik. Hal ini dapat dibuktikan dengan eksistensi sekolah-sekolah swasta berkategori unggulan yang tidak pernah sepi peminat meski biaya pendidikannya sangat tinggi. Bagi orang tua yang *high class* ini, sekolah yang menetapkan biaya murah dianggap tidak berkualitas karena pasti tidak diurus dengan serius.

Sebaliknya, sekolah yang mahal dimaknai sebagai pendidikan bermutu tinggi. Hal ini tentu dapat menjadi peluang bagi sekolah swasta untuk menggaet orang tua peserta didik yang kaya dan berkomitmen baik terhadap pengembangan pendidikan. Yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi dan melakukan pendekatan pada mereka.

Dalam konteks inilah komite sekolah dapat memainkan peran agar orang tua yang kaya mau memberikan donasi lebih guna membantu sekolah. Sementara mereka yang miskin dapat merasakan subsidi sehingga bebas biaya pendidikan di sekolah-sekolah unggulan. Yang terpenting dan harus dilakukan sekolah adalah memberikan pertanggungjawaban secara jujur, transparan, dan akuntabel.

OPTIMALISASI SUMBER DAYA STAKEHOLDERS

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) salah satunya bergantung pada peranan masyarakat. Selama ini peranan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penggalangan dana yang disalurkan melalui wadah yang dulu dikenal dengan nama Badan Pembantu Pelaksana Pendidikan (BP3). Saat ini peranan BP3 telah digantikan lembaga semacam *Board of Education*, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Ikatan Wali Peserta didik (Ikwam). Sementara berkaitan dengan masalah strategis, seperti penyusunan visi, misi, dan Rencana Induk Pengembangan (RIP), masyarakat belum dilibatkan

Jika belajar pada pengalaman negara yang maju di bidang pendidikan maka pasti ditemukan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam pendidikan biasanya diwujudkan melalui lembaga seperti *School Council*, *Parent and Community Association*, dan *Parent and Teacher Association*. Semua lembaga ini memiliki kewenangan terlibat bersama sekolah menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan *curriculum statement* dan *curriculum profiles* yang dikeluarkan pemerintah.

Secara jujur harus diakui masyarakat kita masih sangat sulit diajak terlibat aktif dalam pendidikan. Hal ini

salah satunya dikarenakan adanya *impresi* yang salah dari masyarakat mengenai pendidikan. Misalnya, dikatakan bahwa tanggung jawab pendidikan mutlak berada di sekolah. Sementara keluarga dianggap tidak memiliki kontribusi apa pun terhadap kesuksesan anak. Padahal jika mau realistis, waktu anak tentu lebih banyak dihabiskan dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dibanding di sekolah.

Menurut survei PERC (berbasis di Hongkong), sistem pendidikan Indonesia dianggap terburuk di kawasan Asia. Sistem pendidikan Indonesia menurut PERC ditempatkan pada peringkat 12 dari 12 negara, setingkat di bawah Vietnam. Dalam hal ini PERC telah menganalisis sistem pendidikan 12 negara di Asia dengan menggunakan tiga indikator. Yakni, *impresi* masyarakat mengenai sistem pendidikan, penguasaan teknologi, serta penggunaan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.

Bukan hanya PERC, laporan *Human Development Index* (HDI) juga menyatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia berada pada urutan 102 dari 164 negara. Demikian juga dengan laporan *Internasional Institute for Development* (IID) yang menempatkan sistem pendidikan Indonesia pada peringkat 49 dari 49 negara. Kenyataan tersebut jelas merupakan sesuatu yang sangat ironi. Apalagi jika dikatakan bahwa sistem pendidikan kita kalah dengan Malaysia yang pada era 1980-an masih belajar di Indonesia.

Terkait faktor dukungan masyarakat, sebenarnya persoalan utama yang dihadapi adalah kurangnya kreativitas sekolah melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk memajukan pendidikan. Dalam hal ini masyarakat harus dipahami sebagai kelompok yang berkepentingan terhadap kemajuan sekolah (*stakeholders*). Mereka dapat berposisi sebagai wali peserta didik, kyai, aparat pemerintahan, tokoh politik, profesional, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan alumni. Karena itulah penting dilakukan analisis *stakeholder*

sehingga sekolah mengetahui dan dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki.

Pihak sekolah juga harus menyadari bahwa bantuan yang diberikan *stakeholders* tidak hanya berupa dana. Dalam hal ini penting dipahami beberapa wujud sumber daya masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Misalnya, pemikiran, informasi, perlindungan hukum, kondisi *learning society*, serta bimbingan dan penyuluhan. Mobilisasi sumber daya masyarakat juga dapat berupa barang. Bagi masyarakat di pedesaan, menyumbang uang bisa jadi merupakan hal yang berat. Mereka mungkin akan senang jika diminta menyumbang sesuai dengan produk masyarakat. Misalnya, hasil pertanian, nelayan, dan industri. Sumbangan dalam bentuk barang inilah yang kemudian diuangkan dan digunakan untuk pengembangan sekolah.

Potensi sumber daya *stakeholders* juga dapat berupa bantuan bimbingan dan penyuluhan. Berkaitan dengan ini perlu dilakukan revitalisasi fungsi wadah Badan Penyuluhan (BP). Sebab, selama ini BP hanya digunakan sebagai tempat bimbingan bagi anak nakal. Padahal BP seharusnya mampu menjadi sarana *sharing of experience*, misalnya dengan mengundang orang tua yang memiliki anak berprestasi untuk dimintai penjelasan mengenai kiat mendidik anak.

Pengalaman orang tua ini dapat ditularkan kepada wali peserta didik lain. Fungsi yang demikian dapat disebut *parenting*. Aktualisasi fungsi *parenting* juga dapat diwujudkan dalam bentuk bimbingan belajar, kursus, dan *conversation club*. Secara umum barangkali dapat dikatakan bahwa belum banyak sekolah yang menempatkan wali peserta didik sebagai *parenting*. Akibatnya, potensi mereka belum dapat dioptimalkan oleh sekolah.

MENUMBUHKAN CIVIC VALUES DI PESANTREN

Sejak September 2006 hingga Agustus 2008, saya bersama teman-teman di Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat (PuSAPoM) terlibat dalam kegiatan *Civic Education in Madrasah Tsanawiyah Affiliated With Pesantren*. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dengan *The Asia Foundation* (TAF). Sasaran dari kegiatan ini adalah guru-guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education/PKn*) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang ada di pesantren. Pada tahun pertama dari kegiatan ini dilibatkan sekitar 90 guru PKn di MTs yang tersebar di Kabupaten Malang, Blitar, dan Kediri. Selanjutnya pada tahun kedua jumlah peserta menjadi lebih banyak, 120 guru PKn, di MTs Kabupaten Malang, Kediri, Blitar, dan Lamongan.

Kegiatan tersebut tergolong menarik karena menjadikan lembaga pendidikan sebagai sarana penanaman nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) dengan cara menempatkan guru PKn di MTs sebagai ujung tombak. Lebih dari itu, penentuan lembaga pendidikan yang ada di pesantren sebagai sasaran kegiatan merupakan pilihan yang tepat. Sebab, jika kita berbicara mengenai pesantren tentu yang terbayang dalam

benak pikiran adalah institusi pendidikan Islam tradisional yang memiliki kultur kyai sentris, sulit berubah, eksklusif, dan kumuh. Dengan kultur seperti ini rasanya penanaman *civic values* di pesantren akan menghadapi persoalan besar. Meski demikian, harus diakui bahwa saat ini telah banyak pesantren yang telah mampu menampilkan wajah sebaliknya; modern, adaptif, inklusif, dan bersih.

Kegiatan penanaman nilai-nilai kewarganegaraan melalui lembaga pendidikan bisa jadi merupakan investasi jangka panjang. Sebab, melalui kegiatan inilah diharapkan akan terjadi proses sosialisasi, diseminasi, serta aktualisasi konsep, sistem nilai, dan budaya demokrasi melalui pendidikan. Penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan dirasa menemukan momentumnya seiring dengan kondisi bangsa kita yang sedang mengalami masa transisi dalam berdemokrasi. Dalam jangka panjang kegiatan ini juga diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang paham mengenai makna demokrasi dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sayangnya, untuk menyukseskan program ini tentu bukan perkara yang mudah. Apalagi ini berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) yang tentu telah memiliki kultur tersendiri. Meski barangkali akan memunculkan resistensi, tetapi dengan keinginan yang kuat untuk mengubah kultur di masyarakat (termasuk di pesantren), rasanya usaha untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kewarganegaraan di pesantren bukan sesuatu yang mustahil direalisasikan. Bukankah ajaran mengenai demokrasi sebagai salah satu pilar *civic values* juga merupakan bagian dari nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam ajaran agama Islam?

Berdasar hasil kajian tim peneliti di PuSAPoM, ternyata pada sebagian besar guru Pendidikan Agama Islam dan guru PKn di MTs, putra kyai (Gus), serta kyai, sesungguhnya

nya telah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang kewarganegaraan (*civic knowledge*). Tetapi, sangat disayangkan jika pemahaman yang baik tersebut belum teraktualisasikan dalam bentuk sikap dan watak (*civic disposition*) dan perilaku sehari-hari (*civic skill*).

Gejala ini cukup menunjukkan bahwa dalam tingkat tertentu mereka telah mengalami kepribadian yang terbelah (*split personality*). Mereka dapat memahami dengan baik makna demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan masyarakat madani (*civil society*). Tetapi, jika mencermati watak, sikap, dan perilaku yang ditunjukkan tampak jelas bahwa mereka belum sepenuhnya menunjukkan pribadi yang berjiwa demokratis. Hal ini di antaranya dapat diamati dari sikap mereka terhadap berbagai persoalan aktual, seperti toleransi, pluralisme, egalitarianisme, proses pengambilan keputusan, dan praktik pembelajaran di kelas.

Bahkan pada sebagian komunitas pesantren tampak masih ada upaya untuk menyeragamkan tata cara (*kaiifiyah*) ibadah. Padahal persoalan *kaiifiyah* ibadah jelas merupakan bagian dari masalah *furu'iyah* yang senantiasa diperdebatkan dan hingga kapan pun tidak akan dapat dipertemukan. Tentu saja kenyataan seperti ini cukup menjadi bukti bahwa sebagian komunitas pesantren belum memberikan pengakuan terhadap pluralitas pendapat di kalangan pesantren.

Padahal dalam kenyataannya, keragaman dan kemajemukan merupakan suatu keniscayaan. Apalagi dalam ajaran Islam jelas dikatakan bahwa perbedaan pendapat (di kalangan umat yang terpelajar) adalah rahmat. Komunitas madrasah dan pesantren jelas termasuk kelompok terpelajar sehingga memungkinkan tumbuh sifat setuju dalam perbedaan (*agree in disagreement*).

Sementara dalam kaitan dengan pola hubungan guru dan

peserta didik, serta santri dan kyai, juga masih menunjukkan adanya kesenjangan. Jika dalam *civic values* diajarkan prinsip-prinsip kesetaraan (egalitarianisme), maka yang sering terjadi dalam hubungan guru dan peserta didik di madrasah serta hubungan santri dan kyai di pesantren, masih tampak jelas diwarnai kultur feodal dan patrimonial. Hal ini di antaranya dapat diamati dalam proses pembelajaran, baik di madrasah maupun pesantren. Di madrasah biasanya praktik pembelajaran yang dominan adalah ceramah. Hampir tidak ada kesempatan bagi seorang peserta didik untuk berinteraksi secara dialogis dengan gurunya. Pembelajaran yang searah (monolog) jelas menunjukkan belum berkembangnya nilai-nilai demokrasi di madrasah dan pesantren.

Sementara di pesantren, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan sistem sorogan, berasal dari kata *sorog* (bahasa Jawa), yang berarti menyodorkan. Pada pembelajaran model sorogan setiap santri menyodorkan kitab yang telah dibaca di hadapan kyai atau pembantu kyai (*badal*). Sistem sorogan ini termasuk belajar secara individual, di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru. Di pesantren juga dikenal metode pembelajaran wetonan/bandongan. Istilah *weton* ini berasal dari kata *wektu* (bahasa Jawa) yang berarti waktu. Dinamakan metode wetonan karena pembelajaran kitab kepada santri dilakukan pada waktu-waktu tertentu, misalnya sebelum atau sesudah shalat fardlu.

Metode wetonan ini merupakan metode kuliah, di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai yang menerangkan pelajaran seperti halnya kuliah. Di sini santri menyimak kitab masing-masing dan membuat beberapa catatan yang dianggap penting. Melengkapi metode sorogan dan wetonan/bandongan, di pesantren juga mengenal metode musyawarah (*bahtsul masa'il*), hapalan, praktik

ibadah, dan ceramah/pengajian. Sangat disayangkan jika metode-metode pembelajaran di pesantren belum memberikan ruang yang leluasa bagi santri untuk dapat berinteraksi secara timba balik dengan ustadz atau kyai.

Kultur di pesantren juga belum memberikan peluang yang memungkinkan *stakeholders* dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan kultur kepemimpinan kharismatik yang dikembangkan di pesantren. Kyai dapat memegang peranan yang sangat dominan dalam keseluruhan proses pengambilan kebijakan. Tidak heran jika posisi kyai dan keluarganya menjadi sangat sentral. Rasanya tidak dapat dibayangkan apa jadinya jika ada santri yang berani bertanya kepada pengelola pesantren mengenai transparansi keuangan. Barangkali peserta didik tersebut akan langsung dikatakan sebagai telah berlaku buruk (*su'ul adab*).

Seluruh persoalan tersebut semakin menambah keyakinan bahwa penanaman *civic values* melalui lembaga pendidikan, khususnya madrasah dan pesantren menjadi sangat penting. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan. Maka lembaga pendidikan akan dinilai berhasil jika mampu meletakkan dasar-dasar kehidupan yang demokratis bagi peserta didiknya.

URGENSI PENDIDIKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tidak diragukan lagi, Surabaya kini sedang memantapkan *branding* baru sebagai kota hijau dan bersih. Melalui fasilitas taman yang tersedia di beberapa sudut kota, warga metropolis seakan dimanjakan dengan sarana bermain sambil menikmati indahnya tetumbuhan dan udara yang segar. Kesadaran warga kota terhadap lingkungan juga semakin meningkat. Untuk mengapresiasi kesadaran warga, pemerintah kota Surabaya juga mengadakan even tahunan melalui program *Awarding Surabaya Green and Clean*. Melalui program ini kampung-kampung di Surabaya diajak untuk beradu bersih, sehat, dan hijau.

Program Surabaya *Green and Clean* terasa akan semakin masif dampaknya jika pemerintah juga bersinergi dengan berbagai komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan. Khusus lembaga pendidikan, kini beberapa sekolah juga sedang mengembangkan pendidikan *clean, green, and hygiene* (CGH). Melalui program ini sekolah ingin menjadikan tempat belajar peserta didik bersih, sehat, dan hijau. Pendidikan CGH bertujuan untuk menanamkan kesadaran berbagai komponen di sekolah mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dengan menjadikan

lingkungan bersih, sehat, dan hijau, berarti lembaga pendidikan turut mengatasi problem pemanasan global (*global warming*).

Pendidikan CGH sangat mungkin dikembangkan dengan prinsip tidak menambah beban kurikulum. Ini berarti seluruh unsur di sekolah, mulai kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua, tidak perlu khawatir dengan kehadiran pendidikan CGH. Sebab, pendidikan CGH dapat ditempuh dengan cara menyisipkan (*inserting*) pada mata pelajaran yang relevan. Dengan metode ini berarti materi CGH tidak akan pernah menjadi mata pelajaran tersendiri.

Unsur-unsur di sekolah perlu disadarkan mengenai pentingnya menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan hijau. Dengan kondisi lingkungan seperti itu, peserta didik akan merasa nyaman belajar. Realitas memang menunjukkan bahwa sekolah umumnya tidak memiliki lahan yang cukup untuk bercengkerama dan bermain bagi peserta didik. Akibatnya, peserta didik merasa bosan jika harus berlama-lama di sekolah karena lingkungannya panas, pengap, dan berdebu.

Pada konteks inilah pendidikan CGH mutlak diperlukan. Yang perlu ditekankan bahwa untuk menjadikan sekolah berwawasan lingkungan hidup sesungguhnya dapat ditempuh dengan cara yang mudah. Misalnya, pengadaan tanaman yang ditempatkan di teras depan kelas. Meski terkesan sederhana tetapi banyak sekolah yang belum melakukan hal ini. Padahal cara ini dapat menyebabkan udara terasa segar dan lingkungan pun menjadi hijau.

Pilihan untuk menyisipkan materi CGH dalam beberapa mata pelajaran didasarkan pada kenyataan bahwa kurikulum yang ada sudah sangat gemuk. Pembelajaran materi CGH pun dapat dilakukan dengan cara yang demonstratif. Misalnya, dengan membawa masuk tempat sampah yang sudah ditulisi sampah kering

dan sampah basah, atau sampah organik dan sampah anorganik. Guru cukup menjelaskan secara singkat jenis sampah dan selanjutnya peserta didik diajak berburu sampah yang ada di sekolah. Itu menunjukkan bahwa materi CGH tidak mesti diajarkan di kelas. Peserta didik dapat diajak berkeliling untuk mengamati problem lingkungan yang terjadi di sekolah dan sekitarnya.

Proses pembelajaran tersebut dinamakan berparadigma konstruktivis. Melalui metode konstruktivis peserta didik memperoleh pengalaman mengamati lingkungan, menemukan problem yang dihadapi, dan terlibat aktif merumuskan solusinya. Akhirnya, peserta didik menemukan alternatif jawaban dari hasil kerja sama dengan temannya. Pasti banyak kejadian menarik yang dapat ditemukan selama proses pembelajaran materi CGH di luar kelas.

Misalnya, jika ditemukan puntung rokok yang dibuang di sembarang tempat, maka peserta didik akan menyatakan bahwa ada guru yang merokok tapi tidak membuang sampah di tempatnya. Demikian juga ketika ditemukan bekas bungkus makanan yang berserakan, peserta didik akan saling mengingatkan. Jika pembelajaran materi CGH dilakukan dengan benar, menyenangkan, dan berkelanjutan, pasti dapat membangun budaya hidup bersih, sehat, dan hijau. Melalui cara ini peserta didik dapat dijadikan agen perubahan kultur di lingkungan sekitarnya sehingga lebih bersih, sehat, dan hijau.

Pembelajaran materi CGH juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, kegiatan keterampilan yang memanfaatkan sampah sebagai bahan dasar. Seorang guru dapat menjelaskan bahwa jenis sampah kering berupa plastik dan kertas termasuk yang sulit dihancurkan. Karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan plastik dan kertas sebagai bahan dasar

berbagai jenis keterampilan. Sementara untuk sampah basah peserta didik dapat diajari membuat kompos yang bermanfaat untuk memupuk tanaman. Melalui cara ini berarti guru telah mengajarkan peserta didik untuk mengatasi problem sampah dengan *reduce* (mengurangi), *reuse* (mengggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

Kegiatan ekstrakurikuler di bidang kesehatan juga dapat dijadikan media pembelajaran materi CGH melalui gerakan cuci tangan pakai sabun (CTPS). Peserta didik perlu dijelaskan bahwa mencuci tangan saja tidak cukup untuk menghilangkan bakteri yang melekat di tangan. Karena itu, mencuci tangan harus menggunakan sabun agar benar-benar bersih. Melalui pembelajaran ini peserta didik memperoleh pengalaman cara yang benar dan waktu yang penting untuk CTPS. Waktu yang penting CTPS adalah sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum memegang bayi, sebelum menceboki anak, dan sebelum menyiapkan makanan.

Kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun kelihatan sepele. Padahal banyak manfaat yang dapat diperoleh dari CTPS. Salah satunya adalah dapat menghindarkan diri dari ancaman penyakit diare. Menurut data *World Health Organization* (WHO) dikatakan bahwa diare dan pnemonia telah merenggut nyawa 3,5 juta balita setiap tahun. Data Kementerian Kesehatan RI pada 2006 juga menunjukkan bahwa diare telah menyebabkan 100 ribu anak Indonesia tidak sempat menikmati ulang tahunnya yang ke-5. Karena itulah pendidikan berwawasan lingkungan perlu ditanamkan sejak dini melalui pembiasaan hidup yang sehat pada anak-anak.

PENCEGAHAN HIV/AIDS MELALUI PENDIDIKAN

Seluruh dunia memperingatkan hari AIDS tepat pada 1 Desember. Di tengah peringatan hari AIDS dunia 2011 kita dikejutkan oleh hasil survei Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyatakan separo remaja perempuan telah mengadakan hubungan seks sebelum menikah, bahkan sebagian telah hamil. Rentang usia yang disurvei adalah 13-18 tahun. Hasil survei ini jelas sangat menyedihkan karena salah satu pintu masuk penularan HIV/AIDS adalah melalui seks bebas. Data Departemen Kesehatan RI dikatakan bahwa terdapat 50,07 persen kasus AIDS dialami oleh kelompok usia produktif 20-29 tahun dan 30-39 tahun.

Ini menunjukkan bahwa kelompok remaja sangat rentan tertular virus HIV/AIDS. Tentu saja, angka tersebut hanya didasarkan pada kasus yang diketahui berdasarkan laporan dan pemeriksaan di rumah sakit dan puskesmas. Sebab, sejujurnya fenomena HIV/AIDS seperti gunung es. Artinya, kelihatan sedikit di permukaan, tetapi yang belum diketahui sangat mungkin jauh lebih banyak.

Beberapa hasil penelitian juga menyatakan bahwa populasi tertinggi orang beresiko terkena HIV/AIDS ada-

lah pengguna napza suntik dan pasangannya, pekerja seks dan pelanggannya, waria dan pelanggannya, kelompok homoseksual, narapidana, dan transmisi prenatal. Khusus kelompok remaja, penyebab utama peningkatan penderita HIV/AIDS adalah karena mereka telah menjadi pecandu napza (narkotika, zat adiktif, dan psikotropika) melalui jarum suntik dan berperilaku seks bebas.

Di antara penyebab yang sangat mungkin mempengaruhi perilaku remaja sehingga rawan tertular HIV/AIDS adalah tiadanya informasi yang benar mengenai virus tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok remaja, terutama mereka yang sedang belajar di bangku sekolah, perlu dikenalkan bahaya penyakit HIV/AIDS. Pengenalan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki pengetahuan dan kecakapan hidup (*life skill*) untuk melakukan usaha preventif bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Dengan demikian, lembaga pendidikan sesungguhnya dapat dijadikan sarana yang efektif untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS.

Pengenalan HIV/AIDS melalui pendidikan juga dapat digunakan untuk menumbuhkan sikap berempati peserta didik terhadap penderita penyakit tersebut. Sebab, selama ini masyarakat terlanjur memberikan stigma negatif pada penderita HIV/AIDS. Misalnya, dikatakan bahwa penyakit HIV/AIDS adalah kutukan Tuhan. Penderita HIV/AIDS juga distigma sebagai orang yang telah berbuat dosa besar sehingga mendapat karma dari Tuhan. Karena itu penderita HIV/AIDS harus dikucilkan dari pergaulan.

Padahal dalam banyak kasus HIV/AIDS ditemukan bahwa seorang ibu rumah tangga yang baik sekalipun berpotensi terkena penyakit ini karena tertular dari suaminya. Seorang bayi yang tidak bersalah pun dapat terlahir dalam kondisi sudah positif HIV/AIDS karena tertular dari ibu-

nya. Kejadian ini menunjukkan bahwa penyebaran virus HIV tidak pernah pandang bulu.

Mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan penyakit HIV/AIDS maka informasi yang memadai mengenai penyakit ini sedini mungkin harus diberikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan. Melalui lembaga pendidikan kelompok remaja juga dapat memperoleh penjelasan bahwa HIV/AIDS tidak menular melalui interaksi sosial, seperti berjabat tangan, olah raga bersama, penggunaan kolam renang dan toilet bersama, serta bertukar alat makan. Karena itu memberikan stigma negatif dan bersikap diskriminatif terhadap penderita HIV/AIDS menjadi tidak benar.

Dalam konteks ini peserta didik dapat dijadikan agen memberikan informasi yang benar bahwa tidak ada halangan untuk melakukan kontak sosial dengan penderita HIV/AIDS. Ini berarti bahwa dalam kasus HIV/AIDS yang perlu dimatikan adalah penyakitnya, bukan orangnya.

Pencegahan HIV/AIDS melalui pendidikan dapat dilakukan dengan cara menyisipkan (*inserting*) dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Ini dimaksudkan agar peserta didik tidak terbebani dengan tambahan mata pelajaran baru. Hal ini perlu ditegaskan sebab tuntutan kurikulum terhadap peserta didik sudah demikian berat.

Yang terpenting adalah peserta didik memiliki kesadaran bahwa HIV/AIDS adalah jenis penyakit yang berbahaya, dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dan hingga kini belum ditemukan obatnya. Selain melalui sinergi dengan mata pelajaran dan kegiatan ekstra, pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan cara yang simpatik, seperti melalui pengajian, spanduk, *poster card*, musik, dan teater. Pesan jangan pernah mencoba narkoba dan *say not to drug and free sex*, harus selalu dikampanyekan di lingkungan sekolah.

Untuk mendukung program pencegahan HIV/AIDS di sekolah dapat dibentuk *Peer Education* (PE). PE dapat diartikan sebagai proses perkembangan pengetahuan, kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dilaksanakan seseorang kepada teman sebayanya. Untuk membentuk PE langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi peserta didik yang memiliki kesamaan karakter seperti usia, latar belakang sosial, dan jenis kelamin. Pendidikan melalui teman sebaya ini penting karena biasanya seseorang memiliki kecenderungan hanya mau belajar, mendengarkan nasehat, dan mencontoh perilaku orang lain yang memiliki kesamaan karakter dengan dirinya.

Dua perilaku remaja yang sangat rentan menjadi penyebab penularan HIV/AIDS adalah penggunaan jarum suntik napza secara bergantian dan seks bebas. Ini berarti lembaga pendidikan harus memberikan kontribusi riil untuk melakukan pencegahan. Berkaitan dengan hal ini unsur-unsur di lembaga pendidikan harus bersinergi untuk membentuk *peer group* dengan harapan agar penyebaran penyakit HIV/AIDS di kalangan remaja dapat diminimalkan. Kebersamaan pihak sekolah dan *peer group* ini mutlak diperlukan untuk mengawasi peserta didik agar tidak terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang dan pergaulan bebas.

Untuk kepentingan inilah sekolah perlu memberikan *life skill* pencegahan HIV/AIDS sejak dini. Hanya dengan cara inilah lembaga pendidikan dapat memberikan kontribusi untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya HIV/AIDS.

MASA DEPAN PTAI

Masyarakat selama ini mengenal Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) negeri dan swasta sebagai institusi pendidikan tinggi yang menekuni kajian ilmu-ilmu keislaman (*Islamic studies*). Kesan ini memang tidak salah, meski sejak awal 2000 sebagian PTAI Negeri telah membuka program studi umum seperti komunikasi, psikologi, sosiologi, ekonomi, politik, matematika, sains, bahkan kedokteran. Diversifikasi program studi ini dimaksudkan untuk menyongsong era persaingan antar perguruan tinggi yang kian kompetitif.

Strategi membuka program studi umum ini ternyata mampu meningkatkan minat masyarakat untuk belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN). Hal ini dapat diamati melalui peserta Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SN PTN). Bahkan beberapa program studi di IAIN dan UIN seperti ekonomi Islam, komunikasi, psikologi, dan kedokteran, memperoleh peminat yang cukup banyak. Ini berarti beberapa program studi yang dikembangkan PTAI sesungguhnya dapat bersaing dengan perguruan tinggi umum.

Disamping pertimbangan untuk meningkatkan peminat, PTAI juga mulai menyadari urgensi penyatuan berbagai

disiplin ilmu sehingga tidak terjadi pemisahan ilmu agama dan ilmu umum. Sebab selama kajian ilmu agama dan ilmu umum dilakukan secara terpisah sehingga hasilnya pasti parsial (*separated studies*). Dengan menjadikan kajian ilmu agama dan ilmu umum sebagai satu kesatuan maka akan terwujud pendekatan yang saling terkait (*interconnected approach*). Pendekatan interkoneksi ini penting agar produk keilmuan memiliki sandaran nilai-nilai moral-agama.

Pengembangan program studi umum di PTAI dengan sendirinya akan berimplikasi pada perubahan kelembagaan dari institut menjadi universitas. Karena itu banyak IAIN kini telah berubah menjadi UIN. Meski harus diakui, bahwa di internal Kementerian Agama (Kemenag) sesungguhnya terjadi silang pendapat tatkala beberapa IAIN berubah menjadi UIN.

Mereka yang menolak menyatakan bahwa perubahan itu pada saatnya akan mengakibatkan marginalisasi program studi ilmu-ilmu keislaman yang selama ini menjadi *core of competence* PTAI. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana masa depan sumber daya yang selama ini dipersiapkan untuk mengembangkan kajian ilmu-ilmu keislaman? Sementara mereka yang mendukung lebih menekankan pada tantangan yang dihadapi PTAI. Apalagi realitas menunjukkan bahwa peminat program studi ilmu-ilmu keislaman terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Mencermati fenomena tersebut berarti PTAI perlu melakukan diversifikasi program studi untuk disesuaikan dengan minat masyarakat. Dalam ilmu pemasaran (*marketing*) dikatakan bahwa salah satu syarat agar produk, termasuk jasa pendidikan, diminati pelanggan adalah harus ada kejelasan *brand* (merek atau label). Dalam perspektif ini berarti penting dipikirkan *brand* yang tepat bagi ilmu-ilmu keislaman yang dikembangkan PTAI.

Pemberian merek ini tentu berkaitan dengan *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Misalnya, harus ditentukan bahwa

lulusan PTAI adalah pribadi yang berakhlak mulia, ahli ilmu agama, menguasai ilmu-ilmu alat (bahasa Arab dan bahasa Inggris), hafal al-Qur'an, dan memiliki seperangkat ketrampilan (*vocational skill*) yang dibutuhkan masyarakat. Jika lulusan yang dicetak PTAI seperti ini rasanya tidak ada lagi yang perlu diragukan. Lulusan PTAI pasti individu yang bermutu sehingga berdaya saing tinggi. Dengan lulusan yang demikian, maka kepercayaan masyarakat pasti meningkat.

Branding yang juga penting diwujudkan adalah menjadikan PTAI sebagai pusat kajian ilmu-ilmu keislaman (*center for Islamic studies*). Ini berarti IAIN dan UIN harus menjadikan ilmu-ilmu keislaman sebagai yang terutama. Ini penting ditekankan karena banyak persoalan sosial keagamaan yang sesungguhnya membutuhkan sumbangsih IAIN dan UIN. Dintaranya adalah terorisme dan radikalisme sosial bernuansa agama yang berpotensi muncul setiap saat. Pertanyaannya, apa yang dikontribusi PTAI untuk mengatasi persoalan tersebut? Disinilah perlu pemikiran agar PTAI menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sosial keislaman.

Di samping menentukan *brand*, PTAI juga harus jeli melihat siapa sesungguhnya yang menjadi peminat dan pengguna lulusan (*user*). Secara konvensional dapat dikatakan bahwa peminat PTAI selama ini adalah lulusan lembaga pendidikan keislaman seperti madrasah dan pesantren. Jika pandangan ini benar berarti harus ada kerjasama yang saling menguntungkan antara PTAI dengan madrasah dan pesantren.

Mengenai pengguna lulusan memang sulit dijawab. Sebab, PTAI terkadang tidak mempersiapkan secara serius agar lulusannya menguasai bidang yang dibutuhkan pasar. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan tidak memiliki kecakapan minimal yang dibutuhkan agar dapat bersaing dalam kehidupan. Inilah tantangan terbesar yang dihadapi PTAI.

Sebab harus disadari, pendidikan tidak sekedar mempelajari ilmu di bangku kuliah. Yang lebih penting adalah menyiapkan lulusan yang siap menghadapi problem kehidupan.

Dalam *marketing* juga diajarkan pentingnya memahami hubungan *positioning*, *differentiation*, dan *branding* (PDB). Pola hubungan PDB ini dapat dipahami bahwa posisi tawar suatu produk jasa akan baik jika memiliki perbedaan keunggulan dari yang lain. Menentukan keunggulan yang berbeda inilah yang disebut *differentiation*. Agar produk memiliki perbedaan maka yang diperlukan adalah menentukan *brand*. Dan, diferensiasi *brand* yang telah ditentukan harus dikomunikasikan secara terus-menerus pada *user* agar posisinya lebih kuat.

Dengan menggunakan pola hubungan PDB dalam *marketing*, berarti PTAI sejak dini harus menentukan *brand* untuk kajian ilmu-ilmu keislaman. Penentuan *brand* ini penting agar lulusan PTAI mampu menunjukkan keunggulan yang berbeda dengan lulusan perguruan tinggi umum. Selain memperhatikan *user*, PTAI juga harus mampu melihat perguruan tinggi pesaing (*competitor*). Kejelian melihat *user* dan *competitor* ini menjadi faktor penting untuk menentukan *marketing* dan *branding* PTAI.

Nah, tugas berat PTAI kini adalah melakukan *marketing* dan *branding* program-program studi yang dikembangkan. Konsekuensinya, PTAI tidak boleh dikelola asal-asalan, melainkan harus profesional. Hanya dengan cara inilah PTAI akan dapat eksis di tengah persaingan pendidikan tinggi yang kian kompetitif. Problem demoralisasi bangsa ini, seperti tercermin dalam banyak kasus korupsi dan ketidakjujuran, rasanya membutuhkan sentuhan civitas akademika PTAI. Mampukah?

SETELAH IAIN TIDAK BISA JADI UNIVERSITAS

Berita mengenai larangan IAIN menjadi UIN oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni telah memupus harapan beberapa kalangan di IAIN Sunan Ampel yang selama ini berkeinginan menjadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Surabaya tersebut menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Alasan yang dikemukakan Menteri Agama adalah bahwa perubahan IAIN menjadi UIN telah menjadikan IAIN tidak lagi fokus kepada jurusan keagamaan. UIN telah merambah jauh ke dunia praktis.

Fenomena ini dapat diamati dari beberapa UIN seperti di Jakarta, Yogyakarta, Malang, Riau, Medan dan Makasar. Padahal secara historis alasan didirikan IAIN oleh *the founding fathers* adalah untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman. Problemnya, sekarang ini pengaruh korporasi di dunia pendidikan telah semakin kuat. Orang tua menentukan pilihan terhadap program studi/jurusan bagi anaknya dilatarbelakangi oleh segudang harapan. Yang paling dominan adalah kalkulasi dan pertimbangan praktis.

Sebenarnya sejak awal 2000 keinginan mengubah IAIN Sunan Ampel menjadi UIN telah menjadi wacana yang demikian kuat. Hanya saja, keinginan tersebut be-

lum dapat direalisasikan karena memang para pengambil kebijakan (*decision maker*) IAIN Sunan Ampel ketika itu kurang memberikan respon. Anehnya dalam waktu bersamaan di IAIN Sunan Ampel juga mulai di kembangkan program studi/jurusan umum, seperti sosiologi, komunikasi dan psikologi. Pengembangan program studi umum di IAIN diakui atau tidak merupakan cermin keinginan mengubah IAIN menjadi UIN.

Keberadaan prodi umum di IAIN telah menunjukkan tren yang positif. Bahkan di beberapa fakultas, program studi umum telah mengalahkan program studi/jurusan keagamaan. Jika ini terus terjadi, bisa jadi program studi/jurusan keagamaan akan semakin kecil peminatnya. Pertanyaannya, akankah kita bertahan dengan mengembangkan jurusan keagamaan, sementara minat masyarakat demikian kecil?

Jika kita memilih mempertahankan yang ada, berarti diperlukan pemikiran kreatif untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat kepada IAIN. Bahkan IAIN juga harus lebih mendekatkan diri dengan lembaga-lembaga pendidikan keislaman mulai dari pesantren hingga madrasah. Pada kedua lembaga pendidikan keislaman itulah sesungguhnya basis IAIN. Karenanya menjadi penting diamati komitmen IAIN untuk turut serta mengembangkan pendidikan keislaman.

Jika merujuk pada pengertian yang diberikan Ibn Khaldun (w. 1406), ilmu-ilmu keislaman (*islamic sciences*) secara konvensional dapat dipahami sebagai cabang-cabang keilmuan yang dikembangkan di institusi-institusi pendidikan Islam, meliputi: penafsiran al-Qur'an (*Quranic exegesis*), studi Hadits, kalam, fikih dan tasawuf. Ibn Khaldun menamakan jenis keilmuan seperti ini dengan ilmu-ilmu tradisional/konvensional (*traditional/conventional sciences*). Jenis keilmuan seperti tafsir, hadits, kalam, fikih dan

tasawuf itulah yang diajarkan di sebagian besar lembaga pendidikan Islam sejak masa klasik hingga sekarang ini.

Sistem pendidikan di Indonesia juga memahami disiplin Ilmu Agama Islam sebagai bidang spesialisasi keilmuan yang dikembangkan dalam lingkungan PTAI, seperti: Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Menurut keputusan Menteri Agama Nomor 110 tahun 1982, Ilmu Agama Islam dikelompokkan dalam delapan bidang keilmuan, yaitu; (1) Qur'an dan Hadits, (2) Pemikiran Dalam Islam, (3) Fikih (Hukum Islam) dan Pranata Sosial, (4) Sejarah dan Peradaban Islam, (5) Bahasa dan Sastra Arab, (6) Pendidikan Islam, (7) Dakwah Islamiyah, dan (8) Pemikiran Modern Dalam Islam.

Penyebaran kedelapan bidang kajian Ilmu Agama Islam itu tercermin dalam Surat Keputusan Menteri Agama nomor 27 tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S-1) IAIN/STAIN, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Agama nomor 383 tahun 1997, yang juga berlaku bagi PTAIS. Bidang keahlian itu tampak dalam program studi (jurusan) yang dikembangkan UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS. Sebaran delapan bidang keahlian Ilmu Agama Islam, meliputi: Fakultas Tarbiyah (Tarbiyah Islamiyah), Fakultas Dakwah (Dakwah Islamiyah), Fakultas Adab (Bahasa-Sastra Arab dan Sejarah Peradaban Islam), Fakultas Syari'ah (Hukum dan Pranata Sosial Islam) dan Fakultas Ushuluddin (Qur'an-Hadits, Pemikiran Islam dan Perkembangan Modern Dalam Islam).

Harus diakui bahwa sejak beberapa IAIN mengubah statusnya menjadi UIN telah menyebabkan pergeseran dan sekaligus pengembangan delapan bidang kajian Ilmu Agama Islam. Bahkan pada beberapa UIN, penamaan fakultas pun turut berubah, misalnya saja di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin kini berubah nama menjadi Fakultas Ushuluddin dan Ilmu-ilmu Humaniora. Perubahan nama fakultas ini sekaligus mengubah konsentrasi (jurusan) yang dikembangkan.

Jika sebelumnya di Fakultas Ushuluddin ketika masih berstatus IAIN hanya mengembangkan tiga jurusan: Aqidah Filsafat (AF), Perbandingan Agama (PA) dan Tafsir Hadits (TH), maka setelah menjadi UIN juga dikembangkan Program Studi Politik Islam, Sosiologi Agama dan Psikologi Agama. Bahkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini juga dikembangkan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat bekerjasama dengan Universitas Indonesia.

Fenomena tersebut jelas menunjukkan keinginan kuat di kalangan PTAI untuk mengembangkan disiplin kajian Ilmu Agama Islam, bukan sekedar ilmu-ilmu tradisional (Qur'an, Hadits, Kalam, Fikih dan Tasawuf), melainkan juga disiplin keilmuan yang selama ini dikembangkan di perguruan tinggi umum. Tentu saja, fenomena ini juga harus dipahami sebagai tradisi baru, di mana kajian ilmu-ilmu keislaman tidak bisa dilakukan secara terpisah (*separated*) dari ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dan ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*).

Dengan cara seperti inilah kajian Ilmu Agama Islam dapat dikembangkan dalam bentuknya sebagai studi yang bersifat interkoneksi (*interconnected study*). Jadi tidak seperti yang selama ini terjadi, misalnya orang belajar agama harus di IAIN, STAIN dan PTAIS, sementara belajar ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman harus di perguruan tinggi umum. Jika ini yang terjadi, dikotomi ilmu agama dan umum jelas akan berjalan terus.

Departemen Agama di era kepemimpinan Maftuh Basyuni telah menutup peluang bagi munculnya UIN baru. Ini berarti keinginan mengintegrasikan ilmu agama dan umum secara institusional tidak mungkin lagi di-

lakukan. Tentu saja keputusan ini harus disikapi dengan positif. Dalam konteks ini IAIN harus kembali kepada jati dirinya semula dengan mengembangkan kajian ilmu-ilmu keislaman. Sesuatu yang barangkali dapat disebut peluang (*opportunity*) adalah sekarang ini kondisi masyarakat sangat membutuhkan agama. Bahkan jika dikaitkan dengan problematika bangsa ini yang sedang menghadapi persoalan demoralisasi, peran institusi keagamaan seperti halnya IAIN tentu sangat dibutuhkan.

Maka problem yang muncul adalah bagaimana IAIN mampu mengemas kajian keislaman yang dikembangkan sehingga memiliki nilai jual. Sebagai langkah awal perlu kiranya dilakukan usaha berkelanjutan untuk menjadikan IAIN Sunan Ampel sebagai pusat pengkajian ilmu-ilmu keislaman (*center of Islamic studies*). Bukan hanya berhenti pada tataran kajian, tapi juga perlu dibangun *image* bahwa IAIN Sunan Ampel mampu menjadi teladan bagi penanaman nilai-nilai keislaman. Ini memang tidak mudah dilakukan, apalagi di Jawa Timur terdapat beberapa PTAI yang potensial menjadi kompetitor. Sebut saja misalnya, UIN Malang yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Langkah selanjutnya yang juga penting adalah membangun kerjasama (*networking*) dengan berbagai instansi untuk mencari terobosan agar *out put* IAIN Sunan Ampel dapat diterima secara lebih banyak di dunia kerja. Ilmu agama jelas memiliki pasar tersendiri. Yang terpenting sekarang adalah mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan yang kompetitif.

INDEKS

A

Abad Mu'jizat Arab 44
 Abdullah Saeed 46
 Abdul Mu'thi 29
 Adni School 9-10
 AIDS 152-155, vi
 A Kiong 61-62
 Akreditasi 39
 Al-Irsyad 11
 Al-Junied Al-Islamiah 11
 Amerika 10, 32
 Andrea Hirata 59
 Anggaran Dasar 26
 APBD 14, 45, 69
 APBN 14, 69, 87, 115
 Arab 11, 44, 158, 162
 Australia Council Education Research
 42
 Australia-Indonesia Bridge Project 13

B

BAN-PT 39
 Batu 96
 Belitong 59, 62
 BHP 20-21
 B. J. Habibie 106
 BKKBN 152
 Blitar 96, 143
 BMPS 71
 Board of Education 140
 Bopda 73, 137
 BOS 73, 81, 127, 134
 BP 142
 BP3 140

Branding 18, 21-22, 158, v
 Budaya Mutu 36, v
 Buku teks 50
 Bu Mus 59-61, 63

C

Center for the Study of Higher Education
 42
 CGH 148-151
 Chi Baik 43
 Ciputra 106
 CPNS 37
 CTPS 151

D

Dakwah 162
 Developing Research Capacity 41
 Dewan Pendidikan 140
 Differentiation 22
 Dikdasmen 6-9, 13, 169
 Dikti 36-37
 Din Syamsuddin 27
 Disorientasi 100, vi
 Dispendik 71-74, 78-81, 123, 129-131
 DPK 69-70

E

Education for All 23
 Edward Sallis 52
 Emha Ainun Najib 106
 Eropa 10
 Evaluasi 14

Mewujudkan Pendidikan Unggul

F

- Fajar Riza Ul Haq 29
- Filipina 23
- Furnivall 33

G

- Gorontalo 96
- Green and Clean 148
- Guru Bantu 68, vi
- Guru inspiratif 49
- Guru kurikulum 49

H

- Harapan 67, 113
- Harfan 59-61, 63
- Harun 61-62
- Haryatmoko 76
- Hasni bin Mohammed 10
- HDI 141
- Hidup Islami 31
- HIV 152-155, vi
- Holistik 104, vi

I

- IAIN 41, 156-158, 160-164, 169-170, vi
- Ibn Khaldun 44, 161, 170
- Ibn Rusyd 44
- Ibn Sina 44
- IID 141
- Ikrar 94
- Ikwam 140
- IMD 109
- Indikator 6, 36, 116
- Inggris 11, 17, 141, 158
- Insan Mulia 133
- Inspirasi 46
- Inspiratif 47, 49, v
- Internasional 8-9, 12, 25, 138, 141, v
- Ismu 112
- ISO 25
- ISSN 54
- IT 11, 30, 50, 54
- ITB 36

J

- Jean Jever 51
- Jember 8

K

- K3S 65-66
- Kairo 11
- Kamboja 23
- KD 58
- Kediri 96, 143
- Keislaman 7
- Kejujuran 96, vi
- Kemenag 100, 106-107, 111-112, 157
- Kemendikbud 14, 16, 39, 65, 86, 106-107, 111-112
- Kemuhammadiyah 7, 112
- Kepala sekolah 127
- Kesadaran 34, 119, 129, 148
- Komite 73, 126-127, 138, 140
- Komitmen 74
- Kompetensi 58
- Komponen 88
- Komunitas 145
- Kualifikasi 15
- Kyai 28, 147

L

- Langkah Muhammadiyah 27
- Laos 23
- Laskar Pelangi 59-63, v
- Lavinas 34-35
- Linkage 42
- Lintang 61

M

- Maftuh Basyuni 160, 163
- Manajemen 140
- Mas Mansur 27
- Masmuk 79
- Mayoritas 70, 133
- Mazhab 103
- MBS 126, 140
- ME-Award 6

- Mendiknas 89, 92, 113, 117
 MenPAN 69
 Merle C. Ricklefs 46
 Michel McBain 43, 46
 MKKM65-66
 M. Nuh 89, 92
 Modern 162, 169
 Mokson bin Mahori 11
 Motivasi 16
 MoU 13
 Muhammadiyah Branded School 8
 Muslimah 59
 Musyawarah65, 71
- N**
- N+Ach31
 Noel L. Stonehouse 43
 Nunut 78, vi
 Nur Syam 41
- O**
- OKI 10
 Optimisme 118, vi
 Otoritas 112
 Output82
- P**
- PAI 100-103, 111-112
 Pak Nuh 113-117
 Parent and Community Association 140
 Parent and Teacher Association 140
 Pedoman Hidup Islami 31
 Peer Education 155
 Pembelajaran 62, 146, 149-150
 Pemerintah 7, 24, 69, 80, 87, 90-91, 105, 107, 115, 123, 131, 137
 Penampakan 34-35
 pendidikan nasional 16, 23-24, 32, 38, 40, 52, 88-89, 96, 104, 106-108, 113, 131
 Penelitian 46, 170
 Penjaminan mutu37-38, 40
 PERC 141
- Perspektif 50, 108, 170
 Persyarikatan 12-13, 26, 28
 Pesantren 143, 169, vi
 PGRI 78-80
 Philip K. Hitti44
 PKn 143-144
 PLPG 64-65
 PNS 26, 68-70, 80, vi
 Posisi 23, 32, 72, iii
 Positioning 22
 Potensi 142
 Proses 65, 150
 PTAI 156-159, 162-164, vi
 PTAIS 162-163
 PTK 54-55
 PTM 8
 Publikasi 54
 Pungutan 123, vi
 PuSAPoM 143-144
- Q**
- Quacquarelli Symonds 36
- R**
- Ramadan 30, 118-119
 Reformasi 59, v
 Rekrutmen 77
 Rektor 41, 113
 Reposisi 87
 Rhenald Kasali 49
 Richard James 43, 66
 Riset 41, v
 RPP 50
 RSBI 4, 8, 12-17, 25, 138, v
 Rudi Hartono 106
- S**
- Sahara 61
 SBI 4, 14-16
 School Council 140
 SD Muhammadiyah 16 Surabaya 7
 SD Negeri 2 Gadel 23
 SD Negeri Gadel 95

Mewujudkan Pendidikan Unggul

Selangor 10
Singapura 9-11, 13
Sisdiknas 38, 104
SK 58
SKL 58
SKM 8
SMAM 1 Gresik 12, 25
SMAM 1 Ponorogo 12-13, 25
SMAM 2 Sidoarjo 12-13, 25
SMAM 2 Surabaya 12-13, 25
SMKAB 9
SMKM 1 Kepanjen 12, 25
SMKM 5 Babat 12, 25
SMPM 12 Gresik 12, 25
SMPM 5 Surabaya 12-13, 25
SNP 7, 80, 90
SSN 8
Standar 8, 38, 50, 58, 80, 90, 93,
100
Syuja' 28

T

The 4 International Colleges and Universi-
ties 36
Timur Tengah 10
Tom J. Parkins 4
TPP 64-65
Tridharma 42

U

UGM 36
UI 36, 49
UIN 156-158, 160-164
UKA 64
UMG 71-74, vi
Universitas Al-Azhar 11
Universitas Muhammadiyah Kristen 30
Universitas Muhammadiyah Kupang 29
University of Melbourne 41-42, 46
UPTD 65-66
USBN 100-103, 111-112

V

Visi 23, v

W

Watik Pratiknya 30-31
WHO 151
William Fulbright 32
World Universities Web Ranking 36

Y

Yogyakarta 96, 160

Z

Zamroni 24

BIODATA



Dr. Biyanto, M.Ag, lahir pada 10 Oktober 1972 di Lamongan. Pendidikan dasar ditempuh di MI Hidayatul Ummah (lulus 1983) dan SDN Gampang Sejati (lulus 1985), kemudian melanjutkan di SMPN Laren (lulus 1988), dan SMAN Paciran, Lamongan (lulus 1991). Pernah belajar mengaji di Pesantren Al-Fatah, Siman, Lamongan (1983) dan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran (1989-1991). Menyelesaikan S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya (1991-1995), S2 IAIN Sumatera Utara (1996-1998), dan S3 dengan predikat Cumlaude di IAIN Sunan Ampel (2005-2008).

Sejak mahasiswa aktif dalam dunia pergerakan. Pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Korkom IAIN Sunan Ampel (1994-1995). Pada periode 2005-2010 dipercaya menjadi Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PWM Jawa Timur. Periode berikutnya, 2010-2015, dipercaya sebagai Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur.

Sejak tahun 1996 hingga sekarang, tercatat sebagai pengajar di IAIN Sunan Ampel. Juga tercatat sebagai pengajar di Universitas Widya Kartika (2007-sekarang), Institut Informatika Indonesia (2008-sekarang), dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2009). Pernah pula menjadi Tim Pengembangan SDM Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel (1999-2006), serta Ketua Program Studi Politik Islam IAIN Sunan Ampel (2005-2010). Pada tahun 2007 memperoleh predikat Dosen Teladan IAIN Sunan Ampel.

Karya tulis yang telah terpublikasikan di antaranya *Mewujudkan Pendidikan Unggul* (2012), *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan: Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah* (2009), *Teori Siklus Peradaban: Perspektif Ibn Khaldun* (2004), *Pergumulan Tokoh Muhammadiyah Menuju Sufi: Catatan Pemikiran Abdurrahim Nur* (bersama A. Fatichuddin & Sufyanto, 2003), *Menembus Benteng Tradisi* (kontributor, 2005), *Resolusi Konflik Islam Indonesia* (kontributor, 2007), *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme* (kontributor dan penyunting, 2007), dan *Penegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah* (kontributor, 2008).

Beberapa tulisan untuk Jurnal Ilmiah juga pernah dimuat di *Paramedia*, *Qualita Ahsana*, *Istiqro'*, *Ijtima'*, *Akademika*, *Islamica*, *al-Afkar*, dan lain-lain. Selain itu, juga aktif menulis opini di berbagai media massa: *Jawa Pos*, *Seputar Indonesia*, *Kompas*, *Surya*, *Radar Surabaya*, *Surabaya Post*, dan lain-lain. Korespondensi dapat melalui email: mr_abien@yahoo.com.